



RENCANA STRATEGIS

KANTOR KEMENAG KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2025–2029

KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia, hidayah dan kekuatan yang diberikan-Nya, sehingga dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang tahun 2025 - 2029 dengan baik.

Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang disusun berpedoman pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1361 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1100 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pada Kementerian Agama Tahun 2025-2029.

Penyusunan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang 2025-2029 diselesaikan oleh Tim yang dibentuk dengan melibatkan seluruh stakeholder internal Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang, mulai dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Seluruh Kepala Seksi dan Penyelenggara, juga melibatkan Satuan Kerja Madrasah Negeri di Kabupaten Lumajang.

Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang Tahun 2025-2029 menjadi acuan penyusunan Renstra di Tingkat Satuan Kerja Madrasah se - Kabupaten Lumajang.



Dengan telah selesainya disusun Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi *guidance* / panduan dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan rencana kinerja, rencana kegiatan ataupun rencana anggaran di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang sampai Satuan Kerja Madrasah.



Lumajang, 15 Desember 2025

Kepala

Achmad Faisol Syaifullah



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 622 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2025 - 2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
4. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Agama No. 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1361 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1100 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pada Kementerian Agama Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2025 – 2029;
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai pedoman untuk:
- Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang;
 - Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang;
 - Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 16 Desember 2025



KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN LUMAJANG


ACHMAD FAISOL SYAIFULLAH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR TABEL
DAFTAR SINGKATAN

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Kondisi Umum

- 1.1.1. Hasil Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang Tahun 2020–2024
 - 1.1.1.1. Hasil Capaian Kinerja Tahun 2020-2024
 - 1.1.1.2. Hasil Pelaksanaan Anggaran Periode Tahun 2020–2024
- 1.1.2. Hasil Aspirasi Masyarakat di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang
 - 1.1.2.1. Pemenuhan Kebutuhan Publik : Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Struktur Organisasi dan Sumber Daya Organisasi
 - 1.1.2.2. Layanan Publik : Komitmen Membangun Zona Integritas, Layanan PTSP dan Layanan PPID.
- 1.1.3. Aspirasi dan Isu Strategis

1.2. Potensi Dan Permasalahan

- 1.2.1. Potensi yang Dimiliki
- 1.2.2. Permasalahan yang Dihadapi
- 1.2.3. Analisis Lingkungan Strategis (SWOT)
 - 1.2.3.1. Matrik SWOT
 - 1.2.3.2. Implikasi Strategis:
 - 1.2.3.3. Matriks Strategis Turunan SWOT (SO–ST–WO–WT)

BAB II **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

- 2.1. Visi dan Misi
- 2.2. Tujuan
- 2.3. Sasaran Kegiatan
- 2.4. Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN)
- 2.5. Rumusan Pengukuran/Metadata

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

- 3.1. Target Kinerja
- 3.2. Kerangka Pendanaan

BAB IV

PENUTUP

LAMPIRAN

- Lampiran 1: Matrik Target Kinerja dan Rencana Pendanaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang
- Lampiran 2: Matrik Metadata Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Visi – Misi – Tujuan – Sasaran Strategis – Sararan Program – Sasaran Kegiatan – Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

DAFTAR TABEL

Tabel 1	:	Data ASN (PNS Dan PPPK) Se-Kabupaten Lumajang
Tabel 2	:	Data ASN (PNS dan PPPK) berdasarkan Jabatan Se-Kabupaten Lumajang Tahun 2025
Tabel 3	:	Data Jumlah Kecamatan dan Kelurahan Se Kabupaten Lumajang
Tabel 4	:	Data Jumlah Satker Berdasarkan DIPA se-Kabupaten Lumajang
Tabel 5	:	Tabel SWOT Analisis
Tabel 6	:	Tabel Strategis Turunan SWOT (SO–ST–WO–WT)

DAFTAR SINGKATAN

ASN	:	Aparatur Sipil Negara
BRUS	:	Bimbingan Pra Nikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS)
COVID-19	:	COrona, Vlrus, Disease-19
Daerah 3T	:	Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
FKUB	:	Forum Kerukunan Umat Beragama
IKM	:	Indeks Kepuasan Masyarakat
IKSK	:	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
TIK	:	Teknologi Informasi dan Komunikasi
KUA	:	Kantor Urusan Agama
Pendma	:	Pendidikan Madrasah
PD Pontren	:	Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
PTSP	:	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ASN	:	Aparatur Sipil Negara
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
PPPK	:	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Renstra-KL	:	Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
RKA-KL	:	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SK	:	Sasaran Kegiatan
SATKER	:	Satuan Kerja
SO	:	Strength-Opportunities
ST	:	Strength-Threats
SWOT	:	Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats
UMKM	:	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
WO	:	Weaknesses-Opportunities
WT	:	Weaknesses-Threats
ZI	:	Zona Integritas

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 622
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN RENCANA
STRATEGIS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang Tahun 2025–2029 dilakukan dengan pendekatan teknokratik, yaitu menggunakan analisis ilmiah dan data empiris untuk menghasilkan perencanaan yang rasional, terukur, dan berorientasi pada hasil. Pendekatan ini memastikan bahwa arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang selaras dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan zaman, serta kerangka pembangunan nasional dan sektoral juga selaras dengan visi, misi dan program kegiatan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Secara yuridis, penyusunan Renstra ini mengacu pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1100 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pada Kementerian Agama Tahun 2025-2029
2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1361 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor

1100 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pada Kementerian Agama Tahun 2025- 2029

3. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur Nomor 954 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2029

Dari dasar hukum tersebut, Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja saling berkaitan. Kedua dokumen menjadi dasar kinerja pegawai yang dtuangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Untuk mewujudkannya, pegawai wajib melakukan dialog kinerja dengan Pimpinan untuk menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi dengan memperhatikan pada Gambaran Keseluruhan Organisasi pada Dokumen Rencana Strategis Instansi / Unit Kerja dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja.

Dengan landasan pendekatan teknokratik ini, Renstra 2025–2029 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan administratif, tetapi juga menjadi instrumen manajemen yang efektif untuk mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama di Provinsi Jawa Timur secara lebih terukur, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

1.1. Kondisi Umum

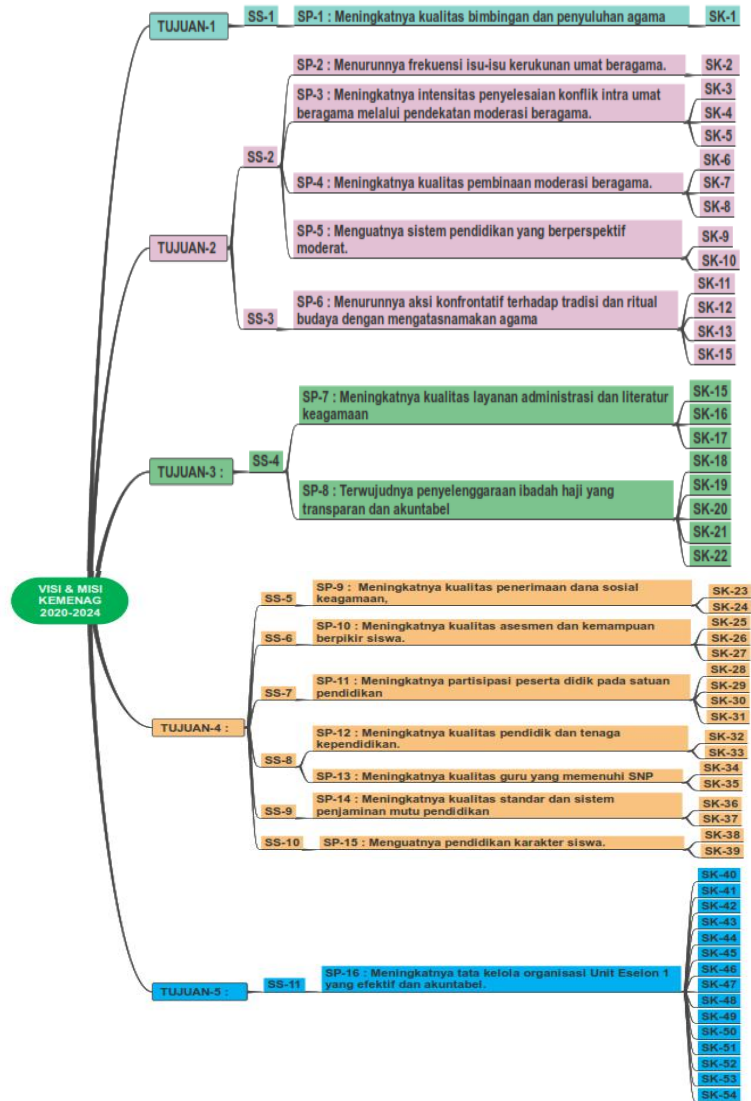
Pada kondisi umum ini menjelaskan tiga hal. Yang pertama menjelaskan Hasil Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang sebelumnya. Yang kedua memaparkan Hasil Aspirasi Masyarakat di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang, dan yang ketiga menjelaskan tentang Aspirasi dan Isu Strategis di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang.

1.1.1. Hasil Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang dalam Rencana Strategis periode tahun 2020 – 2024 telah menetapkan 54 Sasaran Kegiatan (SK) dan 159 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) serta Hasil Evaluasi Pelaksanaannya dalam rangka ikut mewujudkan 15 (lima belas) Sasaran Program.

Untuk menggambarkan keterkaitan kinerja pada Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang, mulai : Visi, Misi, Sasaran Strategis (SS), Sasaran Program (SP), Sasaran Kegiatan (SK) sampai pada Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dapat dilihat pada diagram. Diagram dimaksud lebih menekankan penggambaran alur capaian IKSK ke SK dalam rangka ikut mewujudkan Sasaran Program (SP). Sebagaimana diagram dibawah ini :

Diagram : 1
Visi – Misi – Tujuan – Sasaran – Indikator



Dari diagram diatas, dapat dilihat bahwa sasaran kegiatan mendukung perwujudan realisasi Sasaran Program diatasnya, selanjutnya mendukung perwujudan realisasi sasaran strategis, tujuan sampai pada misi dan puncaknya sebagai ikut mewujudkan visi yang ditetapkan. Selama lima tahun terakhir, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang memikul tanggung jawab besar dalam menjalankan 54 sasaran kegiatan dan 159 indikator kinerja. Ruang lingkup kerja yang luas ini mencakup hampir seluruh aspek kehidupan keagamaan masyarakat, mulai dari pembinaan umat, penguatan lembaga pendidikan, peningkatan kualitas guru, pengelolaan zakat dan wakaf, pelayanan keluarga melalui KUA, hingga tata kelola organisasi.

Pelaksanaan seluruh indikator tersebut menunjukkan perkembangan kinerja yang positif dari tahun ke tahun. Peningkatan ini merupakan hasil dari komitmen kuat seluruh pimpinan dan pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan memastikan setiap program berjalan secara efektif dan berorientasi pada hasil.

1. Mewujudkan Sasaran Progam Pertama (SP-1) : Meningkatnya Kualitas Bimbingan dan Penyuluhan Agama

Untuk mendukung dan mewujudkan Sasaran Program pertama tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang telah menetapkan dan merealisasikan Sasaran Kegiatan dan Indikatornya dengan target dan capaian mulai tahun 2020 sampai dengan 2024, sebagaimana akumulasi data sebagai berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA2 TARGET 2020-2024	RATA2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama	1. Nilai kinerja penyuluh agama	Nilai	85,52	96,03	100,00	Penais Zawa, semua Bimas, Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB)
		2. Persentase penyuluh agama yang dibina	%	100,00	100,00	100,00	
		3. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	Kelompok	48	48	100,00	
Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :						100,00	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kemenag Kab. Lumajang Tahun 2020-2024

Bidang penyuluhan agama menempati peran penting karena menyangkut hubungan langsung dengan masyarakat. Penyuluh agama, baik yang berstatus PNS maupun non-PNS, menjadi jembatan utama antara pemerintah dan umat. Indikator nilai kinerja penyuluh yang ditargetkan pada angka 85 berhasil terlampaui, dengan capaian rata-rata 96,03 atau 100% dari target.

Adapun sumber daya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang terdiri dari PNS dan PPPK yang dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 1 :
Data ASN (PNS Dan PPPK) Se-Kabupaten Lumajang

NO	UNIT KERJA	PNS dan PPPK		
		Perempuan	Laki laki	Jml
1	Kemenag Lumajang & Satker/Unit dibawahnya	279	362	641

Sumber : Bag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang : Tim SDM Aparatur

Sedangkan jumlah penyuluh agama di kabupaten Lumajang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2 :
Data ASN (PNS dan PPPK) berdasarkan Jabatan Se-Kabupaten Lumajang Tahun 2025

NO	JENIS JABATAN	JUMLAH
1	Analisis Pengelola Keuangan APBN	3
2	Analisis SDM Aparatur	1
3	Arsiparis	6
4	Guru	301
5	Pengawas Madrasah/Pendidikan Agama Islam	49
6	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	2
7	Penghulu	32
8	Penyuluh Agama	99
9	Perencana	3
10	Pranata Hubungan Masyarakat	1
11	Pranata Keuangan APBN	1
12	Pranata Komputer	2
13	Pranata Laboratorium Pendidikan	1
14	Pustakawan	1
15	Pengadministrasi Perkantoran	54
16	Pengadministrasi Umum	1
17	Penata Layanan Operasional	45

18	Operator Layanan Operasional	10
19	Pengolah Data dan Informasi	8
Jumlah		641

Sumber : Bag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang : Tim SDM Aparatur

Nilai kinerja penyuluh agama menunjukkan hasil yang sangat baik, di mana target yang telah ditetapkan berhasil dicapai secara optimal. Rata-rata nilai kinerja penyuluh mencapai angka 96,03 pada seluruh triwulan, sehingga menggambarkan konsistensi performa para penyuluh dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, persentase penyuluh agama yang dibina juga mencapai 96,03% pada setiap periode, menegaskan bahwa seluruh penyuluh mendapatkan pembinaan yang merata dan sesuai ketentuan.



Dari aspek pemberdayaan, jumlah kelompok sasaran yang diberdayakan oleh penyuluh tercatat sebanyak 48 kelompok pada dua triwulan awal, dan meningkat signifikan hingga mencapai 100% pada periode berikutnya. Secara keseluruhan, rata-rata prosentase realisasi IKSK atau capaian sasaran kegiatan (SK) mencapai 100%, menunjukkan bahwa indikator kinerja yang ditetapkan telah dipenuhi secara maksimal.

Dengan demikian Capaian Sasaran Kegiatan Pertama : Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama, yang didukung tiga IKSK dengan nilai rata- rata realisasi dalam prosentase sebesar 100%. Dengan capaian ini, Sasaran Program pertama yaitu Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama bisa diwujudkan.

2. Mewujudkan Sasaran Program Kedua (SP-2) : Menurunnya Frekuensi Isu-isu Kerukunan Umat Beragama

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB)
		2. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	Lokasi	1,00	1,00	100,00	
Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :						100	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kemenag Kab. Lumajang Tahun 2020-2024

Program kerukunan umat beragama juga memperlihatkan hasil yang kuat. Desa sadar kerukunan terealisasi penuh sesuai target. Capaian-capaian ini tidak hanya menunjukkan pemenuhan target, tetapi juga memperlihatkan antusiasme masyarakat. Dialog lintas iman semakin diterima sebagai sarana efektif untuk membangun harmoni. Tantangan ke depan adalah

memperluas tema dialog agar lebih relevan dengan isu-isu sosial kontemporer seperti kesehatan masyarakat, literasi digital, dan pelestarian lingkungan.

Untuk mencegah terjadinya kasus pelanggaran hak beragama dan Konflik Keagamaan, dilaksanakan kegiatan - kegiatan yang ditindaklanjuti sebagai berikut :

- Kampanye Kerukunan Umat Beragama, peserta dari para Relawan KUB se-kabupaten Lumajang baik dari Tokoh Masyarakat, ASN dan Ormas
- Konsolidasi Program Kerukunan Umat Beragama, peserta terdiri dari Pokja Kerukunan (Pokjawas MB, Pokjaluh MB, dan Pokja KKG/MGMP MB) dan ASN Kankemenag Kab. Lumajang
- Dialog Kerukunan Lintas Agama, peserta terdiri dari ASN Kankemenag Kabupaten Lumajang dan Tokoh Agama di Lingkungan Kankemenag Kabupaten Lumajang
- Pembinaan Harmony Umat Beragama Jawa Timur, peserta terdiri dari Kepala Kankemenag se Jawa Timur, Ketua FKUB se Jawa Timur, Pimpinan Ormas Keagamaan se Jawa Timur dan ASN Kanwil, tempat pelaksanaan di Rumah Ibadah 6 Agama Royal Residence Lakarsantri Surabaya. Sebagai narasumber adalah Bapak Menteri Agama RI, Gubernur Jawa Timur dan Walikota Surabaya
- Rapat Koordinasi dan FGD dengan Pokja Kerukunan (Pokjawas MB, Pokjaluh MB, dan Pokja KKG/MGMP MB), peserta terdiri dari perwakilan pokja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
- Lomba Tulis Cerpen Anak Harmoni, acara ini dilaksanakan di Kanwil Kementerian Agama secara online, peserta lomba cerpen anak harmony mulai dari tingkat SMP sederajat, SMA sederajat serta Pondok Pesantren
- Rapat Koordinasi Lintas Sektoral, peserta terdiri dari Ketua FKUB Kabupaten/Kota, Ketua FKUB Provinsi dan Pengurus serta ASN Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan – kegiatan tersebut dilakukan secara merata di seluruh kecamatan di kabupaten Lumajang. Adapun data jumlah kecamatan dan kelurahan di kabupaten Lumajang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3 :
Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
1	Lumajang	5
2	Sukodono	10
3	Senduro	12
4	Gucialit	9
5	Padang	9
6	Pasrujambe	7
7	Klakah	12
8	Ranuyoso	11
9	Randuagung	12
10	Kedungjajang	12
11	Yosowilangun	12
12	Jatiroto	6
13	Rowokangkung	7
14	Kunir	11
15	Tekung	8

16	Pasirian	11
17	Tempeh	13
18	Candipuro	10
19	Pronojiwo	6
20	Tempursari	7
21	Sumbersuko	8
Jumlah		193

Sumber : Lumajang dalam Angka Tahun 2025



Ke depan, tantangan yang perlu diperhatikan adalah memperkuat sistem deteksi dini melalui peningkatan akses pelaporan, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kompetensi aparat dalam mediasi dan resolusi konflik. Upaya-upaya ini akan memastikan bahwa capaian 100% tidak hanya dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan kualitasnya sehingga pelayanan perlindungan umat beragama dapat semakin adaptif terhadap dinamika sosial yang berkembang.

3. Mewujudkan Sasaran Progam Ketiga (SP-3) : Meningkatnya Intensitas Penyelesaian Konflik Intra Umat Beragama melalui Pendekatan Moderasi Beragama

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
3	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	%	100,00	100,00	100,00	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB)
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					100,00	
4	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	Lokasi	1,00	1,00	100,00	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB), Penais Zawa, semua Bimas
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					100,00	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kemenag Kab. Lumajang Tahun 2020-2024

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memegang peranan penting dalam menjaga harmonisasi hubungan antarumat beragama di daerah. Sepanjang periode 2020–2024, persentase Sekretariat Bersama FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui dukungan BOP mencapai 100%, selaras dengan target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan konsistensi dan efektivitas dalam penguatan kelembagaan FKUB, sekaligus menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan kerukunan.

Di sisi lain, kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama juga menunjukkan hasil yang optimal. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan terealisasi 100% dari target, mencerminkan komitmen berkelanjutan dalam memperkuat komunikasi dan pemahaman di antara kelompok–kelompok keagamaan internal. Forum ini berfungsi sebagai ruang penting untuk membangun kesepahaman, mencegah potensi gesekan, serta memperkuat solidaritas di lingkungan internal umat beragama.

Keberhasilan capaian tersebut menegaskan bahwa FKUB dan forum dialog intra umat beragama memiliki posisi strategis dalam upaya menjaga ketertiban dan harmoni sosial. Pada periode selanjutnya, penguatan program dapat diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan melalui inisiatif yang lebih inovatif, seperti pengembangan modul mediasi konflik, penyelenggaraan pendidikan toleransi bagi generasi muda, atau riset sosial keagamaan berbasis kolaborasi dengan lembaga pendidikan tinggi. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkaya kontribusi FKUB dalam merespons dinamika sosial dan memperluas jangkauan layanan kerukunan di masyarakat.

4. Mewujudkan Sasaran Progam Keempat (SP-4) : Meningkatnya Kualitas Pembinaan Moderasi Beragama

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
5	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	%	85,02	96,03	100,00	Penais Zawa, semua Bimas
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK - :					100,00	
6	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1. Persentase rumah ibadah yang ramah	%	37,43	53,95	100,00	Urais, semua Bimas
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK - :					100,00	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kemenag Kab. Lumajang Tahun 2020-2024

Upaya peningkatan kualitas moderasi beragama bagi penyuluh agama menunjukkan hasil yang sangat baik. Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat mencapai rata-rata 100% dari target 85,02%, dengan capaian kinerja sebesar 100%. Hasil ini mencerminkan keberhasilan program pembinaan dan penguatan kompetensi penyuluh dalam memahami serta menerapkan nilai-nilai moderasi beragama. Tingginya capaian tersebut menegaskan bahwa penyuluh agama telah mampu menjadi agen strategis dalam menyebarkan pesan moderat, menumbuhkan sikap toleran, dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan keagamaan masyarakat.

Sementara itu, pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran juga menunjukkan capaian maksimal. Persentase rumah ibadah ramah mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini memperlihatkan bahwa rumah ibadah tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan ibadah, tetapi juga sebagai ruang sosial yang inklusif, aman, serta mendukung interaksi yang harmonis antarumat. Konsistensi capaian ini menandakan bahwa program pembinaan pengelola rumah ibadah telah berjalan efektif dan memberikan dampak positif terhadap kualitas layanan keagamaan.



Secara keseluruhan, kedua capaian tersebut menunjukkan bahwa pembinaan moderasi beragama dan pengembangan rumah ibadah ramah telah dilaksanakan dengan baik serta memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan kerukunan dan toleransi. Ke depan, program dapat diarahkan pada peningkatan kapasitas penyuluh melalui pemanfaatan teknologi informasi, penyusunan materi pembelajaran moderasi yang lebih kontekstual, serta pengembangan rumah ibadah sebagai pusat edukasi keagamaan dan pemberdayaan sosial masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan umat beragama dan meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan yang inklusif dan berkelanjutan.

5. Mewujudkan Sasaran Progam Kelima (SP-5) : Menurunnya Aksi Konfrontatif terhadap Tradisi dan Ritual Budaya dengan Mengatasnamakan Agama

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
7	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	1. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	%	99,00	97,20	100,00	Seksi Madrasah, PAIS, semua Bimas
		2. Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	%	90,05	89,02	100,00	
		3. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	%	56,05	50,70	100,00	
		4. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	%	97,00	100,00	100,00	
		5. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	%	66,25	100,00	100,00	
		6. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	%	90,00	100,00	100,00	
		7. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	%	20,00	100,00	100,00	
		8. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	%	47,50	100,00	100,00	
		9. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	%	41,20	100,00	100,00	
		10. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama	Kegiatan	1	1	100,00	
		11. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama	Kegiatan	1,00	1,00	100,00	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					100,00	
8	Menguatnya peran	1. Persentase pesantren yang berwawasan moderat	%	94,00	100,00	100,00	Seksi Pontren

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI I (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
	pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	2. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al Qur'an	%	4,00	100,00	10,00	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					100,00	

Sumber Aplikasi SIPKA Kemenag Kab. Lumajang Tahun 2020-2024

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang melaksanakan berbagai kegiatan strategis yang berfokus pada penguatan moderasi beragama di lingkungan pendidikan. Pada Sasaran Kegiatan *Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama*, capaian indikator menunjukkan hasil yang sangat baik, ditandai dengan persentase siswa madrasah, sekolah keagamaan, dan sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama bermuatan moderasi beragama yang masing-masing mencapai 100%. Pembinaan guru dan pengawas pada berbagai jenis satuan pendidikan juga mencapai hasil optimal dengan capaian 100% pada hampir seluruh indikator, serta kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah dan sekolah keagamaan terlaksana sesuai target, menghasilkan rata-rata capaian sebesar 100%. Selanjutnya, pada Sasaran Kegiatan *Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam*, capaian kinerja menunjukkan perkembangan sangat positif dengan persentase pesantren berwawasan moderat yang mencapai 100% dan peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah serta pendidikan Al-Qur'an yang mencapai 100%, sehingga rata-rata capaian sasaran kegiatan ini sebesar 100%.

6. Mewujudkan Sasaran Progam Keenam (SP-6) : Menguatnya Sistem Pendidikan yang Berperspektif Moderat

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
9	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	Kegiatan	1,00	1,00	100,00	Bagian Tata Usaha (Subbag Tata Usaha)
Rata-Rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK - :						100,00	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kemenag Kab. Lumajang Tahun 2020-2024

Pada Sasaran Kegiatan *Menguatnya dialog lintas agama dan budaya*, capaian kinerja menunjukkan hasil yang optimal. Indikator yang diukur berupa jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan mencapai realisasi 1 kegiatan, sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga menghasilkan capaian sebesar 100%. Kinerja ini berada di bawah tanggung jawab Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB) dan menunjukkan bahwa upaya memperkuat ruang pertemuan antarumat beragama serta antarbudaya telah berjalan efektif. Secara keseluruhan, capaian pada bidang kebudayaan menggambarkan hasil yang merata dan tinggi. Pelaksanaan dialog lintas agama dan budaya yang mencapai target memperlihatkan bahwa program-program kebudayaan berhasil menjaga keseimbangan antara nilai-nilai keagamaan dan tradisi lokal. Ke depan, penguatan pada aspek dokumentasi dan digitalisasi budaya menjadi langkah penting agar generasi muda dapat mengakses dan mengenal kekayaan tradisi Lumajang secara lebih mudah, modern, dan menarik.

7. Mewujudkan Sasaran Progam Ketujuh (SP-7) : Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi dan Literatur Keagamaan

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
10	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	Unit	12	12	100,00	Seksi Bimas Islam, Peny. Zawa, Peny. Katolik, Peny. Hindu
		2. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	%	27,83	100,00	100,00	
		3. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	Kegiatan	6,00	6,00	100,00	
		4. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	Lokasi	00,00	00,00	000,00	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					150,00	
11	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk	1. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	Orang	1786,00	1786,00	100,00	Seksi Bimas Islam
		2. Jumlah penghulu yang dibina	Orang	34,80	34,80	100,00	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					100,00	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kemenag Kab. Lumajang Tahun 2020-2024

Capaian pelayanan keagamaan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang menunjukkan hasil yang sangat baik. Pada peningkatan sarana pendukung pelayanan keagamaan, fasilitasi lembaga keagamaan 100%, bimbingan layanan syariah 100%, dan pengukuran arah kiblat 100%, dengan rata-rata capaian 100%.



Sementara itu, pada peningkatan pelayanan nikah/rujuk, kursus pranikah mencapai 100,00% dan pembinaan penghulu 100%, dengan rata-rata capaian 100,00%. Hasil ini menunjukkan bahwa layanan keagamaan, termasuk layanan keluarga melalui KUA, telah berjalan optimal. Ke depan, pengembangan materi kursus pranikah seperti literasi keuangan, kesehatan mental, dan ketahanan keluarga dapat semakin meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat.

8. Mewujudkan Sasaran Progam Kedelapan (SP-8) : Terwujudnya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang Transparan dan Akuntabel

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
12	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	1. Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	%	75,00	100,00	100,00	Bidang PHU
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					100,00	
13	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	%	0,60	0.60	100,00	Bidang PHU
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					100,00	
14	Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji	1. Persentase petugas haji yang profesional	%	90,00	90,00	100,00	Bidang PHU
		2. Persentase Jamaah Haji yang mengikuti manasik haji	%	95,00	95,00	100,00	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					100,00	
15	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (<i>Continuity service</i>)	%	100,00	100,00	100,00	Bidang PHU
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					100,00	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kemenag Kab. Lumajang Tahun 2020-2024

Bidang haji sempat sangat terpengaruh pandemi pada 2020-2021 dengan pembatalan keberangkatan. Namun sejak 2022, layanan kembali berjalan normal dengan sejumlah perbaikan. Inovasi yang diterapkan adalah *One Stop Service* di Asrama Haji Surabaya pada 2023, yang memudahkan jamaah menyelesaikan seluruh administrasi di satu tempat.



Selain itu, penggunaan jalur *fast track* di bandara mempercepat proses keberangkatan dan pemulangan jamaah. Pada 2024, meski kuota jamaah meningkat, sistem ini tetap mampu melayani dengan baik. Namun memasuki periode 2025–2029, urusan haji berangsur tidak lagi berada di bawah Kementerian Agama, sehingga pada dokumen perencanaan baru tidak lagi menjadi fokus utama.

9. Mewujudkan Sasaran Progam Kesembilan (SP-9) : Meningkatnya Kualitas Penerimaan Dana Sosial Keagamaan

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI I 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
16	Meningkatnya pengelolaannya dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1. Persentase amil yang memiliki sertifikat kompetensi	%	50,00	50,00	100,00	Bidang Penais Zawa
		2. Persentase lembaga zakat yang dibina	%	100,00	100,00	100,00	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					100,00	
17	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1. Persentase lembaga wakaf yang dibina	%	70,00	70,00	100,00	Bidang Penais Zawa
		2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	%	25,00	25,00	100,00	
		3. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	%	20,00	20,00	100,00	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					100,00	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kemenag Kab. Lumajang Tahun 2020-2024

Bidang zakat menunjukkan capaian rata-rata 84,9%. Pembinaan Unit Pengumpul Zakat berjalan baik, walaupun sertifikasi Lembaga Amil Zakat masih menghadirkan peluang peningkatan. Dengan memperkuat akuntabilitas dan transparansi, lembaga zakat dapat lebih dipercaya masyarakat sehingga potensi pengumpulan dana zakat bisa lebih besar.

Bidang wakaf mencatat capaian lebih tinggi. Akta ikrar wakaf mencapai 98,2%, sementara sertifikasi tanah wakaf berada di kisaran 90,8%. Aset wakaf memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi wakaf produktif yang dapat dimanfaatkan bagi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

10. Mewujudkan Sasaran Progam Kesepuluh (SP-10) : Meningkatnya Kualitas Asesmen dan Kemampuan Berpikir Siswa

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
18	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	%	75,00	75,00	100,00	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas
		2. Jumlah madrasah/sekolah keagamaan yang melaksanakan program keagamaan	Lembaga	1,00	1,00	100,00	
		3. Jumlah madrasah/sekolah keagamaan yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	Lembaga	1,00	1,00	100,00	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK - :					100,00	
19	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1. Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	%	96,67	96,67	100,00	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas
		2. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	%	70,00	70,00	100,00	
		3. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	%	70,00	70,00	100,00	
		4. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/sekolah keagamaan	Orang	8,00	8,00	100,00	
		5. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan	Kegiatan	90,00	90,00	100,00	
		6. Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi	%	43,33	43,33	100,00	
		7. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi	%	20,00	20,00	100,00	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK - :					100,00	
20	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	1. Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	%	80,33	23,91	100,00	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI I (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
		2. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e- pembelajaran	%	45,00	80,33	100,00	
		3. Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	%	87,00	45,00	100,00	
		4. Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e- pembelajaran	%	50,00	87,00	100,00	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK- :					100,00	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kemenag Kab. Lumajang Tahun 2020-2024

11. Mewujudkan Sasaran Progam Kesebelas (SP-11) : Meningkatnya Partisipasi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
21	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1. Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	60,00	70,00	100,00	Bidang Madrasah, Pontren, PAIS, semua Bimas
		2. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	75,00	75,00	100,00	
		3. Persentase MTs/Wustha/ SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	82,00	82,00	100,00	
		4. Persentase MA/Ulya/SMTK/ SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	75,00	75,00	100,00	

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
		5. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana	%	40,00	40,00	100,00	
		6. Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	30,00	30,00	100,00	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					100,00	
22	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat.	1. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	Jumlah	12.541,00	12.541,00	100,00	Seksi Madrasah
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					100,00	
23	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	1. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	%	0,20	0,20	100,00	Bidang Madrasah, Pontren
		2. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	%	30,00	30,00	100,00	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					100,00	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kemenag Kab. Lumajang Tahun 2020-2024

Bidang pendidikan menjadi salah satu sektor terbesar dalam kinerja Kementerian Agama. Integrasi kurikulum moderasi beragama tercapai 90,7%. Pesantren berwawasan moderat mencatat capaian 95,2%. Madrasah berhasil meningkatkan akreditasi, mutu pembelajaran, dan distribusi guru. Penyaluran BOS berjalan sangat efektif dengan capaian di atas 95%, menjaga keberlangsungan pendidikan terutama di masa pandemi. Guru Pendidikan Agama Islam juga mendapat perhatian, dengan capaian pembinaan di atas 95%, sementara distribusi guru berada pada kisaran 90%. Masih ada peluang perbaikan dalam hal pemerataan distribusi guru ke wilayah terpencil.

Jumlah satker berdasarkan DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4 :
Jumlah Satker se-Kabupaten Lumajang

No	Satker Berdasarkan DIPA	Jumlah
1	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang	4
2	MAN se-Lumajang	1
3	MTsN se-Lumajang	3
Jumlah		8

Sumber : Sub Bag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang : Tim Perencanaan dan Data

12. Mewujudkan Sasaran Progam Keduabelas (SP-12) : Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
24	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1. Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi	%	70,00	70,00	100,00	Bidang Madrasah, Pontren, semua Bimas
		2. Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	25,00	22,53	100,00	
		3. Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	15,00	15,00	100,00	
		Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :				100,00	
25	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga	1. Persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	%	85,00	90,00	105,88	Bidang Madrasah, PAIS, semua

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUA N	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISAS I 2020-2024	RATA2 REALISAS I (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
	kependidikan sesuai dengan standar minimal	2. Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	%	80,00	80,00	100,00	Bimas
		3. Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	%	80,00	80,00	100,00	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					101,96	

13. Mewujudkan Sasaran Progam Ketigabelas (SP-13) : Meningkatnya Kualitas Guru yang Memenuhi SNP

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
26	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik.	1. Persentase Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah, Guru Madrasah, Guru Sekolah Keagamaan yang mengikuti PPG	%	10,00	10,00	100,00	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas
		2. Persentase Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah berkualifikasi minimal S1	%	85,00	85,00	100,00	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					100,00	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kemenag Kab. Lumajang Tahun 2020-2024

14. Mewujudkan Sasaran Progam Keempatbelas (SP-14) : Meningkatnya Kualitas Standar dan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
27	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	1. Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.	Lembaga	19,00	19,00	100,00	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas
		2. Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi berdasarkan hasil	Lembaga	1,00	1,00	100,00	

		pemetaan					
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK- :					100,00	
28	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1. Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu	%	80,00	80,00	100,00	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas
		2. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	%	75,00	100,00	142,86	
		3. Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	%	5,00	5,00	100,00	
		4. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	%	5,00	5,00	100,00	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK- :					110,71	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kemenag Kab. Lumajang Tahun 2020-2024

15. Mewujudkan Sasaran Progam Kelimabelas (SP-15) : Menguatnya Pendidikan Karakter Siswa

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
29	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1. Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	%	90,00	90,00	100,00	Bidang Madrasah, Pontren, semua Bimas
		2. Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	%	85,00	85,00	100,00	
		3. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman;	%	60,00	60,00	100,00	
		4. Persentase madrasah yang ramah anak.	%	80,00	80,00	100,00	
		5. Persentase sekolah keagamaan yang ramah anak.	%	80,00	80,00	100,00	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK- :					100,00	
30	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawan	1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawan	Madrasah	19,00	19,00	100,00	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISAS I (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
	n pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	2. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	Sekolah	1,00	1,00	100,00	
		3. Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina	Unit	19,00	19,00	100,00	
		4. Jumlah gugus pramuka pada sekolah keagamaan yang dibina	Unit	1,00	1,00	100,00	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKS K / Capaian SK- :					100,00	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kemenag Kab. Lumajang Tahun 2020-2024

16. Mewujudkan Sasaran Progam Keenambelas (SP-16) : Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Unit Eselon 1 yang Efektif dan Akuntabel

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
31	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	Kegiatan	1,00	1,00	100,00	Bagian Tata Usaha (Subbag Kepegawaian dan Hukum)
Rata-Rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK - :						100,00	
32	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	%	100,00	100,00	100,00	Bagian Tata Usaha (Subbag Kepegawaian dan Hukum)
		2. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	
		3. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	%	100,00	100,00	100,00	
		4. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	%	100,00	100,00	100,00	

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
		5. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	%	100,00	100,00	100,00	
		6. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	
		7. Persentase data ASN yang diupdate	%	100,00	100,00	100,00	
		8. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	%	100,00	100,00	100,00	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					100,00	
33	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan.	1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu.	Dokumen	14,00	14,00	100,00	Bagian Tata Usaha (Subbag Keuangan dan BMN)
		2. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	%	100,00	100,00	100,00	
		3. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	%	99,00	99,00	100,00	
		4. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	%	100,00	100,00	100,00	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					100,00	
34	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	1. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	%	100,00	100,00	100,00	Bagian Tata Usaha (Subbag Keuangan dan BMN)
		2. Persentase tanah yang bersertifikat	%	80,00	80,00	100,00	
		3. Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN	%	100,00	100,00	100,00	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					100,00	

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
35	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	1. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	%	90,00	90,00	100,00	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB)
		2. Persentase Aplikasi SIPKA satuan organisasi yang dievaluasi	%	100,00	100,00	100,00	
		3. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					100,00	
36	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	%	100,00	100,00	100,00	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB)
		2. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	Satker	16,00	16,00	100,00	
		3. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	Orang	1,00	1,00	100,00	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					100,00	
37	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1. Persentase output perencanaan yang berbasis data	%	100,00	100,00	100,00	Bagian Tata Usaha (Subbag Perencanaan, Data dan Informasi)
		2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	100,00	100,00	100,00	
		3. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	%	90,00	90,00	100,00	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					100,00	
38	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	%	95,00	95,00	100,00	Bagian Tata Usaha (Subbag Perencanaan, Data dan Informasi)

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
		2. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	%	80,00	80,00	100,00	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					100,00	
39	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	%	95,00	95,00	100,00	Bagian Tata Usaha (Subbag Umum dan Humas)
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					100,00	
40	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	Bagian Tata Usaha (Subbag Umum dan Humas)
		2. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	%	100,00	100,00	100,00	
		3. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	%	100,00	100,00	100,00	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					100,00	
41	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	%	90,00	90,00	100,00	Bagian Tata Usaha (Subbag Umum dan Humas)
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					100,00	
42	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	Kegiatan	90,00	90,00	100,00	Bagian Tata Usaha (Subbag Umum dan Humas)
		2. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter	%	100,00	100,00	100,00	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					100,00	
43	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	%	100,00	100,00	100,00	Bagian Tata Usaha (Subbag Perencanaan, Data dan Informasi)

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK - :					100,00	
44	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	1. Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	Orang	681,00	681,00	100,00	Bagian Tata Usaha (Subbag Keuangan dan BMN)
		2. Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian	Dokumen	1,00	1,00	100,00	Bagian Tata Usaha (Subbag Perencanaan, Data dan Informasi)
		3. Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yan disediakan	Unit	5,00	5,00	100,00	Bagian Tata Usaha (Subbag Umum dan Humas)
		4. Jumlah layanan umum dan perlengkapan	Unit	1,00	1,00	100,00	Bagian Tata Usaha (Subbag Umum dan Humas)
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					100,00	

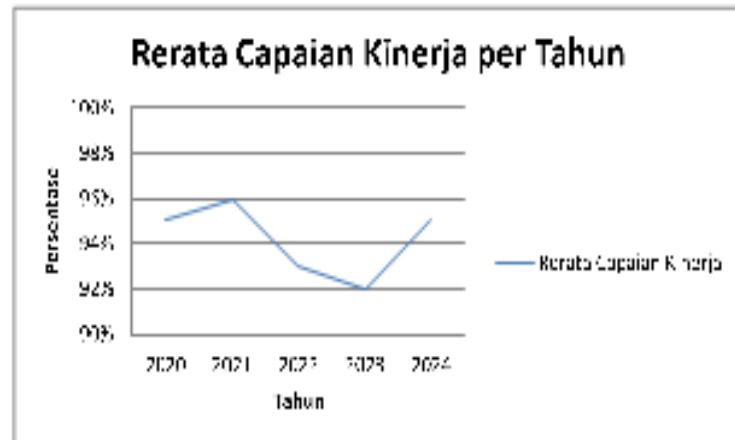
Sumber : Aplikasi SIPKA Kemenag Kab. Lumajang Tahun 2020-2024

Tata kelola organisasi memperlihatkan capaian paling menonjol. Hampir semua indikator berada di atas 95%. Layanan humas dan informasi bahkan mencapai 143,6%. Komunikasi publik yang terbuka dan transparansi data memperkuat akuntabilitas.

**INFOGRA FIS CAPAI AN KINERJA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LUMAJANG**

Tahun	Rerata Capaian Kinerja
2020	95%
2021	96%
2022	93%
2023	92%
2024	95%

**INFOGRA FIS CAPAI AN KINERJA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG**



Ke depan, pemerataan kualitas pelayanan antarwilayah tetap perlu diperhatikan agar seluruh masyarakat merasakan manfaat yang sama. Jika ditarik garis besar, capaian Kemenag Kabupaten Lumajang selama 2020-2024 konsisten dan cenderung meningkat. Rerata capaian lima tahun berada di angka 98,55%. Beberapa indikator melampaui target, sementara yang lain masih memberikan ruang untuk peningkatan. Dengan capaian ini, arah ke depan dapat lebih fokus pada penguatan program yang memberi dampak langsung kepada masyarakat.

Memasuki periode 2025-2029, arah kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang mengacu pada delapan program prioritas yang dirumuskan dalam ASTA PROTAS. Fokus diarahkan pada penguatan kerukunan dan cinta kemanusiaan melalui desa sadar kerukunan, pembinaan penyuluh, dan forum lintas iman. Program ekoteologi menekankan pelestarian lingkungan berbasis nilai agama dengan rumah ibadah ramah lingkungan dan gerakan hijau berbasis komunitas. Layanan keagamaan diarahkan agar lebih berdampak dengan

standardisasi bimbingan perkawinan, digitalisasi data rumah ibadah, serta KUA inklusif. Pendidikan unggul menjadi sektor kunci, dengan pengembangan kurikulum kontekstual, digitalisasi madrasah, peningkatan kesejahteraan guru, beasiswa, serta akreditasi. Pesantren diberdayakan melalui program kemandirian ekonomi, beasiswa santri, dan peran pesantren sebagai pusat layanan gizi. Ekonomi umat diperkuat dengan pengelolaan zakat dan wakaf produktif serta rumah ibadah sebagai pusat pemberdayaan. Seluruh program tersebut ditopang digitalisasi tata kelola melalui sistem satu data, superapps layanan, dan pembelajaran berbasis LMS.

Dengan fondasi capaian 2020-2024 dan panduan ASTA PROTAS 2025-2029, arah kebijakan Kemenag Kabupaten Lumajang dapat dilanjutkan secara lebih adaptif dan inklusif. Tantangan ke depan menuntut inovasi berkelanjutan, transparansi layanan, dan pemerataan manfaat di seluruh wilayah. Program yang dirumuskan bukan hanya melanjutkan capaian sebelumnya, tetapi juga merespons kebutuhan baru masyarakat. Dengan demikian, pelayanan publik keagamaan di Jawa Timur diharapkan semakin kuat, merata, dan berdaya guna.

1.1.1.2 Hasil Pelaksanaan Anggaran Periode Tahun 2020–2024

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi Anggaran di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang mempunyai dua tanggung jawab, sebagai berikut :

1. Penyusunan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi anggaran di internal Kankemenag terdiri 4 Program / 4 DIPA.
2. Mengkoordinasikan penyusunan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi anggaran di internal Kankemenag terdiri 4 Program / 4 DIPA dan Madrasah Negeri.

Belanja Barang pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang secara umum menunjukkan perkembangan yang cukup stabil dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, realisasi anggaran mencapai 98,72% dari total pagu yang ditetapkan, menunjukkan penggunaan anggaran yang efektif. Pada tahun 2021, persentase realisasi sedikit meningkat menjadi 99,82%, Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan persentase realisasi menjadi 94,72%, dan pada tahun 2023 kembali mengalami sedikit penurunan 94,61% yang menunjukkan adanya penghematan atau penyesuaian belanja, kemungkinan disebabkan oleh dampak kebijakan efisiensi pasca pandemi Covid-19. Sementara itu, pada tahun 2024 persentase realisasi kembali menurun menjadi 90,62%, meskipun secara nominal pagu mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, kinerja belanja barang masih tergolong baik karena tingkat realisasi anggaran tetap berada di atas 90%, menandakan pelaksanaan kegiatan yang relatif sesuai dengan perencanaan, meskipun terdapat penyesuaian akibat kondisi eksternal seperti dampak ekonomi dan kebijakan efisiensi pemerintah.

Pagu anggaran belanja modal dari Tahun 2020 s.d. 2024 cenderung fluktuatif, akan tetapi persentase realisasi selalu maksimal mendekati 100%.

Dari total anggaran yang ada, pada tahun 2020 realisasi anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang mencapai 99,51%. dan tahun 2021-2024 realisasi anggaran kembali mendekati 100%, menandakan penggunaan anggaran yang optimal dan terkendali setiap tahunnya.

1.1.2 Hasil Aspirasi Masyarakat di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang

Uraian mengenai Hasil Aspirasi Masyarakat dalam dokumen Renstra dibagi menjadi dua bagian utama. Bagian pertama membahas Pemenuhan Kebutuhan Publik, yang mencakup kedudukan, tugas, dan fungsi kantor, struktur organisasi, serta ketersediaan dan pengelolaan sumber daya organisasi. Bagian kedua menekankan Layanan Publik, yang meliputi komitmen pembangunan Zona Integritas, penyelenggaraan layanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta penyediaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pembagian ini bertujuan untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat dapat direspons secara menyeluruh, baik melalui peningkatan kapasitas internal organisasi maupun melalui kualitas layanan yang diberikan kepada publik.

1.1.2.1 Pemenuhan Kebutuhan Publik : Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Struktur Organisasi dan Sumber Daya Organisasi

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang memegang kedudukan strategis sebagai instansi vertikal yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan keagamaan di tingkat daerah. Pemenuhan kebutuhan publik diwujudkan melalui pelaksanaan tugas pokok menyelenggarakan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan secara inklusif dan akuntabel. Fungsi organisasi dioptimalkan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat Lumajang mendapatkan akses yang setara terhadap pelayanan keagamaan, penataan produk halal, hingga penguatan moderasi beragama guna menjaga keharmonisan serta kerukunan antarumat beragama.

Guna mendukung keberhasilan target makro tersebut, struktur organisasi Kemenag Lumajang didesain secara adaptif, responsif, dan berbasis kinerja yang mengintegrasikan subbagian tata usaha, seksi-seksi teknis, penyelenggara, hingga unit pelaksana teknis di tingkat kecamatan seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan madrasah negeri. Penguatan struktur ini ditopang secara linear oleh optimalisasi sumber daya organisasi, baik dari sisi digitalisasi infrastruktur layanan maupun pembenahan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Melalui penataan kompetensi aparatur secara berkelanjutan dan pemanfaatan sistem informasi terintegrasi, Kemenag Lumajang berkomitmen membangun birokrasi yang bersih, melayani, dan tangkas demi menjawab dinamika kebutuhan publik yang kian berkembang sepanjang periode lima tahun ke depan.

1.1.2.2 Layanan Publik : Komitmen Membangun Zona Integritas, Layanan PTSP dan Layanan PPID

Mulai tahun 2025, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang telah menapaki langkah strategis membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Langkah ini diwujudkan melalui perbaikan tata kelola dan pelayanan publik, di antaranya dengan penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang kini dilengkapi dengan standar layanan yang jelas, transparan, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Transformasi pelayanan ini menjadi bukti bahwa pembangunan ZI bukan sekadar slogan, tetapi upaya nyata untuk memberikan layanan yang cepat, tepat, dan berkualitas.

Dalam perjalanannya, Kemenag Kabupaten Lumajang terus melakukan inovasi untuk memastikan pelayanan publik semakin inklusif. Pelayanan ramah kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, dan ibu menyusui menjadi perhatian serius.

Penyediaan fasilitas fisik yang aksesibel, pendampingan petugas khusus, dan penggunaan media informasi yang ramah difabel menjadi bagian dari standar pelayanan yang diterapkan. Upaya ini menunjukkan bahwa semangat ZI juga berarti menjamin kesetaraan akses layanan bagi semua warga negara.

Penguatan integritas internal juga menjadi prioritas. Setiap pegawai dibekali pemahaman tentang kode etik dan perilaku, serta dilibatkan aktif dalam pengawasan internal. Mekanisme whistleblowing sistem dan pengaduan masyarakat ditata ulang agar lebih mudah diakses dan ditindaklanjuti secara cepat. Dengan demikian, setiap laporan, baik terkait dugaan pelanggaran maupun saran perbaikan layanan, dapat diproses secara transparan dan akuntabel.

1.1.3 Aspirasi dan Isu Strategis

Hasil Aspirasi Masyarakat terkait kinerja dan layanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang dapat diketahui dari Hasil Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat). Hasil analisis capaian Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang sehingga rencana perbaikan yang disusun berdasarkan hasil laporan ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pelayanan publik.

Hasil pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan oleh Kemenag Kabupaten Lumajang sampai dengan Desember 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang yaitu 3,70 dalam skala 4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang, Sangat Baik.

- b. Untuk dapat mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima diperlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh pengambilan keputusan (top manajemen), pimpinan unit pelaksana dan pelaksana pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat dan responsif, serta penyediaan sarana prasarana layanan kebutuhan khusus
- c. Melakukan publikasi secara terus menerus akan upaya perbaikan yang sedang dan telah dilakukan untuk perbaikan layanan baik melalui website maupun sosial media.

1.2. Potensi Dan Permasalahan

Yang diuraikan pada pembahasan Potensi dan Permasalahan yakni : Potensi yang Dimiliki, Permasalahan yang Dihadapi, selanjutnya dilakukan Analisa dengan menggunakan Analisis Lingkungan Strategis (SWOT), dengan Langkah - Langkah : Menyusun Matrik SWOT, memaparkan Implikasi Strategis, dan terakhir menampilkan Matriks Strategis Turunan SWOT (SO-ST-WO-WT).

1.2.1 Potensi yang Dimiliki

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang menunjukkan sejumlah potensi strategis yang dapat menjadi modal utama dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional bidang agama dan pendidikan keagamaan. Potensi tersebut meliputi :

1. SDM Profesional dan Dedikatif

Kemenag Kab. Lumajang didukung oleh sumber daya manusia yang relatif stabil dan berdedikasi, baik pada sektor pendidikan, penyuluhan, pelayanan keagamaan, maupun

administrasi umum. Kehadiran para guru, penyuluh, penghulu, dan ASN lainnya menjadi fondasi penting dalam membangun layanan keagamaan dan pendidikan yang berkualitas.

2. Komitmen terhadap Moderasi Beragama

Moderasi beragama telah menjadi prinsip kerja utama dalam berbagai program Kementerian Agama, dan secara nyata telah diimplementasikan lintas agama di Kabupaten Lumajang. Indeks Kerukunan Umat Beragama di beberapa wilayah menunjukkan hasil yang menggembirakan dan menjadi indikator positif harmonisasi kehidupan sosial-keagamaan.

3. Kemitraan Strategis

Lintas Lembaga dan Tokoh Agama memiliki jaringan kemitraan yang kuat dengan berbagai tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, serta pemerintah daerah. Kolaborasi ini menjadi motor penggerak dalam menciptakan layanan yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

4. Pemanfaatan Teknologi Digital

Dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi telah dimulai dengan pemanfaatan SPBE, EMIS, SIMKEU, dan platform layanan publik lainnya. Langkah ini menjadi titik tolak transformasi digital layanan keagamaan dan pendidikan berbasis data.

5. Kualitas Pendidikan Keagamaan dan Madrasah yang Terus Meningkat

Potensi peningkatan kualitas pendidikan keagamaan dan madrasah di Kabupaten Lumajang kini semakin terbuka lebar seiring dengan masifnya digitalisasi tata kelola pembelajaran dan penguatan kompetensi tenaga pendidik secara berkelanjutan.

6. Capaian Progresif dari Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan seperti madrasah dan pesantren menunjukkan capaian yang progresif dalam hal akreditasi, pemenuhan SNP, dan penerapan kurikulum berbasis moderasi beragama. Ini memberikan optimisme terhadap daya saing lulusan di tingkat regional dan nasional.

1.2.2 Permasalahan yang Dihadapi

Meski demikian, terdapat sejumlah permasalahan dan tantangan strategis yang harus diantisipasi dan ditangani dalam periode 2025–2029. Permasalahan tersebut antara lain :

1. Transformasi Digital yang Belum Merata

Meskipun infrastruktur TIK telah tersedia, pemanfaatannya belum optimal di seluruh satuan kerja. Tingkat digitalisasi layanan, sistem informasi, dan pengarsipan masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara utuh.

2. Isu Kerukunan dan Potensi Intoleransi

Meskipun indeks kerukunan secara umum positif, dinamika politik identitas, intoleransi berbasis agama atau etnis, serta penyebaran informasi radikal di media sosial masih menjadi tantangan nyata yang perlu direspon secara sistematis, termasuk melalui peran strategis KUA sebagai pusat mitigasi konflik.

3. Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola yang Belum Merata

Belum semua satuan kerja mencapai nilai optimal dalam indikator SPIP, Zona Integritas, dan manajemen risiko. Di sisi lain, penyusunan perencanaan, Aplikasi SIPKA, dan pengelolaan keuangan belum seluruhnya memenuhi prinsip akuntabilitas dan tepat waktu.

4. Keterbatasan Kompetensi ASN dan Rendahnya Sertifikasi Teknis

Tingkat profesionalisme ASN dan guru belum merata, terutama dalam hal kepemilikan sertifikasi kompetensi, kemampuan TIK, serta kesiapan dalam menghadapi transformasi kebijakan berbasis kinerja dan pelayanan digital.

1.2.3. Analisis Lingkungan Strategis (SWOT)

Untuk mengambil kebijakan, terutama dalam menentukan kinerja lima tahun kedepan, maka perlu diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Selanjutnya dilakukan telaah dan analisis. Sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis SWOT, dengan tabel sebagai berikut :

1.2.3.1. Matrik SWOT

Tabel 5 :
Tabel SWOT Analisis

Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)
Ketersediaan SDM berdedikasi dan berpengalaman di bidang pendidikan, keagamaan, dan penyuluhan	Distribusi tenaga pendidik dan penyuluh belum merata, khususnya di wilayah 3T
Komitmen kelembagaan terhadap moderasi beragama, kerukunan, dan toleransi lintas iman	Masih terbatasnya jumlah ASN yang tersertifikasi kompetensi dan digital readiness
Tersedianya sistem digital awal seperti EMIS, SIMKEU, dan SPBE untuk mendukung perencanaan dan monitoring	Transformasi digital belum terintegrasi lintas unit dan masih minim pemanfaatan big data
Kemitraan aktif dengan tokoh agama, ormas, dan lembaga keagamaan lokal serta pemerintah daerah	Kurangnya koordinasi antar bidang dalam pengelolaan program terpadu
Peningkatan kualitas dan akreditasi satuan pendidikan keagamaan (madrasah/pesantren)	Beberapa satuan kerja belum memenuhi standar SPIP, Aplikasi SIPKA, dan reformasi birokrasi

Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
Dukungan strategis nasional terhadap transformasi digital layanan publik, RB tematik, dan SPBE	Meningkatnya intoleransi digital dan penyebaran paham radikal di media sosial
Potensi pendayagunaan dana zakat, wakaf, dan dana sosial keagamaan untuk pemberdayaan umat	Ketergantungan pada anggaran pusat dan fluktuasi kebijakan fiskal nasional
Animo masyarakat tinggi terhadap pendidikan madrasah, program keagamaan, dan sertifikasi pranikah	Polarisasi politik dan sentimen keagamaan menjelang tahun pemilu dan isu sosial
Sinergi multipihak (tokoh agama, ormas, lembaga pendidikan) dalam penguatan layanan berbasis komunitas	Krisis kepercayaan publik jika pelayanan tidak transparan, lambat, atau tidak merata
Tren digitalisasi pembelajaran dan penguatan pendidikan karakter melalui kurikulum moderasi beragama	Perubahan gaya hidup dan nilai generasi muda yang berpotensi menjauh dari nilai-nilai agama

1.2.3.1. Implikasi Strategis

Adapun implikasi dari perumusan tabel SWOT diatas, dapat diambil beberapa kesimpulan-kesimpulan kinerja yang perlu direkomendasikan untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang, sebagai berikut :

1. Kekuatan internal perlu dikuatkan melalui penguatan SDM dan adopsi teknologi digital secara merata untuk mendukung integrasi layanan lintas bidang.
2. Kelemahan seperti ketimpangan layanan dan koordinasi antarsatker harus ditangani melalui sistem berbasis data dan reformasi birokrasi menyeluruh.
3. Peluang seperti sinergi multipihak, pemanfaatan dana zakat/wakaf, dan momentum digitalisasi pendidikan perlu dimanfaatkan untuk membangun sistem layanan inklusif dan responsif.
4. Ancaman eksternal seperti intoleransi, radikalisme digital, dan krisis kepercayaan perlu diredam melalui program mitigasi sosial seperti penguatan peran KUA, PPID, dan penyuluh berbasis media.

1.2.3.2. Matriks Strategis Turunan SWOT (SO–ST–WO–WT)

Tabel 6 :
Tabel Strategis Turunan SWOT (SO–ST–WO–WT)

Jenis Strategi	Rencana Aksi Strategis	
SO (Strength- Opportunities)	1	Optimalisasi sistem digital SPBE dan EMIS untuk meningkatkan layanan berbasis data (dikaitkan dengan SDM unggul dan dukungan transformasi digital nasional).
	2	Kembangkan program kolaboratif lintas agama berbasis komunitas bersama tokoh agama dan ormas lokal.
	3	Dorong madrasah/pesantren unggul sebagai sentra pendidikan karakter dan moderasi beragama.
ST (Strength- Threats)	1	Perkuat peran KUA dan penyuluh dalam deteksi dini dan mitigasi konflik keagamaan berbasis EWS.
	2	Tingkatkan transparansi layanan publik dan pelaporan melalui PPID dan kanal digital terpercaya.
	3	Lakukan literasi digital keagamaan untuk menangkal narasi intoleran di media sosial.
WO (Weaknesses- Opportunities)	1	Percepat pemerataan distribusi guru/penyuluh ke wilayah 3T melalui kebijakan afirmatif berbasis data kebutuhan.
	2	Bangun dashboard monitoring ASN dan pelatihan digital untuk akselerasi kompetensi teknis.
	3	Sinergikan pemanfaatan zakat dan wakaf dengan layanan pendidikan dan sosial di daerah minim akses.
WT (Weaknesses- Threats)	1	Bangun sistem pengawasan internal berbasis SPIP yang kuat untuk mencegah disfungsi layanan.
	2	Kembangkan pelatihan berkelanjutan dan mentoring ASN terkait pelayanan publik responsif dan moderatif.
	3	Integrasikan pelaporan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagai early warning untuk krisis kepercayaan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Visi Dan Misi Kementerian Agama

Kementerian Agama Kabupaten Lumajang memiliki tugas melaksanakan pelayanan keagamaan dan pendidikan keagamaan serta pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat. Kementerian Agama Kabupaten Lumajang menjabarkan dan menyelaraskan visi nasional Kementerian Agama ke dalam arah pembangunan jangka menengah pada tingkat Kabupaten/Kota.

Adapun Visi Kementerian Agama Tahun 2025–2029 adalah:

"Terwujudnya Masyarakat yang Rukun, Maslahat, Dan Cerdas Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045."

Visi tersebut mencerminkan aspirasi bangsa untuk membangun kehidupan beragama yang harmonis, menghadirkan pelayanan keagamaan yang memberikan manfaat nyata, serta mencetak pendidikan keagamaan yang berkualitas sebagai penopang kemajuan. Kementerian Agama Kabupaten Lumajang memaknai visi ini sebagai dasar dalam memperkokoh kerukunan antarumat, meningkatkan layanan keagamaan yang inklusif dan berkeadilan, serta mendorong penyelenggaraan pendidikan yang religius, unggul, dan mampu bersaing secara global.



Terdapat tiga kata kunci didalam visi Kementerian Agama, yaitu Rukun, Maslahat dan Cerdas dengan pengertian sebagai berikut:

*Pertama, **Rukun***, dimana hal ini merupakan dasar dari kehidupan bermasyarakat yang harmonis di tengah keberagaman Indonesia. Rukun atau kerukunan berarti hubungan yang harmonis di antara berbagai kelompok masyarakat, termasuk antarumat beragama, antarsuku, dan antara masyarakat dengan pemerintah. Kerukunan tidak hanya berarti tidak adanya konflik, tetapi juga adanya kolaborasi aktif untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai negara dengan berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa, rukun menjadi kunci utama untuk menjaga persatuan. Rukun sendiri memiliki tiga dimensi, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Toleransi berarti sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam keyakinan, praktik keagamaan, kebebasan beribadah tanpa memaksakan pandangan pribadi kepada orang lain. Adapun kerjasama adalah kesediaan untuk melakukan aktifitas bersama dalam lingkup sosial, ekonomi, dalam ikatan atau bonding dalam komunitas, pemukiman ataupun lingkaran profesi, kesukaan terhadap hal tertentu. Keberagaman yang mengedepankan kerukunan adalah puncak, atau harmoni dalam membangun kebersamaan sebagai bangsa Indonesia dan berkontribusi terhadap pembangunan.

*Kedua, **Maslahat***, dalam konteks beragama adalah keberagaman yang relevan dengan kebutuhan zaman, tidak hanya bersifat ritualistik tetapi juga menyentuh aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Beragama maslahat adalah praktek keagamaan yang mengedepankan manfaat bagi pihak lain, orang lain dan lingkungan. Ajaran agama diharapkan mampu menjadi panduan untuk menciptakan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Beragama maslahat mencerminkan keberagaman yang memberikan manfaat dan membawa kebaikan, baik secara individu maupun kolektif, sehingga terbangun kesejahteraan bersama.

Ketiga, Cerdas, adalah istilah yang merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menganalisis, dan menerapkan informasi atau pengetahuan secara efektif dalam berbagai situasi. Visi cerdas adalah capaian kondisi masyarakat yang memiliki keandalan dari aspek mental, emosional, sosial, dan praktis yang memungkinkan individu-individu mampu beradaptasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang bijaksana. Pencapaian visi cerdas dilakukan Kementerian Agama melalui program pendidikan yang dikembangkan melalui sejumlah institusi pendidikan di seluruh Indonesia.

Visi ini mencerminkan cita-cita besar bangsa untuk mewujudkan kehidupan keagamaan yang harmonis, pelayanan keagamaan yang berdampak, dan pendidikan keagamaan yang unggul sebagai pilar kemajuan bangsa. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang memaknai visi ini sebagai landasan dalam penguatan kerukunan antar umat beragama, peningkatan pelayanan keagamaan yang inklusif dan adil, serta pengembangan pendidikan yang religius, berkualitas, dan berdaya saing global.

Misi Kementerian Agama :

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kementerian Agama menetapkan tiga misi utama yang akan menjadi arah pembangunan bidang keagamaan, pendidikan keagamaan dan tata kelola selama periode 2025-2029 :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan
2. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum dengan kekhasan agama, pesantren, dan pendidikan keagamaan
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Misi ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan visi besar Terwujudnya Masyarakat yang Rukun, Maslahat, dan Cerdas Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Misi ini dirancang untuk menjembatani gagasan besar visi ke dalam program kerja nyata yang dapat diimplementasikan secara berkesinambungan. Setiap misi mencerminkan upaya konkret untuk mendukung elemen dalam visi, yaitu menciptakan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan cerdas.

Misi pertama bertujuan untuk memperkuat harmoni dalam kehidupan beragama, yang sejalan dengan kata kunci rukun dalam visi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kehidupan beragama yang rukun adalah pondasi bagi terciptanya masyarakat yang harmonis, sementara orientasi pada kemaslahatan memastikan agama menjadi kekuatan positif yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui misi ini, masyarakat Indonesia diharapkan tidak hanya hidup rukun, tetapi juga memanfaatkan nilai-nilai agama untuk membangun kesejahteraan bersama. Dengan harmoni yang terjaga, masyarakat akan lebih siap menghadapi tantangan global dan berkontribusi pada cita-cita besar Indonesia Emas 2045.

Misi kedua mendukung kata kunci masyarakat Cerdas dalam visi. Melalui pendidikan yang berkualitas sebagai elemen penting dalam mencetak generasi yang tidak hanya memahami nilai-nilai agama tetapi juga memiliki kemampuan intelektual dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Pendidikan yang berkualitas, menjadikan masyarakat Indonesia memiliki kemampuan intelektual dan memiliki kesadaran moral yang tinggi. Generasi terdidik dan berdaya mendorong terciptanya ekosistem inovatif, harmoni dan bermaslahat, serta berkontribusi pada kemajuan bangsa.

Misi ketiga mencerminkan pentingnya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional untuk mendukung pencapaian visi. Tata kelola yang baik adalah prasyarat untuk memastikan keberhasilan implementasi program-program yang mendukung toleransi, kemaslahatan, dan kerukunan. Dengan tata kelola yang baik, kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintah meningkat, sehingga memudahkan terciptanya kolaborasi dalam mewujudkan masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas. Hal ini juga akan mempercepat langkah menuju Indonesia yang maju dan berdaya saing pada tahun 2045.

2.2. Tujuan Kementerian Agama

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang mendukung tujuan Kementerian Agama dan selaras dengan tujuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Kementerian Agama tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Perwujudan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan melalui peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa, dengan sasaran strategisnya yaitu meningkatnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial
2. Peningkatan kualitas umat beragama yang berdampak melalui pelayanan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji, dan pemberdayaan ekonomi yang merata, adil, dan inklusif berbasis ekoteologi dengan sasaran strategisnya yaitu meningkatkan layanan keagamaan transformatif
3. Peningkatan akses pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan, ramah, dan terjangkau dengan sasaran strategisnya yaitu meningkatnya pemerataan akses pendidikan
4. Peningkatan mutu dan lulusan lembaga pendidikan dan pesantren yang mandiri, unggul, dan berdaya saing dengan dua sasaran strategisnya yaitu meningkatnya hasil belajar Pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah serta meningkatnya pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas

5. Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital dengan sasaran strategisnya yaitu meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

Program dan Sasaran Program

A. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama

Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemahaman dan praktek keagamaan maslahat dalam mewujudkan kehidupan beragama yg rukun
2. Terwujudnya layanan keagamaan yang berkualitas, merata dan inklusif

B. Program Wajib Belajar 13 Tahun / Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun

Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah Islam

C. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pengajaran dan pembelajaran
2. Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, kompeten, dan merata
3. Meningkatnya kualitas kesesuaian pembelajaran bagi anak usia dini

D. Program Dukungan Manajemen

Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

1. Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel

Untuk memastikan implementasi yang terarah dan terukur, Kementerian Agama menetapkan **Asta Protas** atau **Delapan Program Prioritas Kemenag Berdampak** yang menjadi pengungkit strategis pencapaian sasaran pembangunan keagamaan dan pendidikan keagamaan dan tata kelola yaitu :

1. Kerukunan dan Cinta Kemanusiaan

Untuk memperkuat kerukunan dan menumbuhkan cinta kemanusiaan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang menterjemahkan rumusan strategi Kementerian Agama RI yang berorientasi pada kemaslahatan, penghormatan terhadap keberagaman, serta pembangunan budaya saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat, meliputi:

- a. Penguatan Deteksi Dini Konflik Keagamaan di Tingkat KUA
 - Optimalisasi Peran KUA Inklusif : Mengaktifkan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) di 21 kecamatan se-Kabupaten Lumajang sebagai pusat pemantauan dini (*early warning sistem*) terhadap potensi gesekan atau isu intoleransi di masyarakat.
 - Bimbingan Teknis Penyuluh Agama Terintegrasi : Melatih para Penyuluh Agama (PNS maupun Non-PNS) menjadi agen mediasi yang dibekali kemampuan literasi digital untuk menangkal berita bohong (*hoax*) dan ujaran kebencian bermuatan SARA di wilayah binaannya.
- b. Internalisasi "Kurikulum Cinta Kemanusiaan" di Lembaga Pendidikan
 - Penerapan Diklat Kurikulum Cinta : Mengikutsertakan guru madrasah (MI, MTs, MA) dan guru Pendidikan Agama (Pendidikan Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu) di Lumajang dalam pelatihan pengelolaan kelas berbasis nilai kemanusiaan dan penghargaan terhadap perbedaan.

- Madrasah dan Sekolah Ramah Anak: Memastikan tidak ada praktik perundungan (*bullying*) serta menumbuhkan ekosistem belajar yang inklusif, toleran, dan menghargai keberagaman budaya lokal masyarakat lereng Gunung Semeru.

c. Aktivasi Rumah Ibadah Sebagai Pusat Kesejukan dan Sosial

- Pemberdayaan Rumah Ibadah Lintas Agama : Mendorong fungsi masjid, gereja, pura, dan vihara di Lumajang bukan hanya sebagai tempat ritual ibadah, melainkan juga ruang dialog lintas iman dan pusat gerakan aksi sosial kemanusiaan (seperti posko tanggap bencana alam bersama).
- Pemeliharaan Harmoni Rumah Ibadah : Memfasilitasi asistensi regulasi pendirian dan operasional rumah ibadah secara dialogis demi mencegah konflik horizontal di tingkat desa.

d. Penguatan Dialog Aktif Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

- Safari Kerukunan dan Silaturahmi Tokoh Agama : Menyelenggarakan forum dialog berkala yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan (NU, Muhammadiyah, dll), serta perwakilan pemuda lintas iman (Pemuda Pemudi Lintas Agama/Pelita) guna merajut kebersamaan secara konsisten.
- Penyusunan Peta Kerukunan Daerah : Menyusun pemetaan wilayah rawan gesekan pemahaman keagamaan secara berkala bersama instansi terkait untuk menjaga stabilitas daerah.

2. Ekoteologi

Ekoteologi merupakan cara pandang iman yang melihat seluruh ciptaan sebagai suci dan saling terhubung dalam jaringan kehidupan. Penerapan penyelarasan program prioritas ini

dilaksanakan di lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang dengan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Program Gerakan Madrasah Hijau (Eco-Madrasah)

- Kurikulum Berbasis Edukasi Lingkungan : Mengintegrasikan nilai-nilai pelestarian alam ke dalam mata pelajaran rumpun Pendidikan Agama Islam (PAI) dan memanfaatkan khazanah ayat-ayat semesta (ayat kauniyah) dalam proses pembelajaran di Raudhatul Athfal (RA), MI, MTs, dan MA.
- Aksi Adiwiyata Madrasah : Menyelenggarakan kompetensi madrasah sehat dan hijau dengan fokus pada pengelolaan sampah mandiri (bank sampah madrasah), penghijauan halaman sekolah, penghematan energi, serta pengurangan penggunaan plastik sekali pakai (zero plastic campaign) di lingkungan kantin sekolah.

b. Gerakan Pesantren Berdaya Lingkungan (Eco-Pesantren)

- Fiqih Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah) : Mendorong pondok-pondok pesantren di Lumajang untuk mengkaji dan menyosialisasikan kitab-kitab atau literatur keagamaan yang membahas tentang konservasi alam, kebersihan, dan larangan merusak bumi.
- Pengelolaan Sanitasi dan Budidaya Ramah Lingkungan : Memberikan pendampingan bagi pesantren dalam mengelola limbah domestik, pembuatan kompos dari sampah organik, serta pemanfaatan lahan kosong pesantren untuk ketahanan pangan (seperti hidroponik atau perikanan air tawar).

c. Kampanye "Satu Calon Pengantin, Satu Pohon" (Satin Sapon) di KUA

- Pohon Kelestarian Rumah Tangga : Mewajibkan atau mengimbau setiap pasangan calon pengantin (catin) yang mendaftar di 21 Kantor Urusan Agama (KUA) se-

Kabupaten Lumajang untuk menyumbangkan atau menanam satu bibit pohon produktif (seperti pohon buah atau pohon pelindung) sebelum hari pernikahan.

- Bimbingan Perkawinan Berwawasan Ekologis : Memasukkan materi kepedulian lingkungan ke dalam konseling atau Bimbingan Perkawinan (Bimwin), sebagai wujud tanggung jawab sosial keluarga baru dalam menjaga kelestarian bumi Lumajang untuk generasi mendatang.

d. Aktivasi Rumah Ibadah Ramah Lingkungan (Eco-Masjid & Rumah Ibadah Hijau)

- Gerakan Hemat Air Wudhu : Mengedukasi pengurus takmir masjid dan rumah ibadah lintas agama untuk menerapkan sistem efisiensi penggunaan air bersih
- Mimbar Ekoteologi : Memanfaatkan khutbah Jumat, kuliah subuh, atau mimbar kerohanian agama-agama lain secara berkala untuk menyampaikan pesan-pesan moral tentang kewajiban manusia sebagai khalifah di muka bumi yang dilarang melakukan perusakan alam.

e. Khidmat Kemanusiaan: Sabuk Hijau Semeru dan Mitigasi Berbasis Iman

- Aksi Reboisasi Lintas Iman : Menggerakkan Penyuluh Agama dan ASN Kemenag untuk melakukan penanaman pohon bersama di kawasan rawan longsor atau daerah aliran sungai (DAS) di sekitar lereng Gunung Semeru.
- Sosialisasi Teologi Kebencanaan : Memberikan pemahaman keagamaan yang proporsional kepada masyarakat terdampak bencana bahwa menjaga alam adalah bagian dari ibadah, sehingga mitigasi bencana (seperti menanam pohon penahan erosi) dinilai sebagai amal jariyah.

3. Layanan Keagamaan Berdampak

Layanan Keagamaan Berdampak dimaksudkan bahwa program dan kegiatan atau aktivitas yang dijalankan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang, berdasarkan nilai keagamaan, diharapkan dapat berhasil memberikan nilai kontribusi positif yang nyata,

konkret, dan bermanfaat luas bagi hidup masyarakat (baik material, spiritual, dan mental) serta menjaga kemaslahatan umum, terutama di Lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang

Untuk melaksanakan program prioritas tersebut, dibutuhkan langkah-langkah untuk mewujudkan sebagai berikut :

a. Jemput Bola Layanan Sertifikasi Halal (Halal On The Spot)

- Akselerasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM : Menggerakkan Satgas Halal Kemenag Lumajang bersama para Pendamping Proses Produk Halal (P3H) untuk turun langsung ke pasar tradisional, sentra industri kerajinan, dan pelaku usaha mikro di desa-desa guna memfasilitasi penerbitan sertifikat halal gratis (Self Declare).
- Edukasi Sadar Halal Kuliner Lumajang : Memberikan pendampingan intensif bagi paguyuban pedagang makanan, jajanan sekolah, dan pusat oleh-oleh khas Lumajang agar memiliki daya saing ekonomi dan memberikan rasa aman bagi konsumen.

b. Digitalisasi dan Integrasi Layanan KUA Berbasis Kebutuhan (Smart KUA)

- Bimwin Efektif dan Pusaka Sakinah : Optimalisasi program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang diintegrasikan dengan pemantauan kesehatan reproduksi calon pengantin bekerja sama dengan Dinkes/Puskesmas setempat guna menekan angka stunting di Kabupaten Lumajang.
- Layanan Cetak Kartu Nikah Digital Kilat : Memastikan setelah prosesi akad nikah selesai, pasangan pengantin langsung menerima dokumen administrasi kependudukan lengkap (KTP baru, KK baru bekerja sama dengan Dispendukcapil) serta kartu nikah digital saat itu juga di lokasi.

c. Optimalisasi Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (Ziswaf) untuk Pengentasan Kemiskinan

- Sinergi Kemenag, Baznas, dan LAZ : Mengoordinasikan program pendayagunaan zakat produktif untuk membiayai modal usaha umat, beasiswa pendidikan bagi anak kurang mampu di madrasah, serta bantuan logistik darurat bagi warga miskin ekstrem di Lumajang.
- Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf : Melakukan kerja sama proaktif dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lumajang untuk memfasilitasi sertifikasi tanah-tanah wakaf masjid, mushala, dan pemakaman agar memiliki kepastian hukum dan terhindar dari sengketa di kemudian hari.

d. Layanan Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Solusi Konflik

- Klinik Konsultasi Keagamaan Multikultural : Membuka ruang konseling dan edukasi di Kantor Kemenag maupun KUA bagi masyarakat yang membutuhkan kejelasan hukum keagamaan atau penyelesaian gesekan paham keagamaan secara persuasif, inklusif, dan damai tanpa memicu disintegrasi sosial.

4. Pendidikan Unggul, Ramah, dan Terintegrasi

Untuk mewujudkan pendidikan unggul, ramah dan terintegrasi dilaksanakan kegiatan dan aktivitas sebagai berikut :

a. Mewujudkan "Pendidikan Unggul" Berdaya Saing Global

- Akselerasi Madrasah SKS dan Kelas Digital : Mendorong madrasah-madrasah binaan (MI, MTs, MA) di Lumajang untuk menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) bagi siswa cerdas istimewa berbakat, serta memfasilitasi pembentukan kelas digital (*smart classroom*) berbasis IoT (*Internet of Things*).

- Bootcamp Kompetensi Sains dan Literasi : Menyelenggarakan pelatihan intensif dan terprogram (seperti klinik kompetensi sains) untuk mempersiapkan siswa-siswi madrasah Lumajang menghadapi kompetisi bergengsi seperti Kompetisi Sains Madrasah (KSM), Olimpiade Sains Nasional (OSN), dan ajang riset internasional.
 - Peningkatan Kualifikasi dan Sertifikasi Guru : Memfasilitasi program beasiswa, diklat metodologi pembelajaran abad ke-21, serta sertifikasi kompetensi keahlian bagi guru madrasah dan guru Pendidikan Agama (lintas agama) secara berkala.
- b. Menciptakan Lingkungan "Pendidikan Ramah" (Inklusif & Aman)
- Gerakan Madrasah Ramah Anak (MRA) Bebas Perundungan : Mewajibkan seluruh madrasah dan satuan pendidikan keagamaan di Lumajang untuk mendeklarasikan dan menerapkan pakta integritas anti-perundungan (*zero-bullying*), anti-kekerasan seksual, dan anti-intoleransi.
 - Pembentukan Posko Layanan Konseling Pemuda (*Peer-Counseling*) : Membentuk ruang pengaduan dan konseling yang ramah anak di setiap madrasah, yang dikelola oleh kolaborasi antara guru Bimbingan Konseling (BK) dengan duta siswa, guna mendeteksi dini masalah kesehatan mental siswa.
 - Akselerasi Madrasah Inklusi : Menyediakan sarana dan melatih tenaga pendidik khusus di beberapa madrasah percontohan di Lumajang untuk mampu menerima dan melayani siswa berkebutuhan khusus (difabel) dengan pendekatan yang setara.
- c. Membangun Sistem "Pendidikan Terintegrasi" Berbasis Data
- Sinergi Sistem EMIS dengan Aplikasi Manajemen Lokal : Mengintegrasikan basis data *Education Management Information Sistem* (EMIS) dengan aplikasi pemantauan kinerja guru dan perkembangan siswa di tingkat Kabupaten Lumajang demi transparansi dan kecepatan pengambilan kebijakan.

- Program *Madrasah-Pesantren Link* : Mengintegrasikan kurikulum madrasah formal yang berada di bawah naungan pondok pesantren di Lumajang dengan kurikulum kajian keagamaan khas pesantren (kitab kuning), sehingga capaian akademik umum dan pendalaman agama berjalan beriringan tanpa tumpang tindih beban belajar siswa.
- Integrasi Pendidikan Karakter Lintas Sektoral : Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Lumajang (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan BNN) untuk mengintegrasikan edukasi kesehatan remaja, pencegahan pernikahan dini, penyuluhan anti-narkoba, dan wawasan kebangsaan langsung ke dalam kegiatan ekstrakurikuler terpadu.

5. Pesantren Berdaya

Pesantren Berdaya di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang difokuskan pada penguatan kemandirian pondok pesantren, baik dari segi tata kelola kelembagaan, mutu pendidikan, maupun pemberdayaan ekonomi. Mengingat Lumajang memiliki basis pesantren yang sangat kuat, gerakan ini strategis untuk mentransformasikan pesantren menjadi pusat kemajuan umat yang mandiri dan berdaya saing.

Pesantren Berdaya diwujudkan sebagai berikut :

a. Akselerasi Kemandirian Ekonomi Pesantren (*Eco-Pesantren Business*)

- Inkubasi Bisnis dan BUM-Pes (Badan Usaha Milik Pesantren) : Memberikan pendampingan intensif bagi pesantren di Lumajang untuk mendirikan dan mengelola unit usaha, seperti toko ritel (HeBit/HeArt), pertanian organik, peternakan, hingga produk olahan makanan khas lereng Gunung Semeru.
- Sinergi Program *One Pesantren One Product* (OPOP) : Memfasilitasi perluasan akses pasar, digitalisasi pemasaran (e-commerce), dan kemitraan dengan jejaring

bisnis lokal maupun nasional agar produk buatan santri Lumajang memiliki nilai jual tinggi.

- Klinik Sertifikasi Produk Pesantren : Menyelenggarakan fasilitasi gratis dan kilat untuk pengurusan izin edar, seperti P-IRT, BPOM, dan Sertifikasi Halal bagi seluruh produk olahan yang dihasilkan oleh unit usaha pesantren.

b. Peningkatan Mutu Akademik dan Penjaminan Mutu Kelembagaan

- Fasilitasi Akreditasi Majelis Masyayikh : Mendampingi Pendidikan Pesantren Muadalah (PPM) dan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) di Lumajang dalam memenuhi instrumen penjaminan mutu yang ditetapkan oleh Majelis Masyayikh guna penyetaraan ijazah santri.
- Digitalisasi Data Pesantren terintegrasi EMIS : Melakukan jemput bola pemutakhiran data Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) dan integrasi data santri ke dalam sistem EMIS untuk memastikan ketepatan sasaran bantuan, beasiswa, dan program pemerintah.
- Pelatihan Manajemen Organisasi Kebencanaan : Mengingat letak geografis Lumajang, Kemenag membekali tata usaha dan pengurus pesantren dengan manajemen tata kelola logistik dan posko tanggap bencana berbasis pesantren.

c. Pengembangan Riset, Kreativitas, dan Literasi Santri (*Santri Inovatif*)

- Penyelenggaraan Musabaqah Qira'atil Kutub (MQK) dan Karya Tulis Ilmiah : Menyelenggarakan kompetisi rutin membaca kitab kuning serta merangsang budaya riset santri dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer (Fikih Kontemporer) berbasis kearifan lokal.
- Program *Santri Digitalpreneur* : Melatih para santri di bidang teknologi informasi, seperti pembuatan konten kreatif penyejuk umat, desain grafis, coding, hingga

manajemen media sosial pondok pesantren demi menangkal narasi radikalisme di dunia maya.

d. Peningkatan Kesejahteraan, Kualifikasi, dan Sertifikasi Keahlian

- Program Beasiswa Guru Madin dan Pengajar Pesantren : Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait untuk memfasilitasi beasiswa peningkatan kualifikasi akademik (S1/S2) bagi para ustadz/ustadzah pesantren.
- Sertifikasi Kompetensi Terapan bagi Santri : Bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di pesantren untuk memberikan sertifikasi keahlian agar santri memiliki bekal wirausaha yang kuat saat lulus (*output mandiri*).

e. Optimalisasi Poskespes (Pos Kesehatan Pesantren) dan Pesantren Sehat

- Revitalisasi Poskespes Lintas Sektoral : Bersinergi dengan Dinas Kesehatan Lumajang dan Puskesmas setempat untuk mengaktifkan kembali kader kesehatan santri (*santri husada*) guna mempromosikan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) di lingkungan asrama.
- Penyuluhan Gizi dan Kesehatan Mental Santri : Menyelenggarakan forum edukasi berkala mengenai pemenuhan gizi seimbang untuk mencegah stunting, serta ruang konseling sebaya guna menjaga kesehatan mental remaja di lingkungan pesantren.

6. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Implementasi program prioritas ini difokuskan pada optimalisasi pilar-pilar ekonomi Islam, penguatan kapasitas pelaku usaha ultra mikro/mikro, serta penciptaan ekosistem ekonomi yang mandiri dan berdaya saing di tingkat lokal.

Untuk melaksanakan program prioritas Pemberdayaan Ekonomi Umat, dibutuhkan Langkah-langkah untuk mewujudkan sebagai berikut :

a. Transformasi Kampung Zakat dan Pemberdayaan Zakat Produktif

- Akselerasi Program Kampung Zakat Terpadu : Mereplikasi dan mengembangkan model "Kampung Zakat" di wilayah kantong kemiskinan atau daerah terdampak bencana di Lumajang, dengan menyalurkan zakat dalam bentuk modal usaha, bukan sekadar bantuan konsumtif.
- Inkubasi Usaha Mustahik (Penerima Zakat) : Bekerja sama dengan Baznas Lumajang dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi untuk memberikan pendampingan teknis, pelatihan pembukuan keuangan sederhana, dan hibah alat produksi bagi mustahik agar mampu mandiri hingga naik kelas menjadi muzakki (pemberi zakat).

b. Optimalisasi Pendayagunaan Wakaf Produktif

- Gerakan Wakaf Uang ASN Kemenag : Menginisiasi gerakan wakaf uang secara berkala di kalangan internal ASN Kemenag Lumajang, di mana dana yang terkumpul dikelola secara produktif (misalnya diinvestasikan pada instrumen syariah atau modal usaha umat) yang keuntungannya disalurkan untuk kemaslahatan sosial.
- Pemberdayaan Aset Wakaf Terbengkalai : Mengidentifikasi dan memetakan tanah wakaf potensial di Lumajang yang belum terkelola dengan baik, lalu memfasilitasi kemitraan dengan pihak ketiga atau kelompok masyarakat untuk mengembangkannya menjadi aset produktif, seperti minimarket syariah, lahan pertanian terpadu, atau ruang usaha UMKM.

c. Penguatan Ekosistem Halal Value Chain bagi UMKM Lokal

- Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis Mandiri (Self-Declare) : Mengarahkan secara masif para Penyuluh Agama selaku Pendamping Proses Produk Halal (P3H) untuk mendampingi pelaku usaha jajanan, warung makan, dan produk olahan rumahan

khas Lumajang (seperti keripik pisang, olahan susu senduro, dll) hingga mendapatkan sertifikat halal.

- Zonasi Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS) : Berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk menginisiasi dan menetapkan kawasan sentra kuliner atau kantin sekolah/madrasah sebagai Zona KHAS guna meningkatkan kepercayaan konsumen dan nilai jual produk.

d. Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah Berbasis Komunitas

- Edukasi Literasi Keuangan Syariah : Menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi mengenai inklusi keuangan syariah, bahaya riba, serta jeratan pinjaman online (pinjol) ilegal kepada kelompok pengajian, penyuluh agama, dan masyarakat umum di tingkat kecamatan.
- Revitalisasi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) berbasis Ormas/Pesantren : Memberikan asistensi pembentukan dan tata kelola koperasi syariah atau BMT di lingkungan pondok pesantren dan organisasi keagamaan di Lumajang untuk mempermudah akses pembiayaan modal usaha bagi pedagang kecil.

e. Penguatan Kemandirian Ekonomi Keluarga melalui KUA

- Edukasi Pemberdayaan Ekonomi pada Bimbingan Perkawinan (Bimwin) : Memasukkan materi ketahanan ekonomi keluarga ke dalam silabus Bimwin bagi calon pengantin. Kemenag membekali pemahaman tentang perencanaan keuangan dasar dan peluang usaha rumah tangga untuk mencegah perceraian yang dipicu oleh faktor ekonomi.
- Pemberdayaan Ekonomi Penyuluh Agama Berdaya : Mendorong para penyuluh agama untuk menjadi pelopor pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE) di wilayah binaan masing-masing, memanfaatkan potensi komoditas pertanian atau kerajinan lokal Lumajang.

7. Pemberdayaan Rumah Ibadah

Memfokuskan pada transformasi fungsi rumah ibadah agar tidak hanya menjadi tempat ritual keagamaan semata (*mahdlah*), melainkan juga menjadi pusat peradaban, penguatan ekonomi umat, edukasi, serta perekat sosial di tengah masyarakat Lumajang yang multikultural.

Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Program *Eco-Masjid* dan Rumah Ibadah Ramah Lingkungan
 - Gerakan Konservasi Air Wudhu/Bersih : Membina takmir masjid dan pengelola rumah ibadah lintas agama di Lumajang untuk menerapkan sistem efisiensi air, seperti penggunaan keran otomatis dan pemanfaatan daur ulang air bekas wudhu untuk penyiraman taman atau budidaya perikanan.
 - Manajemen Sampah Mandiri dan Penghijauan : Mendorong gerakan rumah ibadah bebas sampah plastik (*zero plastic*) dan pembuatan lubang biopori atau sumur resapan di sekitar pekarangan rumah ibadah, khususnya di wilayah rawan genangan dan lereng Semeru.
- b. Standardisasi Manajemen Tata Kelola (Idarah, Imarah, dan Ri'ayah)
 - Bimtek Manajemen Rumah Ibadah Modern : Menyelenggarakan pelatihan berkala bagi para takmir masjid, pengurus gereja, pura, dan vihara mengenai tata kelola keuangan yang transparan berbasis digital, perawatan fisik bangunan, serta penyusunan program kerja yang inklusif.
 - Akselerasi Digitalisasi Data dan Moderasi Masjid (SIMAS) : Melakukan jemput bola pendaftaran dan pemutakhiran data rumah ibadah ke dalam Aplikasi SIMAS (Sistem Informasi Masjid) guna mempermudah akses pembinaan, bantuan pemerintah, serta memastikan khutbah/ceramah di rumah ibadah mengusung narasi kesejukan dan moderasi beragama.

c. Pemberdayaan Rumah Ibadah Ramah Anak, Lansia, dan Difabel

- Sertifikasi Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) : Mendampingi rumah ibadah di Lumajang untuk menyediakan fasilitas yang aman bagi anak-anak, seperti ruang laktasi, pojok baca (literasi), serta metode pembinaan keagamaan yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan.
- Penyediaan Fasilitas Aksesibel : Mengimbuu dan memfasilitasi pembuatan sarana penunjang bagi jamaah lansia dan penyandang disabilitas (difabel), seperti jalur bidang miring (*ramp*), pegangan tangan, dan area tempat duduk/shalat khusus.

d. Aktivasi Rumah Ibadah sebagai Sentra Ekonomi dan Sosial Masyarakat

- Pembentukan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Rumah Ibadah : Memfasilitasi berdirinya unit usaha seperti Koperasi Syariah Masjid, Toko Umat, atau Baitul Maal di tingkat rumah ibadah untuk membantu permodalan jamaah/warga sekitar yang kurang mampu guna memutus mata rantai rentenir.
- Optimalisasi Lumbung Sosial Rumah Ibadah : Menjadikan rumah ibadah lintas agama di Lumajang sebagai posko kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas yang menyediakan pemetaan logistik darurat, ruang trauma healing, dan pusat dapur umum saat terjadi dinamika kebencanaan alam.

e. Penguatan Fungsi Rumah Ibadah sebagai Pusat Kerukunan dan Multikultural

- Dialog Lintas Takmir/Pengelola Rumah Ibadah : Menginisiasi forum silaturahmi antarpengelola rumah ibadah yang berdekatan atau berada dalam satu wilayah guna menjaga toleransi, mencegah gesekan pendirian tempat ibadah, serta bergotong-royong dalam aksi kemanusiaan di Kabupaten Lumajang.

8. Digitalisasi Tata Kelola

Digitalisasi Tata Kelola di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang berfokus pada transformasi birokrasi konvensional menuju tata kelola pemerintahan digital yang lincah, transparan, dan terintegrasi (*E-Government*). Langkah ini bertujuan memangkas birokrasi, mempercepat layanan publik keagamaan, serta memastikan pengambilan kebijakan didasarkan pada data yang akurat.

Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Optimalisasi dan Penguatan Sistem Ekosistem Aplikasi SAKTI
 - Penguatan Modul Penganggaran dan Pelaporan Keuangan (Satker BLU/Instansi) : Melakukan bimbingan teknis (*bimtek*) dan simulasi berkala penataan kode akun berbasis Bagan Akun Standar (BAS) pada aplikasi SAKTI untuk meminimalisir kesalahan input Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada subkomponen program kerja.
 - Integrasi Pelaporan Kinerja Berbasis Digital : Memastikan pencairan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan daerah berjalan selaras (*linear*) dengan target capaian indikator kinerja utama yang tercatat di dalam sistem aplikasi keuangan negara.
- b. Digitalisasi Layanan Persuratan dan Kearsipan Melalui Aplikasi Pusaka dan SRIKANDI
 - Penerapan *Paperless Office* Terpadu : Mengakselerasi penggunaan aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) di seluruh unit kerja Kemenag Lumajang, mulai dari subbagian tata usaha hingga tingkat KUA kecamatan, untuk proses disposisi, tanda tangan elektronik (TTE), dan pelacakan surat secara riil.

- Satu Aplikasi Layanan Keagamaan (Pusaka Superapps) : Menyosialisasikan dan mewajibkan seluruh aparaturnya untuk memandu masyarakat dalam memanfaatkan Aplikasi Pusaka guna mengakses pendaftaran haji, pencarian info nikah, sertifikasi halal, hingga pengajuan bantuan rumah ibadah.
- c. Pemutakhiran Data Pendidikan dan Kelembagaan Berbasis Sistem EMIS dan SIMAS
 - Jemput Bola Pemutakhiran EMIS 4.0 : Menyelenggarakan *coaching clinic* berkala bagi operator madrasah dan pondok pesantren di Lumajang untuk menjamin validitas data siswa, santri, serta aset lembaga pendidikan guna menghindari keterlambatan penyaluran BOS atau bantuan kuota.
 - Akselerasi Pemetaan Digital SIMAS (Sistem Informasi Masjid) : Mengintegrasikan data geospasial rumah ibadah di Lumajang ke dalam SIMAS, sehingga seluruh masjid dan mushala memiliki ID unik yang memudahkan verifikasi bantuan serta mitigasi konflik keagamaan secara digital.
- d. Transformasi Layanan Kepegawaian dan Evaluasi Kinerja (Simpeg & E-Kinerja)
 - Pemeliharaan Data Mandiri pada SIMPEG 5 : Mewajibkan seluruh ASN Kemenag Lumajang untuk memperbarui portofolio kepegawaian, riwayat diklat, dan capaian kompetensi secara mandiri demi mendukung sistem merit dalam promosi jabatan.
 - Digitalisasi Penilaian Kinerja Harian : Memanfaatkan platform E-Kinerja yang terintegrasi dengan BKN untuk mengukur produktivitas pegawai secara harian, sehingga tunjangan kinerja dibayarkan berbasis capaian riil, objektif, dan transparan.
- e. Penguatan Infrastruktur Pusat Layanan Keagamaan Terpadu Digital
 - Penyediaan Pojok Digital di kantor dan KUA : Membangun fasilitas komputer mandiri kiosk (*self-service*) di kantor serta KUA kecamatan agar masyarakat lereng

Semeru yang memiliki keterbatasan gawai tetap dapat mengakses layanan digital Kemenag.

- Sistem Layanan Pengaduan Online (*Kemenag Lumajang Care*) : Mengoptimalkan kanal media sosial, WhatsApp resmi Broadcaster, dan website sebagai sarana pengaduan publik yang responsif (maksimal 1x24 jam tanggapan) demi mendukung komitmen pembangunan Zona Integritas (ZI).

2.3. Sasaran Kegiatan

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Agama sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025–2029, serta mendukung pelaksanaan Asta Program Prioritas Kemenag Berdampak dan program prioritas, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang menetapkan serangkaian sasaran kegiatan yang selaras dan terintegrasi dengan sasaran strategis dan sasaran program yang telah ditetapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Agama.

Sasaran kegiatan yang ingin dicapai oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang merupakan turunan dari sasaran kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Agama Republik Indonesia, yang secara hierarkis dijabarkan lebih lanjut pada level kabupaten untuk memastikan keterpaduan perencanaan, konsistensi pelaksanaan, serta efektivitas pencapaian tujuan nasional bidang keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh aktivitas yang dilaksanakan di daerah memiliki keterikatan strategis dengan arah kebijakan nasional.

Pada dasarnya ada tiga bidang kategori penggolongan Sasaran Kegiatan dan Indikatornya, yakni Bidang Agama, Bidang Pendidikan dan Bidang Tata Kelola. Kegiatan-kegiatan beserta sasaran kegiatan-sasaran kegiatan dan indikator-indikator sasaran kegiatan masing-masing

Unit Organisasi di Unit Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang, dengan rujukan/dasar dari SK dan IKS-K dari Eselon-2 :

1. Sekretariat Jendral : Bagian Tata Usaha
2. Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam : Bidang Urusan Agama Islam
3. Ditjen Pendidikan Islam : Bidang Pendidikan Madrasah
4. Ditjen Pendidikan Islam : Bidang Pendidikan Pondok Pesantren
5. Ditjen Pendidikan Islam : Bidang Pendidikan Agama Islam

Adapun Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :

A. Sasaran Kegiatan Bidang Agama

Ada sembilan Sasaran Kegiatan Bidang Agama, sebagai berikut :

1. Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama, dengan Indikator Kinerja Kegiatan :
 - a. Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS
 - b. Persentase peningkatan audiens MTQ/ PESPARAWI/ PESPERANI/ UTSAWA DHARMA GITA/ SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA
 - c. Persentase peningkatan peserta event seni budaya
 - d. Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan
2. Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak, dengan Indikator Kinerja Kegiatan :
 - a. Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)
 - b. Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama

- c. Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi
- d. Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah
- e. Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan
- f. Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat
- g. Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan
- h. Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan
- i. Persentase calon pengantin yang mendapatkan Bimbingan Perkawinan Agama Islam
- j. Persentase KUA Berdaya (Excelent)
- k. Persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana
- l. Persentase peningkatan jumlah peristiwa nikah
- m. Persentase penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi
- 3. Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji, dengan Indikator Kinerja Kegiatan :
 - a. Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota
- 4. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji, dengan Indikator Kinerja Kegiatan:
 - a. Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan
 - b. Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan umrah terpadu
- 5. Meningkatnya kualitas pelayanan Jemaah haji, dengan Indikator Kinerja Kegiatan :
 - a. Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar

6. Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji, dengan Indikator Kinerja Kegiatan:
 - a. Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75
 - b. Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji
7. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah, dengan Indikator Kinerja Kegiatan :
 - a. Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A), dengan Indikator Kinerja Kegiatan : Lembaga penyelenggara haji khusus dan Lembaga penyelenggara umrah
8. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Ziswaf, dengan Indikator Kinerja Kegiatan :
 - a. Persentase jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan Islam terintegrasi basis data terpadu nasional
 - b. Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan
 - c. Persentase advokasi pengamanan Harta Benda Wakaf (mutasi, sengketa) yang ditindaklanjuti
 - d. Persentase harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan produktif
9. Meningkatnya kualitas layanan dan profesionalitas lembaga ziswaf, dengan Indikator Kinerja Kegiatan :
 - a. Persentase Lembaga dana sosial keagamaan/Zakat yang diawasi sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan professional
 - b. Persentase Lembaga Wakaf yang diawasi sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan professional
 - c. Persentase lembaga Zakat dan Wakaf yang dibina
 - d. Persentase layanan izin pembentukan lembaga amil zakat dan wakaf
 - e. Persentase Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan

B. Sasaran Kegiatan Bidang Pendidikan Dasar Menengah

1. Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan, dengan Indikator Kinerja Kegiatan :
 - a. Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik
2. Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas, dengan Indikator Kinerja Kegiatan :
 - a. Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif
 - b. Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana
 - c. Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren
 - d. Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha)
 - e. Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah
 - f. Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren
3. Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan, dengan Indikator Kinerja Kegiatan :

- a. Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: 1). Literasi Membaca 2). Numerasi
 - b. Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran
 - c. Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler
 - d. Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)
 - e. Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan
 - f. Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B
 - g. Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara
 - h. Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual
 - i. Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional
 - j. Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran
4. Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan, dengan Indikator Kinerja Kegiatan :
- a. Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik
 - b. Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik
 - c. Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil
 - d. Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil

- e. Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik
- f. Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil
- g. Persentase guru yang meningkat jenjang karir
- h. Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir
- i. Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)
- j. Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan

C. Sasaran Kegiatan Bidang Tata Kelola

1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran, dengan Indikator Kinerja Kegiatan :
 - a. Nilai Kinerja Anggaran
2. Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi, dengan Indikator Kinerja Kegiatan :
 - a. Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar
 - b. Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75
3. Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN, dengan Indikator Kinerja Kegiatan :
 - a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
 - b. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
 - c. Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu
 - d. Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK). (SE 6 Setjen tahun 2025, dari 492 yang ditunjuk 137, untuk kanwil 3 satker: setjen, bima, pendis)
 - e. Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu

4. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai), dengan Indikator Kinerja Kegiatan :
 - a. Indeks Profesionalisme ASN
 - b. Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan
 - c. Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif
5. Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum, dengan Indikator Kinerja Kegiatan:
 - a. Persentase kasus hukum yang terselesaikan
6. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa, dengan Indikator Kinerja Kegiatan :
 - a. Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses
 - b. Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap
7. Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi, dengan Indikator Kinerja Kegiatan :
 - a. Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID
 - b. Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi
8. Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi, dengan Indikator Kinerja Kegiatan :
 - a. Indeks Pembangunan Statistik
 - b. Persentase data statistik yang dipublikasi
9. Meningkatnya layanan prima bidang pendidikan, dengan Indikator Kinerja Kegiatan :
 - a. Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output
 - b. Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama
 - c. Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media

- d. Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program / kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media
- e. Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK
- f. Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra
- g. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

2.4. Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN)

1. Pengertian :

Manajemen Risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, menangani, dan memantau risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

2. Dasar Hukum

- a. PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)
- b. Permen PAN-RB No. 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- c. Peraturan BPKP tentang Pedoman Manajemen Risiko Sektor Publik
- d. KMA No. 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah (kaitannya dengan tata kelola pendidikan)
- e. Roadmap Reformasi Birokrasi Kemenag (mengacu pada PermenPAN-RB No. 25 Tahun 2020)

3. Tujuan Dan Prinsip Manajemen Risiko Di Kementerian Agama

- a. Tujuan
 - 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program keagamaan dan pendidikan

- 2) Menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
- 3) Meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan Kemenag
- 4) Mengurangi kemungkinan kegagalan program/kegiatan
- 5) Mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko oleh pimpinan

b. Prinsip

- 1) Terintegrasi dengan perencanaan dan pengendalian program Kemenag
- 2) Terstruktur dan menyeluruh di semua unit kerja
- 3) Berdasarkan data dan informasi terbaik
- 4) Disesuaikan dengan konteks tugas Kemenag (haji, pendidikan, layanan umat, bimas)
- 5) Bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan regulasi & kebutuhan umat

MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL (MRPN)
RENSTRA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2025 – 2029

No	Sasaran	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
Bidang Agama				
SK.01	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	1 Munculnya pihak-pihak yang kurang / tidak menjamin adanya jaminan beragama terhadap event / peristiwa di Masyarakat. 2 Tidak adanya Toleransi beragama dan cinta cinta kemanusiaan umat beragama.	1. Mengidentifikasi dan mencegah adanya pihak-pihak yang tidak menjamin adanya jaminan beragama. 2. Melakukan aktivitas / kegiatan utk meningkatkan sikap toleransi beragama dan cinta cinta kemanusiaan umat beragama	• Subbag. TU : Tim KUB, • Seksi Bimas Islam • Penyuluh Agama
SK.02	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	1 Adanya layanan keagamaan yang tidak Profesional, tidak inklusif (membedakan layanan karena status dll), dan tidak berdampak (tidak memberikan manfaat) 2 Sikap pelaku layanan keagamaan yang tidak kooperatif.	1 Melakukan identifikasi dan mitigasi pada layanan keagamaan yg tidak professional, inklusif dan berdampak dan pencegahan dan penyelesaiannya. 2 Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaku / petugas yang melakukan layanan keagamaan.	• Subbag. TU : Tim KUB, • Seksi Bimas Islam • Penyuluh Agama
SK.03	Meningkatnya kualitas pelayanan sistem haji	Adanya sistem pelayanan haji yang tidak efektif	Melakukan identifikasi dan mitigasi terhadap sistem pelayanan haji yang sedang berjalan agar kualitasnya meningkat	• Seksi PHU
SK.04	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	Adanya kendala-kendala dalam pendaftaran ibadah haji	Selalu berkoordinasi dan mengantisipasi adanya kendala kendala dan masalah-masalah pendaftaran baik sifatnya teknis dan non-teknis	• Seksi PHU

No	Sasaran	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
SK.05	Meningkatnya kualitas pelayanan sistem haji	Adanya sistem pelayanan haji yang tidak efektif	Melakukan identifikasi dan mitigasi terhadap sistem layanan haji yang sedang berjalan agar kualitasnya meningkat	Seksi PHU
SK.06	Meningkatnya kualitas pembinaan sistem haji	Adanya masalah-masalah terkait kualitas sistem Haji	Melakukan identifikasi dan mitigasi terhadap sistem pembinaa haji yang sedang berjalan agar kualitasnya meningkat di Tingkat Kanwil dan Kabupaten / Kota	Seksi PHU
SK.07	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah	Adanya masalah-masalah terkait pengawasan dan penyelenggaraan Haji dan Umroh	Melakukan identifikasi dan mitigasi terhadap Sistem Pengawasan Haji dan Umroh yang sedang berjalan agar kualitasnya meningkat di Tingkat Kanwil dan Kabupaten / Kota	- Seksi PHU - Pihak Pengawas Internal Eksternal terkait
Bidang Pendidikan				
SK.08	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	Adanya kendala-kendala terkait akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	Melakukan koordinasi dengan stakeholder internal dan Lembaga Pendidikan terkait dalam menyelesaikan kendala-kendala terkait akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	- Seksi Pendma - Seksi Pontren - Penyuluh Agama
SK.09	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	Adanya keterbatasan anggaran dalam pemenuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	Melakukan koordinasi dengan stakeholder internal dan Lembaga Pendidikan terkait adanya keterbatasan anggaran dalam pemenuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	- Seksi Pendma - Seksi Pontren - Penyuluh Agama
SK.10	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada	Adanya laporan penyalahgunaan anggaran Pendidikan pada suatu Lembaga tertentu	Melakukan koordinasi dan mitigasi terhadap laporan yang ada dan menyelesaikan laporan tersebut sesuai regulasi yang	- Seksi Pendma - Seksi Pontren - Penyuluh Agama

No	Sasaran	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
	pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan		berlaku	
SK.11	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan	Adanya tenaga guru yang over di daerah tertentu dan adanya daerah yang kekurangan tenaga guru	Melakukan pembinaan dan koordinasi terkait distribusi guru agar merata pada satuan satuan Pendidikan di daerah yang ada	- Seksi Pendma - Seksi Pontren - Penyuluh Agama
Bidang Tata Kelola				
SK.12	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	- Adanya pemahaman bahwa hasil perencanaan sama / stagnan dengan hasil perencanaan dan anggaran tahun-tahun sebelumnya. - Adanya pelaksana perencanaan dan anggaran yang kurang berkualitas	- Memberikan pemahaman bahwa hasil perencanaan berdasarkan konsep perencanaan dan target yang ditentukan sesuai kurun waktu yang ditentukan (misalkan dari Renstra lima Tahunan : berarti dalam lima tahun program dan kegiatan mirip mirip, karena sudah direncanakan selama lima tahun beserta target-targetnya) - Melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap pelaksana perencanaan dan anggaran agar bertambah berkualitas hasil perencanaannya	Subbag Tata Usaha : Tim Perencanaan dan Data
SK.13	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Adanya laporan-laporan terkait Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), birokrasi yang lambat dan	Melakukan Solusi dan penyelesaian terkait Adanya laporan-laporan terkait Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN),	- Kepala Kantor - Subbag Tata Usaha

No	Sasaran	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
		rumit, serta kurangnya komitmen terhadap perubahan paradigma layanan para pelaku birokrasi.	birokrasi yang lambat dan rumit, serta kurangnya komitmen terhadap perubahan paradigma layanan para pelaku birokrasi.	• Kepala Seksi • Unit Pengawasan Gratifikasi (UPG)
SK.14	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	Adanya masalah penatausahaan (inventarisasi dan pencatatan yang tidak akurat), masalah penggunaan (penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi), masalah hukum (sengketa kepemilikan tanah), dan masalah pemanfaatan (BMN tidak terpakai/idle)	Menyelesaikan sesuai regulasi yang berlaku dan terus melakukan pembinaan terhadap pelaksana BMN yang terkait.	• Kepala Kantor • Subbag Tata Usaha • Kepala Seksi
SK.15	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	Proses yang belum sepenuhnya profesional: Seleksi ASN masih belum dapat sepenuhnya menjamin profesionalisme dan keahlian teknis yang relevan dengan posisi yang dibutuhkan	Melakukan pembinaan peningkatan kompetensi secara bertahap dan konsisten	• Kepala Kantor • Subbag Tata Usaha • Kepala Seksi
SK.16	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	Kurangnya Sinergi dan integrasi antara berbagai pemangku kepentingan seperti instansi terkait, OBH, dan lembaga penegak hukum lainnya masih belum berjalan optimal.	Melakukan koordinasi dan komunikasi secara rutin sesuai kesepakatan bersama	• Kepala Kantor • Subbag Tata Usaha • Kepala Seksi • Instansi Terkait
SK.17	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	Adanya Dokumen surat yang penting rentan terhadap kebocoran informasi jika tidak ada mekanisme keamanan yang kuat.	Perlu penguatan sistem keamanan dan pemahaman Bersama antar pelaku tata persuratan.	• Kepala Kantor • Subbag Tata Usaha • Kepala Seksi • Ketua Tim dan Anggota
SK.18	Meningkatnya layanan informasi dan	Adanya keterbatasan dalam mengakses dokumen / arsip /	Perlu disepakati Bersama cara cepat mengakses dokumen / data sesuai	• Kepala Kantor • Subbag Tata

No	Sasaran	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
	dokumentasi	data yang dibutuhkan sehingga bisa menghambat proses layanan.	kewenangan masing-masing.	Usaha • Kepala Seksi • Ketua Tim dan Anggota
SK.19	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	• Adanya Data yang sama tersimpan di beberapa tempat dan tidak sinkron menyebabkan kebingungan, inefisiensi, dan peningkatan biaya operasional • Adanya ketidakjelasan dalam mengakses data yang diperlukan di stakeholder internal (Bag TU, Bidang, Pembimas)	Perlu adanya bank Data / Data base/server yang bisa diakses sewaktu waktu sesuai dengan kewenangan masing-masing	• Kepala Kantor • Subbag Tata Usaha • Kepala Seksi • Ketua Tim dan Anggota
SK.20	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan	Adanya masalah terkait Terbatasnya pengetahuan tentang konsep layanan prima dan kurangnya kompetensi dalam memberikan pelayanan menjadi kendala utama.	Perlu adanya pembinaan bertahap / berjenjang sesuai periode waktu yang ditentukan	• Kepala Kantor • Subbag Tata Usaha • Kepala Seksi • Ketua Tim dan Anggota

2.5. Rumusan Pengukuran / Metadata

Tabel Rumusan Pengukuran Kinerja ini menjelaskan pengukuran pada Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut :

Rumusan Pengukuran :

1. Kode SK
2. IKSK
3. Kode IKSK
4. IKSK
5. Cara Pengukurannya
6. Penanggung jawab dari tiap IKSK
7. Sumber Data IKSK
8. Variabel Pembangun
9. Periode Pelaporan IKSK

Pada tabel ini diuraikan 20 Sasaran Kegiatan dan 82 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.

Adapun secara garis besar, cara pengukuran meliputi :

1. Indeks
2. Persentase
3. Persentase Peningkatan
4. Rasio dan Jumlah
5. Rata-Rata Nilai
6. Instrumen yang ditentukan sesuai regulasi

Metadata

Metadata pada prinsipnya menjelaskan tentang IKSK yang dipilih, selanjutnya diuraikan tentang:

1. Nama SK,
2. Nama Metadata IKSK,
3. Instansi – Unit Kerja Penghasil,
4. Nama Indikator,
5. Konsep/Definisi,
6. Interpretasi,
7. Metode / Rumus Perhitungan,
8. Nama Variabel Pembangun,
9. Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun,
10. Ukuran/Satuan,
11. Waktu / Cut off Ketersediaan Data,
12. Klasifikasi,
13. Level Estimasi,
14. Apakah indikator dapat diakses umum,
15. Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data (disebutkan nama publikasinya)

Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang Tahun 2025 - 2029

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BIDANG AGAMA								
SK.01	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	IKSK.01.01	Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00	IKUB = (Nilai Dim.Toleransi + Nilai Dim.Kesetaraan + Nilai Dim.Kerjasama) / 3	KUB, Khonghucu, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	KUB, Khonghucu, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	1. Nilai Dimensi Toleransi 2. Nilai Dimensi Kesetaraan 3. Nilai Dimensi Kerjasama	Tahunan
		IKSK.01.02	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a: Jumlah KUA yang aktif menyelenggarakan Early Warning Sistem (EWS) b: Jumlah total KUA secara nasional	Bid. Urais	Bid. Urais	Persentase KUA penyelenggara Early Warning Sistem	Tahunan
		IKSK.01.03	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Persentase Peningkatan = $[(a-b) / b] \times 100$ Keterangan: a = Jumlah dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang difasilitasi pada tahun berjalan b = Jumlah dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang difasilitasi pada tahun sebelumnya	Sekjen : KUB	Sekjen : KUB / FKUB, Kab/Kota	1. Jumlah kegiatan dialog kerukunan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu tahun berjalan 2. Jumlah kegiatan dialog kerukunan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu tahun sebelumnya	Tahunan
		IKSK.01.04	Persentase peningkatan audiens MTQ/ PESPARAWI/ PESPERANI/	Persentase Peningkatan = $[(a-b) / b] \times 100$ Keterangan: a = Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pespar	KUB, Khonghucu, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik,	Bag. TU : KUB, Khonghucu, Bid. Urais, Penais, Pembimas :	Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			UTSAWA DHARMA GITA/ SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA	awii/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun berjalan b= Jumlah audiens MTQ/ Pesparani/ Pesparawi/ Utsawa Dharma Gita/ Swayamvara Tripitaka Gatha tahun sebelumnya	Bimas Hindu, Bimas Buddha	Kristen, Katolik, Hindu, Buddha	Tripitaka Gatha tahun berjalan2. Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun sebelumnya	
		IKSK.01 .05	Persentase peningkatan peserta event seni budaya	Persentase Peningkatan = $[(a-b) / b] \times 100$ Keterangan : a = Jumlah peserta tahun ini b = Jumlah peserta tahun sebelumnya	KUB, Khonghucu, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bag. TU : KUB, Khonghucu, Bid. Urais, Penais, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindu, Buddha	Rumusan = $[(a-b) / b] \times 100\%$ a = Jumlah peserta tahun ini b = Jumlah peserta tahun sebelumnya	Pendataan dan Evaluasi Event Keagamaan dan Seni Budaya Keagamaan
		IKSK.01 .06	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan/ pembinaan b = Jumlah total lembaga agama dan sosial keagamaan	KUB, Khonghucu, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bag. TU : KUB, Khonghucu, Bid. Urais, Penais, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindu, Buddha	1. Jumlah lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan/ pembinaan 2. Jumlah total lembaga agama dan sosial keagamaan yang terdaftar	Tahunan
SK.02	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	IKSK.02 .01	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah penyuluh agama yang memperoleh nilai kinerja dengan kategori baik b = Total jumlah penyuluh agama yang dievaluasi kinerjanya	Khonghucu, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bag. TU : KUB, Khonghucu, Bid. Urais, Penais, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindu, Buddha	Data hasil evaluasi kinerja penyuluh agama (aspek laporan, konten digital, dan diklat)2. Jumlah total penyuluh agama	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IKSK.02.02	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	$X = b / a$, sehingga rasionya menjadi 1 : X Keterangan: a = Jumlah penyuluh agama yang aktif b = Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Khonghucu, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bag. TU : KUB, Khonghucu, Bid. Urais, Penais, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindu, Buddha	1. Jumlah penyuluh agama yang aktif 2. Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Tahunan
		IKSK.02.03	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan : a = Jumlah fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi b = Jumlah semua fasilitator bimbingan perkawinan agama	Khonghucu, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bag. TU : KUB, Khonghucu, Bid. Urais, Penais, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindu, Buddha	1. Jumlah fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi 2. Jumlah semua fasilitator bimbingan perkawinan agama	
		IKSK.02.04	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan : a = Jumlah remaja yang mendapatkan bimbingan b = Jumlah remaja usia 15-19 tahun berdasarkan data BPS	Khonghucu, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bag. TU : KUB, Khonghucu, Bid. Urais, Penais, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindu, Buddha	1. Jumlah remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah 2. Jumlah penduduk usia 15-19 tahun berdasar data BPS	Tahunan
		IKSK.02.05	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	Persentase Peningkatan = $[(a-b) / b] \times 100$ Keterangan: a = Jumlah jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan tahun berjalan b = jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan tahun sebelumnya	Khonghucu, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bag. TU : KUB, Khonghucu, Bid. Urais, Penais, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindu, Buddha	1. Jumlah jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan tahun berjalan 2. Jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan tahun sebelumnya	

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IKSK.02.06	Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	Persentase = (a / b) x 100 Keterangan : a = Jumlah rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan b = Jumlah semua rumah ibadah agama yang ada.	Khonghucu, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bag. TU : KUB, Khonghucu, Bid. Urais, Penais, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindu, Buddha	1. Jumlah rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan 2. Jumlah semua rumah ibadah agama yang ada	
		IKSK.02.07	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	Persentase = (a / b) x 100 Keterangan : a = Jumlah masjid/musholla yang bersertifikat arah kiblat b = Total jumlah masjid/musholla yang terdata	Bidang Urais	Bidang Urais dan Seksi Bimas Islam Kab/Kota	Jumlah masjid/musholla bersertifikat arah kiblat 2. Jumlah total masjid/musholla	Tahunan
		IKSK.02.08	Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan	Persentase Peningkatan = [(a-b) / b] x 100 Keterangan: a = Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun berjalan b = Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun sebelumnya	Khonghucu, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bag. TU : KUB, Khonghucu, Bid. Urais, Penais, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindu, Buddha	1. Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun berjalan 2. Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun sebelumnya	Tahunan
		IKSK.02.09	Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	Persentase = (a / b) x 100 Keterangan: a = Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun berjalan b = Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun sebelumnya	Khonghucu, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bag. TU : KUB, Khonghucu, Bid. Urais, Penais, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindu, Buddha	1. Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun berjalan 2. Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun sebelumnya	Tahunan
		IKSK.02.10	Persentase rekomendasi hasil	Persentase = (a / b) x 100 Keterangan:	Bidang Urais	Bidang Urais dan Seksi	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan	a = Jumlah rekomendasi hasil pemantauan yang diterbitkan b = Jumlah total hasil pemantauan yang dilakukan		Bimas Islam Kab/Kota	yang diterbitkan2. Jumlah total hasil pemantauan	
		IKSK.02.11	Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan yang terintegrasi dengan Regsosek b = Jumlah penduduk miskin pada Regsosek	Khonghucu, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bag. TU : KUB, Khonghucu, Bid. Urais, Penais, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindu, Buddha	1. Jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan yang terintegrasi dengan Regsosek 2. Jumlah penduduk miskin pada Regsosek	Tahunan
SK.03	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	IKSK.03.01	Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah calon jemaah lansia yang diberangkatkan pada tahun berjalan b = Total kuota jemaah lansia yang tersedia pada tahun berjalan	Bidang PHU	Bidang PHU dan Seksi PHU Kab/Kota	Persentase jemaah haji lansia yang diberangkatkan sesuai kuota tahunan	Tahunan
SK.04	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	IKSK.04.01	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah PLHUT yang telah memenuhi seluruh atau sebagian besar indikator standar pelayanan dan sarana-prasarana b = Jumlah total PLHUT yang terdaftar dan aktif	Bidang PHU	Bidang PHU dan Seksi PHU Kab/Kota	Persentase PLHUT yang memenuhi standar pelayanan dan sarana-prasarana	Tahunan
		IKSK.04.02	Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah pengguna PLHUT yang menyatakan puas	Bidang PHU	Bidang PHU dan Seksi PHU Kab/Kota	Jumlah pengguna PLHUT yang menyatakan puas2. Jumlah total pengguna PLHUT	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				b = Jumlah total responden survei			yang menjadi responden survei	
SK.05	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	IKSK.05 .01	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah unit layanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) yang memenuhi standar b = Jumlah total unit layanan yang tersedia	Bidang PHU	Bidang PHU dan Seksi PHU Kab/Kota	1. Jumlah unit layanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) yang sesuai standar 2. Jumlah total unit layanan yang disediakan untuk jemaah haji	Tahunan
SK.06	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	IKSK.06 .01	Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah petugas haji yang memperoleh nilai kinerja di atas 75 b = Jumlah total petugas haji yang dievaluasi	Bidang PHU	Bidang PHU dan Seksi PHU Kab/Kota	1. Jumlah petugas haji yang memperoleh nilai kinerja di atas 75 2. Total petugas haji yang dievaluasi kinerjanya	Tahunan
		IKSK.06 .02	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik b = Jumlah total calon jemaah haji	Bidang PHU	Bidang PHU dan Seksi PHU Kab/Kota	1. Jumlah calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haj 2. Jumlah total calon jemaah haji pada tahun berjalan	Tahunan
SK.07	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah	IKSK.07 .01	Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A); a. Lembaga penyelenggara haji khusus; b. Lembaga peny. umrah	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan : a = Jumlah PIHK dan/atau PPIU yang memperoleh akreditasi A pada tahun berjalan b = Jumlah total PIHK dan/atau PPIU yang terdaftar aktif pada tahun berjalan	Bidang PHU	Bidang PHU dan Seksi PHU Kab/Kota	Persentase PIHK terakreditasi A2. Persentase PPIU terakreditasi A	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH								
SK.08	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	IKSK.08.01	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik	Persentase = (a / b) × 100 a = Siswa/Santri satuan pendidikan umum yang lulus dengan predikat sangat baik b = Siswa/Santri satuan pendidikan kekhasan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus.	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1 Siswa/Santri satuan pendidikan umum yang lulus dengan predikat sangat baik 2 Siswa/Santri satuan pendidikan kekhasan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus.	Tahunan
SK.09	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	IKSK.09.01	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif b = Total jumlah madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif 2. Total jumlah madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan	Tahunan
		IKSK.09.02	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras b = Total jumlah madrasah, pesantren, dan satuan			1. Jumlah madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras2. Jumlah madrasah,	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			peningkatan sarana prasarana	pendidikan keagamaan			pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan	
		IKSK.09.03	Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun berjalan b = Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun sebelumnya	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun berjalan 2. Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun sebelumnya	Tahunan
		IKSK.09.04	Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha)	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah siswa kelas 1 MI, SDTK, Adhi Widyalyaya, atau Mula Dhammasekha yang pernah mengikuti PAUD b = Total jumlah siswa kelas 1 MI, SDTK, Adhi Widyalyaya, atau Mula Dhammasekha	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah siswa kelas 1 MI, SDTK, Adhi Widyalyaya, atau Mula Dhammasekha yang pernah mengikuti PAUD 2. Total jumlah siswa kelas 1 MI, SDTK, Adhi Widyalyaya, atau Mula Dhammasekha	Tahunan
		IKSK.09.05	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik,	1. Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah 2. Total jumlah	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				b = Total jumlah satuan pendidikan		Hindhu, Buddha	satuan pendidikan	
		IKSK.09 .06	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	Rumus = Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan	Bidang PD Pontren	Bidang PD Pontren dan Seksi PD Pontren Kab/Kota	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan pada Pesantren	Tahunan
SK.10	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	IKSK.10 .01	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a literasi membaca b numerasi	1. Literasi Membaca : Persentase = (a / b) × 100 Keterangan : a = Jumlah peserta didik yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi bidang Literasi Membaca b = Jumlah peserta didik yang mengikuti asesmen kompetensi 2. Numerasi Rumus : Persentase = (a / b) × 100 Keterangan : a = Jumlah peserta didik yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi bidang Numerasi b = Jumlah peserta didik yang mengikuti asesmen kompetensi	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	Jumlah peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang memenuhi Standar Kompetensi Minimum bidang Literasi Membaca. Jumlah peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang memenuhi Standar Kompetensi Minimum bidang Numerasi. Jumlah peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang mengikuti AKM	Tahunan
		IKSK.10 .02	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah satuan	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik,	Bidang Pendidikan Madrasah, PD	1. Jumlah satuan pendidikan yang menyusun RKT	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	pendidikan yang menyusun RKT berbasis partisipasi komunitas b = Total jumlah satuan pendidikan	Bimas Hindu, Bimas Buddha	Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	berbasis partisipasi komunitas 2. Jumlah total satuan pendidikan	
		IKSK.10 .03	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran b = Jumlah total satuan pendidikan yang menjadi sasaran	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter 2. Jumlah total satuan pendidikan sasaran	Tahunan
		IKSK.10 .04	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Rumus = Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Tahunan
		IKSK.10 .05	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Persentase Peningkatan = $[(a-b) / b] \times 100$ Keterangan: a = Rata-rata nilai karakter siswa setelah mengikuti kegiatan kepramukaan b = Rata-rata nilai karakter siswa sebelum mengikuti kegiatan kepramukaan	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Nilai karakter siswa pra-kegiatan kepramukaan 2. Nilai karakter siswa pasca-kegiatan kepramukaan	Tahunan
		IKSK.10 .06	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas :	1. Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	dikembangkan dengan muatan cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan b = Jumlah total perangkat kurikulum yang ada		Kristen, Katolik, Hindhu, Buddha	2. Jumlah total perangkat kurikulum	
		IKSK.10.07	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan : a = Jumlah Satuan Pendidikan yang terakreditasi minimal peringkat B b = Total jumlah Satuan Pendidikan	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah Satuan Pendidikan minimal B 2. Total jumlah Satuan Pendidikan	Tahunan
		IKSK.10.08	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang terselenggara sebagai satuan pendidikan unggul b = Total jumlah satuan pendidikan	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah satuan pendidikan unggul 2. Total jumlah satuan pendidikan	Tahunan
		IKSK.10.09	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual b = Total jumlah satuan pendidikan	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah satuan pendidikan dengan program pendidikan bilingual 2. Total jumlah satuan pendidikan	Tahunan
		IKSK.10.10	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional b = Total jumlah siswa	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah siswa peserta kompetisi nasional/internasional 2. Total jumlah siswa	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Hindhu, Buddha		
		IKSK.10.11	Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang memperoleh kategori baik pada nilai pengelolaan partisipatif b = Total jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang dinilai	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah satuan pendidikan yang memperoleh nilai pengelolaan partisipatif kategori baik 2. Total jumlah satuan pendidikan yang dinilai	Tahunan
		IKSK.10.12	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah materi ajar digital yang digunakan dalam pembelajaran b = Jumlah total materi ajar digital yang tersedia	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah materi ajar digital yang tersedia. 2. Jumlah materi ajar digital yang digunakan dalam pembelajaran	Tahunan
SK.11	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	IKSK.11.01	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik b = Total jumlah guru	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik 2. Total jumlah guru	Tahunan
		IKSK.11.02	Rasio guru satuan pendidikan	Rasio = 1 : (Jumlah siswa / Jumlah	Bid. Pendis, Bimas Kristen,	Bidang Pendidikan	Jumlah guru madrasah2. Jumlah	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			terhadap siswa yang memenuhi SNP	guru) (Hasil rasio kemudian dibandingkan dengan rasio maksimal sesuai SNP pada masing-masing jenjang)	Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Madrasah, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	siswa madrasah	
		IKSK.11.03	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dan sertifikasi kompetensi b = Total jumlah tenaga kependidikan lainnya	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dan sertifikasi kompetensi 2. Jumlah tenaga kependidikan lainnya	Tahunan
		IKSK.11.04	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah guru agama yang memiliki sertifikat pendidik b = Total jumlah guru agama	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah guru agama yang memiliki sertifikat pendidik 2. Total jumlah guru agama	Tahunan
		IKSK.11.05	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah guru yang memperoleh nilai rapor hasil AKG minimal predikat terampil b = Total jumlah guru yang mengikuti AKG	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	Persentase = (a / b) × 100% Keterangan: a = Jumlah guru yang memperoleh nilai rapor hasil AKG minimal predikat terampil b = Total jumlah guru yang mengikuti AKG	Tahunan
		IKSK.11.06	Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah Kepala Madrasah yang	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu,	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS,	1. Jumlah Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKK	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil b = Total Kepala Madrasah yang mengikuti AKK	Bimas Buddha	Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	minimal predikat terampil 2. Total Kepala Madrasah yang mengikuti AKK	
		IKSK.11.07	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal kategori baik pada rapor hasil Asesmen Kompetensi b = Total guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti Asesmen Kompetensi	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal kategori baik 2. Total guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti Asesmen Kompetensi	Tahunan
		IKSK.11.08	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil b = Total Jumlah semua pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP)	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil 2. Total Jumlah semua pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP)	Tahunan
		IKSK.11.09	Persentase guru yang meningkat jenjang karir	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah guru yang naik jenjang karir dalam	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu,	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS,	1. Jumlah guru yang meningkat jenjang karir 2. Total juml. guru	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				periode tertentu b = Total guru pada periode yang sama	Bimas Buddha	Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha		
		IKSK.11.10	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah pengawas satuan pendidikan yang meningkat jenjang karir dalam periode tertentu. b = Total pengawas satuan pendidikan pada periode yang sama	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah pengawas satuan pendidikan yang meningkat jenjang karir 2. Total pengawas satuan pendidikan	Tahunan
		IKSK.11.11	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Persentase Peningkatan = [(a-b) / b] × 100 Keterangan: a = Jumlah lulusan PPG pada tahun berjalan b = Jumlah lulusan PPG pada tahun sebelumnya	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada tahun berjalan 2. Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada tahun sebelumnya	Tahunan
		IKSK.11.12	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama yang diterbitkan berbasis rencana kebutuhan b = Total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun dan siap ditindaklanjuti	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama yang diterbitkan berbasis rencana kebutuhan 2. Total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BIDANG TATA KELOLA								
SK.12	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	IKSK.12 .01	Nilai Kinerja Anggaran	Menggabungkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dengan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Sekretariat/TU : Tim Perencanaan & Data	Sekretariat/TU: Tim Perencanaan & Data	1. Rencana Anggaran 2. Realisasi Anggaran 3. Output 4. Outcome	Tahunan
SK.12	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	IKSK.12 .01	Persentase Aplikasi SIPKA satuan kerja sesuai standar	Menggunakan Instrumen dari KMA 94 Tahun 2021	Sekretariat/TU : Tim Ortala	Sekretariat/TU : Tim Ortala	Memenuhi kriteria dan sistematis dalam KMA 94 Tahun 2021	Tahunan
		IKSK.12 .02	Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	Menggunakan Instrumen dari KemenPAN RB	Sekretariat/TU : Tim Ortala	Sekretariat/TU : Tim Ortala	1. Nilai Komponen Pengungkit (aspek pemenuhan dan aspek reform) 2. Nilai Komponen Hasil 3. Hasil Survei IPAK dan IPKP 4. Nilai SAKIP 5. Prosentase penyelesaian hasil pengawasan 6. Kepatuhan pelaporan LHKAN 7. Kualitas sarana layanan publik	Tahunan
SK.13	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	IKSK.13 .01	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Rumus perhitungan dilakukan oleh Kementerian Keuangan	Sekretariat/TU : Tim Keuangan dan BMN	Sekretariat/TU : Tim Keuangan dan BMN	1. Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran; 2. Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran; 3. Kualitas Hasil Pelaksanaan	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Anggaran	
		IKSK.13.02	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a. Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti b. Jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan	Sekretariat/TU : Tim Ortala dan TLHP	Sekretariat/TU : Tim Ortala dan TLHP dan Tim Keuangan & BMN, Tim Hukum POA	1. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang harus ditindaklanjuti (X1), 2. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (X2), 3. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (Y)	Tahunan
		IKSK.13.03	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Rumus: $Y = (X2/X1) \times 100$	Sekretariat/TU : Tim Keuangan dan BMN	Sekretariat/TU : Tim Keuangan dan BMN	Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun Laporan Keuangan dan Jumlah satuan kerja yang menyusun Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu	Tahunan
		IKSK.13.04	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a. Jumlah satuan kerja yang menerapkan PIPK b. Jumlah total satuan kerja	Sekretariat/TU : Tim Keuangan dan BMN	Sekretariat/TU : Tim Keuangan dan BMN	1. Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan PIPK sesuai pedoman 2. Jumlah seluruh satuan kerja yang menjadi objek evaluasi	Tahunan
		IKSK.13.05	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a. Jumlah satuan kerja yang menyusun	Sekretariat/TU : Tim Keuangan dan BMN	Sekretariat/TU : Tim Keuangan dan BMN	1. Jumlah satker yang menyusun RKBMN tepat waktu	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				RKBMN tepat waktu b. Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun RKBMN			2. Jumlah seluruh satker yang diwajibkan menyusun RKBMN	
SK.14	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	IKSK.14 .01	Indeks Profesionalisme ASN	Menggunakan Instrumen yang disusun BKN	Sekretariat/TU : Tim Sumber Daya Manusia Aparatur	Sekretariat/TU : Tim Sumber Daya Manusia Aparatur	Variabel Profesionalisme ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN (profesionalitas), memiliki integritas, tanggung jawab, inovasi dan keteladanan, serta berperilaku moderat (komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi) dalam melakukan tugas jabatannya.	Tahunan
		IKSK.14 .02	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Menggunakan Instrumen yang disusun oleh BKN dan Kemenpanrb	Sekretariat/TU : Tim Sumber Daya Manusia Aparatur	Sekretariat/TU : Tim Sumber Daya Manusia Aparatur	Penyusunan Kebutuhan ASN berdasarkan Jumlah dan Jenis Jabatan	Tahunan
		IKSK.14 .03	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Menggunakan Instrumen yang disusun oleh Kemenag	Sekretariat/TU : Tim Sumber Daya Manusia Aparatur	Sekretariat/TU : Tim Sumber Daya Manusia Aparatur	Dinilai berdasarkan sikap, perilaku, kinerja dan inovasi. Dan dibagi menjadi 4 kategori pegawai teladan (JPT Pratama, Jabatan	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Administrator/JF Madya, Jabatan Pengawas/JF Muda, Jabatan Pelaksana/JF Pertama/JF Keterampilan	
SK.15	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	IKSK.15 .01	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a. Jumlah kasus hukum yang terselesaikan b. Jumlah kasus hukum	Sekretariat/TU : Hukum, Kerja sama, dan Pengawasan Orang Asing	Sekretariat/TU : Hukum, Kerja sama, dan Pengawasan Orang Asing	1. Jumlah kasus hukum yang terselesaikan 2. Jumlah Kasus hukum	Triwulan
		IKSK.15 .02	Persentase rekomendasi izin orang asing	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a. Jumlah rekomendasi izin orang asing yang diterbitkan b. Jumlah rekomendasi izin orang asing	Sekretariat/TU : Hukum, Kerja sama, dan Pengawasan Orang Asing	Sekretariat/TU : Hukum, Kerja sama, dan Pengawasan Orang Asing	1. Rekomendasi Izin Tinggal Terbatas (ITAS) 2. Rekomendasi Visa Tinggal Terbatas (VITAS) 3. Rekomendasi Izin Tinggal Tetap (ITAP) 4. Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) 5. Rekomendasi Pengesahan RPTKA Non DKP-TKA 6. Rekomendasi Izin Tinggal Dinas 7. Izin Penelitian 8. Izin Studi 9. Izin Penelitian 10. Izin Studi	Triwulan
SK.16	Meningkatnya kualitas	IKSK.16 .01	Persentase Digitalisasi Arsip	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan:	Sekretariat/TU : Umum (Barang	Sekretariat/TU : Umum	1. Jumlah arsip digital yang	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa		dan mudah diakses	a. Jumlah arsip yang telah didigitalisasi dan dapat diakses dengan mudah b. Jumlah total arsip yang seharusnya didigitalisasi	dan jasa, PTSP, dan Arsip)	(Barang dan jasa, PTSP, dan Arsip)	tersedia dan terakses 2. Jumlah keseluruhan arsip yang wajib didigitalisasi 3. Sistem penyimpanan dan akses digital yang digunakan (misalnya e-arsip, SRIKANDI)	
		IKSK.16.02	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a. Jumlah kegiatan pengembangan sarana dan prasarana yang sesuai dengan roadmap b. Jumlah total kegiatan pengembangan sarana dan prasarana	Sekretariat/TU : Umum (Barang dan jasa, PTSP, dan Arsip)	Sekretariat/TU : Umum (Barang dan jasa, PTSP, dan Arsip)	1. Sarana dan prasarana 2. Pengelolaan Fasilitas Perkantoran	Triwulan dan tahunan
		IKSK.16.03	Nilai Layanan Kesehatan	Survey kepuasan pasien	Sekretariat/TU : Umum (Barang dan jasa, PTSP, dan Arsip)	Sekretariat/TU : Umum dan Poliklinik Al-Ikhlas (Baznas)	1. Aksesibilitas Layanan 2. Kualitas Pelayanan Medis 3. Kepuasan Pasien 4. Efisiensi dan Keamanan Layanan	Tahunan
SK.17	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	IKSK.17.01	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	Menggunakan instrumen dari Komisi Informasi	Sekretariat/TU : Humas, Protokoler, dan Sistem Informasi	Sekretariat/TU : Humas, Protokoler, dan Sistem Informasi	1. Kebijakan dan Regulasi Struktur Organisasi dan SDM PPID 2. Ketersediaan dan Kualitas Informasi Publik 3. Layanan	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							5. Informasi Publik 6. Pengelolaan dan Inovasi Teknologi Informasi 6. Monitoring dan Evaluasi	
		IKSK.17.02	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	Persentase = (a / b) X 100 Keterangan: a. Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi pada tahun berjalan. b. Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi pada tahun sebelumnya	Sekretariat/TU : Humas, Protokoler, dan Sistem Informasi	Sekretariat/TU : Humas, Protokoler, dan Sistem Informasi	1. Konten Keagamaan dan Pendidikan 2. Media Informasi Publik	Tahunan
SK.19	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	IKSK.19.01	Indeks Pembangunan Statistik	- Pengumpulan data (misalnya, wawancara atau survei) dan kemudian - mengklasifikasikannya ke dalam salah satu dari empat skala pengukuran: nominal, ordinal, interval, dan rasio.	Sekretariat/TU : Humas, Protokoler, dan Sistem Informasi	Sekretariat/TU : Humas, Protokoler, dan Sistem Informasi	1. Prinsip SDI 2. Kualitas Data 3. Proses Bisnis Statistik 4. Kelembagaan; dan 5. Sistem Statistik	Tahunan
		IKSK.19.02	Persentase data statistik yang dipublikasi	Persentase = ((a - b) / b) × 100 Keterangan: a. Jumlah data statistik yang dipublikasi pada tahun berjalan b. Jumlah data statistik yang dipublikasi pada tahun sebelumnya	Sekretariat/TU : Humas, Protokoler, dan Sistem Informasi	Sekretariat/TU : Humas, Protokoler, dan Sistem Informasi dan Tim Perencanaan & Data	1. Data Statistik 2. Media Informasi Publik	Tahunan
SK.20	Meningkatnya Layanan Prima	IKSK.20.01	Persentase pemanfaatan	Persentase = (a / b) X 100 Keterangan:	Sekretariat/TU dan Bidang	Bidang Pendidikan	1. Realisasi anggaran	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bidang Pendidikan		anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	a. Nilai anggaran yang digunakan sesuai dengan output yang tercapai b. Total anggaran bidang pendidikan yang direalisasikan	Pendis, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	2. Capaian output kegiatan (misalnya jumlah siswa terbantu, sarana pendidikan yang dibangun, pelatihan yang diselenggarakan) 3. Rencana kerja dan target output yang ditetapkan	
		IKSK.20.02	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama	Persentase = (a / b) X 100 Keterangan: a. Nilai kinerja Kementerian Agama pada tahun berjalan b. Nilai kinerja Kementerian Agama pada tahun sebelumnya	Sekretariat/TU	Sekretariat/TU (semua Tim)	1. Capaian indikator kinerja utama (IKU) tahun berjalan 2. Capaian IKU tahun sebelumnya 3. Skor evaluasi kinerja kementerian dari instansi pembina (misal KemenPAN-RB atau Bappenas)	Tahunan
		IKSK.20.03	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persentase = (a / b) X 100 Keterangan: a. Jumlah kebijakan prioritas bidang pendidikan yang telah disampaikan melalui media b. Jumlah total kebijakan prioritas bidang pendidikan yang ditetapkan	Sekretariat/TU dan Bidang Pendis, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Daftar kebijakan prioritas pendidikan 2. Jumlah kebijakan yang dipublikasikan di media (TV, radio, media cetak, media sosial, website resmi, dll) 3. Kanal/media penyampaian informasi	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IKSK.20.04	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persentase = (a / b) X 100 Keterangan: a. Nilai capaian akses dan kualitas informasi tahun berjalan b. Nilai capaian akses dan kualitas informasi tahun sebelumnya	Sekretariat/TU dan Bidang Pendis, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah kanal/media yang digunakan untuk publikasi 2. Jumlah jangkauan atau interaksi publik terhadap informasi 3. Tingkat keterbacaan dan pemahaman konten 4. Frekuensi dan konsistensi publikasi kebijakan pendidikan 5. Penilaian kualitas konten oleh pengguna atau pemantauan internal	Tahunan
		IKSK.20.05	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK	Persentase = (a / b) X 100 Keterangan: a. Jumlah kebutuhan infrastruktur TIK yang telah terpenuhi b. Jumlah total kebutuhan infrastruktur TIK yang direncanakan	Sekretariat/TU dan Bidang Pendis, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah perangkat keras (hardware) yang tersedia 2. Jumlah kebutuhan jaringan dan konektivitas yang terpenuhi 3. Jumlah layanan server/cloud yang tersedia 4. Total kebutuhan infrastruktur yang diidentifikasi	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKS	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKS	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							dalam perencanaan TIK	
		IKSK.20.06	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	Persentase = (a / b) X 100 Keterangan: a. Jumlah data prioritas yang tersedia dan selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra b. Jumlah total data yang dibutuhkan untuk mengukur indikator RPJMN dan Renstra	Sekretariat/TU : Tim Perencanaan & Data	Sekretariat/TU : Tim Perencanaan & Data dan Sub Bag TU Kab/Kota	1. Daftar indikator RPJMN dan Renstra yang membutuhkan data 2. Jumlah data yang telah tersedia dalam format dan frekuensi yang sesuai 3. Kesesuaian metadana dan definisi operasional data	Tahunan
		IKSK.20.07	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai dari Kementerian Keuangan	Bag. TU, Bidang & Pembimas Kristen, Katholik, Hindhu & Buddha	Bag. TU, Bidang & Pembimas Kristen, Katholik, Hindhu & Buddha	1. DIPA / RKA-KL 2. Rencana Aksi / Rencana Kegiatan 3. RPD (Rencana Penarikan Dana) 4. LPJ (Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan & Anggaran	Triwulan

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Target Kinerja

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang, saat ini menetapkan 20 Sasaran Kegiatan dan 75 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan. Tetapi mulai tahun 2026, karena Penyelenggaraan Haji dan Umroh sudah menjadi Kementerian sendiri maka Sasaran Kegiatan berjumlah : 15 Sasaran Kegiatan dan 70 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagaimana akan diuraikan di Bab III ini.

Dalam penetapan target Kinerja ditetapkan beberapa kategori sebagai berikut :

1. Penentuan Target Indikator Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang bersifat akumulasi target (rata-rata target) yang ditopang dari stakeholder internal sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, mulai dari Bagian Tata Usaha, Bidang Bimbingan Masyarakat Islam, Bidang Pendidikan Madrasah, Bidang Pendidikan Pondok Pesantren, Bidang Pendidikan Agama Islam, yang didukung oleh Tim nya masing-masing, sedangkan Untuk Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah tidak dimasukkan dalam target Kinerja, karena sudah pisah menjadi Kementerian tersendiri.
2. Penentuan Target Indikator Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang mempertimbangkan target yang ditentukan oleh masing-masing direktoral di Eselon-2 juga mempertimbangkan target (rata-rata target) yang ditopang dari stakeholder internal Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang sebanyak 3 Satker MTsN dan 1 Satker MAN.
3. Tabel Target Kinerja meliputi tiga bidang, Yakni Bidang Agama, Bidang Pendidikan dan Bidang Tata Kelola, sebagai berikut :

- SK / IKSK
- Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator.
- Satuan
- Baseline 2024
- Target Kinerja Tahun : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029
- Unit Organisasi Pelaksana

Lebih detil diuraikan pada tabel berikut ini :

Target Kinerja Tahun 2025 - 2029

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA 2029	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
BIDANG AGAMA					
SK.1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama				KUB, Bimas Islam
IKSK.1.2	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	Persen	0	100,00	
IKSK.1.4	Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/PESPERANI/UTSAWA DHARMA GITA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA	Persen	32,275	40,5	
IKSK.1.5	Persentase peningkatan peserta event seni budaya	Persen	6,5	9,4	
IKSK.1.6	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Persen	34,43	46,5	
SK.2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak				Bimas Islam
IKSK.2.1	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Persen	82,00	87,50	
IKSK.2.2	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Rasio	1 : 5	1 : 5	
IKSK.2.3	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	Persen	70	48,5	
IKSK.2.4	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	Persen	0,4	4,9	

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA 2029	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
IKSK.2.6	Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	Persen	17,3	19,4	
IKSK.2.7	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	Persen	40,5	60,5	
IKSK.2.8	Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan	Persen	31,5	48,5	
IKSK.2.10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan	Persen	-	6,5	
IKSK.2.11	Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	Persen	7,5	35,5	
SK.3	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji				Bid. PHU
IKSK. 3.1	Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	Persen	5,00	-	
SK. 4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji				Bid. PHU
IKSK. 4.1	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	Persen	80,00	-	
IKSK. 4.2	Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu	Persen	80,00	-	
SK. 5	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji				
IKSK. 5.1	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar	Persen	87,50	-	
SK. 6	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji				Bid. PHU
IKSK. 6.1	Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	Persen	80,00	-	
IKSK. 6.2	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	Persen	70,00	-	
SK.7	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah				
IKSK. 7.1	Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A);	Persen			Bid. PHU
	a. Lembaga penyelenggara haji khusus;		72,05	-	
	b. Lembaga penyelenggara umrah		86,01	-	
BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH					
SK.8	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan				Pendis
IKSK.8.1	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik	Persen	-	-	

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA 2029	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
SK.9	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas				Pendis
IKSK.9.1	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Persen	20,5	43,2	
IKSK.9.4	Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha)	Persen	40,5	67,5	
IKSK.9.5	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	Persen	19,98	46,6	
IKSK.9.6	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	Jumlah	-	-	
SK.10	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan				Pendis
IKSK.10.1	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk:				
	a literasi membaca		90,23	90,75	
	b numerasi		93,69	94,32	
IKSK.10.3	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Persen	54,4	71,14	
IKSK.10.4	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Jumlah			
IKSK.10.5	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Persen	20,5	23,99	
IKSK.10.6	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Persen	27,6	53,7	
IKSK.10.7	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	Persen			
IKSK.10.8	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	Persen	2,8	2,4	
IKSK.10.9	Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	Persen			
IKSK.10.10	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Persen	0,18	0,72	
IKSK.10.12	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	Persen	13,78	33,7	

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA 2029	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
SK.11	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan				Pendis
IKSK.11.1	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	15,25	58,37	
IKSK.11.4	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	38,1	79,81	
IKSK.11.5	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Persen	10,5	40,52	
IKSK.11.6	Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	Persen	-	-	
IKSK.11.7	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Persen	24,7	24,25	
IKSK.11.8	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil	Persen	-	-	
IKSK.11.9	Persentase guru yang meningkat jenjang karir	Persen	-	13,33	
IKSK.11.10	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	Persen	-	-	
IKSK.11.11	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Persen	-	30,33	
IKSK.11.12	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Persen	26,14	70,79	
BIDANG TATA KELOLA					
SK.12	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran				Sekretariat/TU : Tim Perencanaan & Data
IKSK.12.1	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	92,72	92,51	
SK.13	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi				Sekretariat/TU : Tim Kepegawaian
IKSK.13.1	Persentase Aplikasi SIPKA satuan kerja sesuai standar	Persen	-	78,78	
IKSK.13.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	Nilai	-	33,95	
SK.14	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN				Sekretariat/TU : Tim Keuangan dan BMN
IKSK.14.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	-	78,33	
IKSK.14.2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persen	-	77,19	
IKSK.14.3	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Persen	93,33	99,80	

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA 2029	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
IKSK.14.4	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Persen	-	99,9	
IKSK.14.5	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Persen	70,11	80,33	
SK.15	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai).				Sekretariat/TU : Tim Sumber Daya Manusia Aparatur
IKSK.15.1	Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	56,18	66,07	
IKSK.15.2	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Persen	-	80,89	
IKSK.15.3	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Jumlah	-	5	
SK.16	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum				Sekretariat/TU : Hukum, Kerja sama, dan Pengawasan Orang Asing
IKSK.16.1	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	Persen	95,00	96,43	
SK.17	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa				Sekretariat/TU : Umum (Barang dan jasa, PTSP, dan Arsip)
IKSK. 17.1	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	Persen	45	69,3	
IKSK. 17.2	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	Persen	-	-	
SK.18	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi				Sekretariat/TU : Humas, Protokol, dan Sistem Informasi
IKSK.18.1	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	Tingkat	56,5	69,82	
IKSK.18.2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	Persen	24,5	-	
SK.19	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi				Sekretariat/TU : Humas, Protokol, dan Sistem Informasi
IKSK.19.1	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2.05	-	
IKSK.19.2	Persentase data statistik yang dipublikasi	Persen	2,11	2,88	

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA 2029	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
SK.20	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan				
IKSK.20.1	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	Persen	72,5	76,63	Sekretariat/TU : Tim Terkait
IKSK.20.2	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama	Persen	1,36	2,20	
IKSK.20.3	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persen	10,00	15,00	
IKSK.20.4	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persen	-	23,03	
IKSK.20.5	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK	Persen	65,05	75,00	
IKSK.20.6	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	Persen	-	79,67	
IKSK.20.7	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	-	93,51	

3.2. Kerangka Pendanaan

Penentuan kerangka pendanaan meliputi penggabungan semua unit organisasi.

1. Tingkat Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang, mulai dari Bagian Tata Usaha, Bidang Urusan Agama Islam, Bidang Pendidikan Madrasah, Bidang Pendidikan Pondok Pesantren, Bidang Pendidikan Agama Islam.
2. Tingkat Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang sebanyak 3 Satker MTsN dan 1 Satker MAN.
3. Unit Organisasi dan Program meliputi :

Sekretariat Jenderal

- Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
- Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
- Program Dukungan Manajemen

Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam

- Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
- Program Dukungan Manajemen

Ditjen Pendidikan Islam

- Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun
- Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
- Program Dukungan Manajemen

Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah

- Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
- Program Dukungan Manajemen

Adapun Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan sebagaimana terlampir, dibawah ini :

Kerangka Pendanaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang Tahun 2025 - 2029

PROGRAM / KEGIATAN	KODE	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN					JUMLAH
		2025	2026	2027	2028	2029	
025	KEMENTERIAN AGAMA (PROVINSI JAWA TIMUR)	91.054.251.000	50.161.847.000	54.174.794.760	58.508.778.341	63.189.480.608	317.089.151.709
025.01	Sekretariat Jenderal	81.771.735.000	43.370.874.000	46.840.543.920	50.587.787.434	54.634.810.428	277.205.750.782
025.01.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	50.000.000	50.000.000	54.000.000	58.320.000	62.985.600	275.305.600
5620	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	50.000.000	50.000.000	54.000.000	58.320.000	62.985.600	275.305.600
025.01.WA	Program Dukungan Manajemen	81.721.735.000	43.320.874.000	46.786.543.920	50.529.467.434	54.571.824.828	276.930.445.182
2098	Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	345.000	3.345.000	339.500.543	356.475.570	374.299.348	1.701.546.310
2099	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	3.345.000	3.345.000	1.037.100.803	1.088.955.843	1.143.403.635	5.197.856.330
2100	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	13.865.725.000	9.178.191.000	595.537.669.755	625.314.553.243	656.580.280.905	2.984.781.459.003
2101	Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	3.345.000	3.345.000	422.151.660	443.259.243	465.422.205	2.115.786.308
2102	Pembinaan Administrasi Perencanaan	11.690.000	6.690.000	841.394.925	883.464.671	927.637.905	4.216.996.001
2103	Pembinaan Administrasi Umum	814.806.000	703.159.000	40.962.558.420	43.010.686.341	45.161.220.658	205.300.673.819
2106	Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	3.345.000	3.345.000	393.026.918	412.678.263	433.312.177	1.969.815.707
6708	Dukungan Manajemen Pendidikan	67.019.134.000	33.419.454.000	3.625.383.614.423	3.806.652.795.144	3.996.985.434.901	18.170.097.952.917
025.03	Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam	4.741.331.000	4.483.972.000	4.842.689.760	5.231.104.941	5.648.513.336	24.947.611.037
025.03.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	3.377.300.000	3.562.220.000	3.847.197.600	4.155.973.408	4.487.371.281	19.430.062.289
2104	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	1.667.800.000	1.715.960.000	1.853.236.800	2.001.495.744	2.161.615.404	2.334.544.636
2122	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	44.500.000	48.060.000	51.904.800	56.057.184	60.541.759	261.063.743
2123	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	1.613.000.000	1.742.040.000	1.881.403.200	2.032.915.456	2.194.468.692	9.463.827.348
2124	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	52.000.000	56.160.000	60.652.800	65.505.024	70.745.426	305.063.250
025.03.WA	Program Dukungan Manajemen	1.364.031.000	921.752.000	995.492.160	1.075.131.533	1.161.142.055	5.517.548.748
2125	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	1.364.031.000	921.752.000	995.492.160	1.075.131.533	1.161.142.055	5.517.548.748

PROGRAM / KEGIATAN	KODE	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN					JUMLAH
		2025	2026	2027	2028	2029	
025.04	Ditjen Pendidikan Islam	4.374.000.000	4.153.261.000	4.485.521.880	4.844.363.630	5.231.912.721	23.089.059.231
025.04.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	3.285.250.000	3.230.601.000	3.489.049.080	3.768.173.006	4.069.626.847	17.842.699.933
2129	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	3.285.250.000	3.230.601.000	3.489.049.080	3.768.173.006	4.069.626.847	17.842.699.933
025.04.WA	Program Dukungan Manajemen	1.088.750.000	922.660.000	996.472.800	1.076.190.624	1.162.285.874	5.246.359.298
2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	1.088.750.000	922.660.000	996.472.800	1.076.190.624	1.162.285.874	425.176.625.673
025.09	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	167.185.000	180.559.800	195.004.584	210.604.951	227.453.346	980.807.681
025.09.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	25.017.000	27.018.360	29.179.829	31.514.215	34.035.352	146.764.756
2126	Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	1.320.000	1.425.600	1.539.648	1.662.820	1.795.845	7.743.913
2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri	15.752.000	17.012.160	18.373.133	19.842.983	21.430.422	92.410.698
2148	Pembinaan Haji	7.945.000	8.580.600	9.267.048	10.008.412	10.809.085	46.610.145
025.09.WA	Program Dukungan Manajemen	142.168.000	153.541.440	165.824.755	179.090.736	193.417.994	834.042.925
2150	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	142.168.000	153.541.440	165.824.755	179.090.736	193.417.994	34.025.019.305

BAB IV

PENUTUP

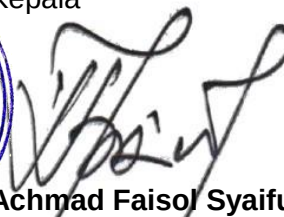
Demikian Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang Tahun 2025-2029 ini disusun dengan seksama dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penyusunan Rencana Strategis bagi unit kerja khususnya unit kerja Eselon IV di lingkungan Kementerian Agama. Diharapkan Rencana Strategis ini dapat menjadi pedoman dan acuan bagi setiap unit kerja seksi-seksi dalam melaksanakan kegiatan 5 tahun kedepan serta bagi unit kerja yang berada dibawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang untuk menyusun Rencana Program Kerja sebagai bentuk pelaksanaan kegiatan yang terstruktur.

Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama Republik Indonesia atas bimbingannya dalam menyusun Renstra ini. Dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang dengan baik. Semoga dengan Rencana Strategis ini dapat menjadikan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang menjadi lebih baik. Aamiin.

Lumajang, 15 Desember 2025

Kepala




Achmad Faisol Syaifullah, S.Ag., MH.
NIP.197711182009011007

LAMPIRAN :

Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Rencana Strategis Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Lumajang Tahun 2025-2029

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
BIDANG AGAMA														
025.03	Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam								4.741.331.000	2.637.712.000	2.848.728.960	3.076.627.278	3.322.757.460	16.627.156.698
025.03.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama								3.377.300.000	1.715.960.000	1.853.236.800	2.001.495.744	2.161.615.404	11.109.607.948
2104	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah								1.667.800.000	1.715.960.000	1.853.236.800	2.001.495.744	2.161.615.404	9.400.107.948
2122	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf								44.500.000	48.060.000	51.904.800	56.057.184	60.541.758	261.063.742
2123	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam								1.613.000.000	1.742.040.000	1.881.403.200	2.031.915.456	2.194.468.692	9.462.827.348
2124	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah								52.000.000	56.160.000	60.652.800	65.505.024	70.745.425	305.063.249
025.03.WA	Program Dukungan Manajemen								1.364.031.000	921.752.000	995.492.160	1.075.131.533	1.161.142.055	5.517.548.748
2125	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam								1.364.031.000	921.752.000	995.492.160	1.075.131.533	1.161.142.055	5.517.548.748
SK.1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama													
IKSK.1.1	Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00	Nilai	76,47	83,00	83,20	83,40	83,60	83,80						
IKSK.1.2	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	Persen	0		33,80	50,70	67,60	100,00						
IKSK.1.3	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Persen	34,27	44,45	53,90	53,93	55,10	56,84						
IKSK.1.4	Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWIPESPER ANHUTSAWA DHARMA GITA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA	Persen	32,275	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5						
IKSK.1.5	Persentase peningkatan peserta event seni budaya	Persen	6,5	9	9,1	9,2	9,3	9,4						
IKSK.1.6	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Persen	34,43	35,5	39,5	40,5	43,5	46,5						
SK.2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak													

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.2.1	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Persen	82,00	84,50	85,5	86,5	86,59	87,50						
IKSK.2.2	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Rasio	1 : 5	1 : 5	1 : 5	1 : 5	1 : 5	1 : 5						
IKSK.2.3	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	Persen	70	44,5	45,4	46,7	47,5	48,5						
IKSK.2.4	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	Persen	0,4	4,1	4,3	4,5	4,6	4,9						
IKSK.2.5	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	Persen	16,4	17,5	18,4	18,8	19,3	19,5						
IKSK.2.6	Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	Persen	17,3	18,2	18,5	19,2	19,5	19,4						
IKSK.2.7	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	Persen	40,5	45,5	50,5	55,8	58,5	60,5						
IKSK.2.8	Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan	Persen	31,5	32,5	33,5	36,5	45,5	48,5						
IKSK.2.9	Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	Persen	31,77	16,5	25,5	30,4	37,5	42,5						
IKSK.2.10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan	Persen		0,84	1,5	3,4	4,2	6,5						
IKSK.2.11	Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	Persen	7,5	9,2	15,5	22,5	29,5	35,5						
025.09	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah								167.185.000	180.559.800	195.004.584	210.604.950	227.453.347	980.807.681
025.09.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama								25.017.000	27.018.360	29.179.829	31.514.215	34.035.352	146.764.756
2126	Pembinaan Umrah dan Haji Khusus								1.320.000	1.425.600	1.539.648	1.662.820	1.795.845	7.743.913
2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri								15.752.000	17.012.160	18.373.133	19.842.983	21.430.422	92.410.698
2148	Pembinaan Haji								7.945.000	8.580.600	9.267.048	10.008.412	10.809.085	46.610.145
025.09.WA	Program Dukungan Manajemen								142.168.000	153.541.440	165.824.755	179.090.736	193.417.994	834.042.925
2150	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah								142.168.000	153.541.440	165.824.755	179.090.736	193.417.994	834.042.925
SK.3	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji													
IKSK. 3.1	Persentase calon jamaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	Persen		5,00										
SK. 4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji													

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK. 4.1	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	Persen		80,00										
IKSK. 4.2	Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu			86,00										
SK. 5	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji													
IKSK. 5.1	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar	Persen		87,50										
SK. 6	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji													
IKSK. 6.1	Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	Persen		80,00										
IKSK. 6.2	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	Persen		70,00										
SK.7	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah													
IKSK. 7.1	Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A);	Persen												
	a. Lembaga penyelenggara haji khusus;			82,05										
	b. Lembaga penyelenggara umrah			96,01										
BIDANG PENDIDIKAN														
025.04	Ditjen Pendidikan Islam								4.374.000.000	4.153.261.000	4.485.521.880	4.844.363.630	5.231.912.721	23.089.059.231
025.04.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun								3.285.250.000	3.230.601.000	3.489.049.080	3.768.173.006	4.069.626.847	17.842.699.933
2129	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah								3.285.250.000	3.230.601.000	3.489.049.080	3.768.173.006	4.069.626.847	17.842.699.933
025.04.WA	Program Dukungan Manajemen								1.088.750.000	922.660.000	996.472.800	1.076.190.624	1.162.285.874	5.246.359.298
2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam								1.088.750.000	922.660.000	996.472.800	1.076.190.624	1.162.285.874	5.246.359.298
SK.8	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan													
IKSK.8.1	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhlasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik	Persen												
SK.9	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas													

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.9.1	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhlasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Persen	20,5	33,5	35,5	37,5	40,4	43,2						
IKSK.9.4	Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalaya/Nava Dhammasekha)	Persen	40,5	52,5	58,5	60,5	64,5	67,5						
IKSK.9.5	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	Persen	19,98	21,5	26,5	31,5	39,55	46,6						
IKSK.9.6	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	Jumlah												
SK.10	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	-												
IKSK.10.1	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk													
	a literasi membaca		90,23	90,25	90,38	90,5	90,63	90,75						
	b numerasi		93,69	93,82	93,94	94,07	94,19	94,32						
IKSK.10.2	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Persen	30,5	33,6	40,5	45,5	50,6	54,5						
IKSK.10.3	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Persen	54,4	63,5	65,5	67,2	69,2	71,14						
IKSK.10.4	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Jumlah												
IKSK.10.5	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Persen	20,5	22,83	23,13	23,44	23,71	23,99						
IKSK.10.6	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Persen	27,6	23,8	47,03	49,22	50,46	53,7						
IKSK.10.7	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	Persen												
IKSK.10.8	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	Persen	2,8	2,17	2,54	2	2,18	2,4						
IKSK.10.9	Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	Persen												

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.10.10	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Persen	0,18	0,47	0,49	0,62	0,65	0,72						
IKSK.10.11	Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Persen												
IKSK.10.12	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	Persen		14,78	20,89	26,87	28,65	33,7						
SK.11	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan													
IKSK.11.1	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	15,25	16,26	41,5	48,82	53,8	58,37						
IKSK.11.2	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	Rasio	1 : 13	1 : 13	1 : 13	1 : 14	1 : 14	1 : 15						
IKSK.11.3	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Persen	43,4	34,5	34,37	36,06	40,81	45,52						
IKSK.11.4	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	38,1	38,8	54,54	65,37	72,48	79,81						
IKSK.11.5	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Persen	10,5	10,5	11,5	19,68	29,27	40,52						
IKSK.11.6	Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	Persen												
IKSK.11.7	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Persen	24,7	15,78	17,89	19	22,12	24,25						
IKSK.11.8	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil	Persen												
IKSK.11.9	Persentase guru yang meningkat jenjang karir	Persen		5,3	7,31	9,32	11,32	13,33						
IKSK.11.10	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	Persen												
IKSK.11.11	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Persen		51,9	54,83	41,16	38,33	30,33						
IKSK.11.12	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Persen	26,14	33,95	51,44	52,3	53,19	70,79						
BIDANG TATA KELOLA														
025.01	Sekretariat Jenderal								81.771.735.000	43.370.874.000	46.840.543.920	50.587.787.434	54.634.810.428	277.205.750.782
025.01.WA	Program Dukungan Manajemen								81.721.735.000	43.320.874.000	46.840.543.920	50.587.787.434	54.634.810.428	277.205.750.782
2098	Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN								345.000	3.345.000	3.612.600	3.901.608	4.213.737	15.417.945

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK.16	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum													
IKSK.16.1	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	Persen	95,00	95,00	95,71	96,00	96,29	96,43						
IKSK.16.2	Persentase rekomendasi izin orang asing	Persen	76,15	77,15	77,44	77,74	78,03	78,32						
2099	Pembinaan Administrasi Kepegawain								3.345.000	3.345.000	3.612.600	3.901.608	4.213.737	18.417.945
SK.15	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)													
IKSK.15.1	Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	56,18	62,29	63,35	64,40	65,36	66,07						
IKSK.15.2	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Persen		65,97	69,73	73,28	77,24	80,89						
IKSK.15.3	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/inspirasi	Jumlah												
2100	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN								13.865.725.000	9.178.191.000	9.912.446.280	10.705.441.982	11.561.877.341	55.223.681.603
SK.17	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa													
IKSK.17.1	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	Persen	45	46,2	53,8	59,7	66	69,3						
IKSK.17.2	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	Persen												
IKSK.17.3	Nilai Layanan Kesehatan	Nilai	72,00	75,00	78,00	81,00	84,00	86,00						
2101	Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana								3.345.000	3.345.000	3.612.600	3.901.608	4.213.737	18.417.945
SK.13	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi													
IKSK.13.1	Persentase Aplikasi SIPKA satuan kerja sesuai standar	Persen		75	76,08	77,17	78,03	78,78						
IKSK.13.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	Nilai		25,29	26,20	27,12	28,03	33,95						
2102	Pembinaan Administrasi Perencanaan								11.690.000	6.690.000	7.225.200	7.803.216	8.427.473	41.835.889
SK.12	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran													
IKSK.12.1	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	92,72	91,84	92	92,17	92,34	92,51						
2103	Pembinaan Administrasi Umum								814.806.000	703.159.000	759.411.720	820.164.658	885.777.830	3.983.319.208
SK.14	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN													

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.14.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai		77,14	77,40	77,72	78,06	78,33						
IKSK.14.2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persen		68,19	69,68	71,99	74,41	77,19						
IKSK.14.3	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Persen	93,33	93,65	95,24	96,83	98,41	99,80						
IKSK.14.4	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Persen	98,5	99,5	99,6	99,7	99,8	99,9						
IKSK.14.5	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Persen	70,11	70,33	71,86	75,39	78,03	80,33						
2106	Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan								3.345.000	3.345.000	3.612.600	3.901.608	4.213.737	18.417.945
SK.18	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi													
IKSK.18.1	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	Tingkat	56,5	57,27	65,82	67,19	68,56	69,82						
IKSK.18.2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	Persen	24,5											
SK.19	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi													
IKSK.19.1	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2,05											
IKSK.19.2	Persentase data statistik yang dipublikasi	Persen	2,11	2,12	2,33	2,63	2,75	2,88						
6708	Dukungan Manajemen Pendidikan								67.019.134.000	33.419.454.000	36.093.010.320	38.980.451.146	42.098.887.237	217.610.936.703
SK.20	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan													
IKSK.20.1	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	Persen	72,5	73,60	74,95	75,79	76,13	76,63						
IKSK.20.2	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama	Persen	1,36	1,67	1,97	2,00	2,14	2,20						
IKSK.20.3	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persen	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00						
IKSK.20.4	Persentase peningkatan akses dan kualitas Informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persen		22,58	21,08	21,77	21,97	23,03						
IKSK.20.5	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK	Persen	65,05	68,60	70,80	73,00	74,00	75,00						
IKSK.20.6	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	Persen		69,34	71,22	72,39	75,91	79,67						
IKSK.20.7	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai		92,84	93	93,17	93,34	93,51						

Lampiran II : Metadata

BIDANG AGAMA			
Metadata IKSK.1.1. : Persentase Provinsi yang memperoleh nilai kerukunan umat beragama dengan kategori sangat tinggi			
NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	:	Persentase Provinsi yang memperoleh nilai kerukunan umat beragama dengan kategori sangat tinggi
3	Konsep/Definisi	:	Kanwil dan Kemenag Kabupaten/Kota mendapat nilai 80 dalam IKUB
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase Kanwil dan Kemenag Kab/Kota yang mendapat nilai IKUB diatas 80, maka semakin baik tingkat Kerukunan Umat beragama
5	Metode / Rumus Perhitungan	:	$\text{Persentase} = (\text{Jumlah provinsi dengan nilai kerukunan umat beragama kategori sangat tinggi} \div \text{Jumlah total provinsi}) \times 100\%$
6	Nama Variabel Pembangun	:	1. Jumlah provinsi dengan nilai kerukunan umat beragama kategori sangat tinggi 2. Jumlah total provinsi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama
8	Ukuran/Satuan	:	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Berdasarkan kategori nilai: Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah
11	Level Estimasi	:	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	-

Metadata IKSK.1.2 : Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama
2	Nama Indikator	: Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS
3	Konsep/Definisi	: Persentase KUA penyelenggara Early Warning Sistem (EWS) mengukur proporsi KUA yang aktif menjalankan deteksi dini konflik keagamaan, mencakup pemantauan isu, pelaporan potensi konflik, koordinasi lintas sektor, dan rekomendasi penanganan dini.
4	Interpretasi	: Semakin tinggi persentase KUA yang melaksanakan EWS, semakin kuat kapasitas kelembagaan di tingkat akar rumput dalam menjaga stabilitas dan kerukunan umat beragama
5	Metode / Rumus Perhitungan	: Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah KUA yang aktif menyelenggarakan Early Warning Sistem (EWS) b : Jumlah total KUA secara nasional
6	Nama Variabel Pembangun	: Persentase KUA penyelenggara Early Warning Sistem
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: 1. Implementasi Sistem Informasi EWS Berbasis KUA 2. Pelatihan Petugas KUA dalam Pemantauan Isu Keagamaan 3. Pembentukan Forum Komunikasi Keagamaan di Tingkat Kecamatan 4. Pemetaan Wilayah Rawan Konflik Keagamaan 5. Rekomendasi Tindak Lanjut atas Potensi Gangguan Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	: Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: 1. KUA dengan Petugas Khusus EWS 2. KUA dengan Penyuluh/Penghulu 3. KUA yang Bekerja Sama dengan Lembaga Mitra
11	Level Estimasi	: 1. Nasional, 2. Provinsi, 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

IKSK.1.3 : Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama
2	Nama Indikator	: Persentase peningkatan dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS
3	Konsep/Definisi	: Dialog kerukunan yang difasilitasi oleh Kementerian Agama atau mitra strategis bertujuan untuk meredam potensi konflik dan memperkuat moderasi beragama. Dalam kegiatan ini, dihasilkan rekomendasi berbasis EWS (sistem peringatan dini) yang dapat digunakan dalam mitigasi konflik dan penguatan kohesi sosial.
4	Interpretasi	: Persentase ini menunjukkan seberapa besar peningkatan jumlah dialog kerukunan yang terfasilitasi dari tahun sebelumnya. Makin tinggi persentasenya, makin kuat perhatian terhadap pencegahan dini konflik keagamaan di masyarakat Islam.
5	Metode / Rumus Perhitungan	: $\text{Persentase peningkatan} = ((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang difasilitasi pada tahun berjalan b = Jumlah dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang difasilitasi pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	: 1. Jumlah kegiatan dialog kerukunan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu tahun berjalan 2. Jumlah kegiatan dialog kerukunan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: Fasilitasi Dialog Kerukunan Umat Beragama dan Perumusan Rekomendasi Early Warning Sistem
8	Ukuran/Satuan	: Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Berdasarkan lokasi dan skala kegiatan: 1. Tingkat lokal (kabupaten/kota). 2. Tingkat provinsi. 3. Tingkat nasional

11	Level Estimasi	:	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	-
IKSK.1.4 : Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/PESPERANI/UTSAWA DHARMA GITA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA			
NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	:	Persentase peningkatan audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha
3	Konsep/Definisi	:	Persentase peningkatan jumlah audiens atau penonton kegiatan MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha yang diukur dari perbandingan jumlah audiens tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, baik secara langsung (luring) maupun daring (online streaming)
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan peningkatan minat dan partisipasi masyarakat dalam menyaksikan pelaksanaan MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha, baik di lokasi kegiatan maupun melalui media digital
5	Metode / Rumus Perhitungan	:	$\frac{(a - b)}{b} \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun berjalan b : Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	:	1. Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun berjalan 2. Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	Penyelenggaraan MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha Tingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota
8	Ukuran/Satuan	:	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	:	Tahunan

10	Klasifikasi	:	1. Audiens Langsung (Luring). 2. Audiens Daring (Streaming) 3. Audiens Media Penyiaran (TV/Radio)
11	Level Estimasi	:	1. Nasional. 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	-

IKSK.1.5 : Persentase peningkatan peserta event seni budaya

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	:	Persentase peningkatan jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/perayaan agama bernafaskan agama (MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha)
3	Konsep/Definisi	:	Suatu ukuran untuk menghitung jumlah peningkatan peserta pada event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/ perayaan agama dibandingkan dengan jumlah peserta pada tahun sebelumnya
4	Interpretasi	:	Semakin meningkat persentase jumlah peserta maka semakin luas syiar agama pada umat
5	Metode / Rumus Perhitungan	:	1. Jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/ perayaan keagamaan 2. Jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/ perayaan keagamaan tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	:	Rumusan = $[(a-b) / b] \times 100\%$ a = Jumlah peserta tahun ini b = Jumlah peserta tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	1. Jumlah peserta tahun ini 2. Jumlah peserta tahun sebelumnya
8	Ukuran/Satuan	:	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	:	Pendataan dan Evaluasi Event Keagamaan dan Seni Budaya Keagamaan

10	Klasifikasi	:	1. Berkurang = < 0% 2. Meningkatkan = 0%-5% 3. Meningkatkan Pesat = >5%
11	Level Estimasi	:	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	-
IKSK.1.6 : Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan			
NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	:	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan
3	Konsep/Definisi	:	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah mendapatkan program pembinaan atau pendampingan pemerintah untuk meningkatkan tata kelola kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak lembaga agama dan sosial keagamaan yang mendapatkan pembinaan kelembagaan untuk meningkatkan kapasitas, kinerja, serta akuntabilitas dalam menjalankan fungsi sosial-keagamaan
5	Metode / Rumus Perhitungan	:	(a / b) x 100% Keterangan: a : Jumlah lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan/pembinaan b : Jumlah total lembaga agama dan sosial keagamaan
6	Nama Variabel Pembangun	:	1. Jumlah lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan/pembinaan 2. Jumlah total lembaga agama dan sosial keagamaan yang terdaftar

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	1). Program Pendampingan Tata Kelola Kelembagaan Keagamaan. 2). Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Lembaga Keagamaan. 3). Pelatihan Manajemen Kelembagaan Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	:	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	1. Pelatihan Tata Kelola Kelembagaan Keagamaan 2. Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Lembaga Keagamaan 3. Pendampingan Administrasi dan Keuangan Lembaga Keagamaan 4. Workshop Penguatan Kapasitas Organisasi Keagamaan
11	Level Estimasi	:	1. Nasional, 2. Provinsi, 3. Kab/Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	-

IKSK.2.1 : Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	:	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)
3	Konsep/Definisi	:	Nilai Kinerja penyuluh agama mencerminkan capaian kinerja penyuluh dalam menjalankan tugasnya, yang dinilai melalui tiga aspek utama: 1. Laporan Harian: Kegiatan penyuluhan yang dilaporkan secara periodik. 2. Konten Digital: Produksi dan penyebaran konten dakwah/penyuluhan berbasis media digital. 3. Kediklatan: Partisipasi dalam pelatihan atau diklat peningkatan kapasitas.
4	Interpretasi	:	Angka ini menunjukkan proporsi penyuluh agama yang menunjukkan kinerja baik berdasarkan evaluasi dari tiga aspek tersebut. Semakin tinggi persentasenya, semakin efektif peran penyuluh agama dalam menyampaikan nilai-nilai keagamaan secara produktif dan profesional.

5	Metode / Rumus Perhitungan	:	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah penyuluh agama yang memperoleh nilai kinerja dengan kategori baik b = Total jumlah penyuluh agama yang dievaluasi kinerjanya
6	Nama Variabel Pembangun	:	1. Data hasil evaluasi kinerja penyuluh agama (aspek laporan, konten digital, dan diklat) 2. Jumlah total penyuluh agama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	Evaluasi Kinerja Penyuluh Agama
8	Ukuran/Satuan	:	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Berdasarkan agamanya: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
11	Level Estimasi	:	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	-

IKSK.2.2 : Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	:	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
3	Konsep/Definisi	:	Pengukuran data kelompok sasaran yang dimilki Penyuluh Agama Islam PNS, PPPK dan Non PNS yang mendapatkan bimbingan penyuluhan
4	Interpretasi	:	Bertambahnya jumlah penyuluh agama islam maka akan lebih banyak lagi kelompok sasaran masyarakat yang terbimbing dan mendapatkan layanan advokasi keagamaan

5	Metode / Rumus Perhitungan	:	$x = b / a$ sehingga rasionya menjadi 1:x Keterangan: a = Jumlah penyuluh agama yang aktif b = Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
6	Nama Variabel Pembangun	:	1. Jumlah penyuluh agama yang aktif 2. Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	1. Layanan bimbingan penyuluhan 2. Layanan advokasi 3. Layanan keagamaan lainnya
8	Ukuran/Satuan	:	Rasio
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Kelompok sasaran umum, khusus dan medsos
11	Level Estimasi	:	Nasional, Provinsi, Kab/Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	-

IKSK.2.3 : Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	:	Persentase penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi
3	Konsep/Definisi	:	Persentase ini mengukur proporsi penghulu yang telah mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan lulus, sehingga memperoleh sertifikat kompetensi sesuai standar yang ditetapkan. Sertifikasi ini bertujuan memastikan penghulu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam menjalankan tugas pelayanan pernikahan dan pembinaan masyarakat.
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase penghulu bersertifikat kompetensi, semakin terjamin kualitas layanan pernikahan dan pembinaan keagamaan di masyarakat. Angka ini juga mencerminkan keberhasilan program peningkatan kapasitas dan profesionalisme penghulu.

5	Metode / Rumus Perhitungan	:	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi b = Total jumlah penghulu yang terdata
6	Nama Variabel Pembangun	:	1. Data jumlah penghulu yang lulus uji kompetensi dan memperoleh sertifikat 2. Jumlah total penghulu yang terdata
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	Program Sertifikasi Kompetensi Penghulu
8	Ukuran/Satuan	:	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	-
11	Level Estimasi	:	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	-

IKSK.2.4 : Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	:	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah
3	Konsep/Definisi	:	BRUS adalah bimbingan yang diberikan kepada remaja dalam rangka membekali pengetahuan dan ketrampilan yang bertujuan untuk membantu remaja dalam mengembangkan potensi diri dalam menghadapi tantangan dan membuat keputusan yang tepat. isu yang diangkat dari pelaksanaan bimbingan ini adalah cegah kawin anak, cegah seks pranikah, dan penyalahgunaan Napza serta kenakalan remaja lainnya. Berdasarkan data dari BPS 2024, Jumlah Remaja Usia 15-19 tahun adalah 22.122.887 anak. Catatan: Target Tahunan adalah jumlah target tahun lalu+tahun ini"
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi partisipasi remaja mengikuti bimbingan, semakin besar peran pemerintah dalam ikut serta membangun ketahanan keluarga

5	Metode / Rumus Perhitungan	:	Rumusan: $(a/b) \times 100\%$ Keterangan: A:Jumlah remaja yang mendapatkan bimbingan B: Jumlah remaja usia 15-19 tahun berdasarkan data BPS
6	Nama Variabel Pembangun	:	1. Jumlah remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah 2. Jumlah penduduk usia 15-19 tahun berdasar data BPS
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	1). Peningkatan SDM melalui Bimtek Fasilitator. 2). Penyiapan Peer Educator bagi madrasah/sekolah 3. Model Bimbingan bekerjasama dengan madrasah/sekolah/pondok pesantren dan lembaga
8	Ukuran/Satuan	:	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Eselon I
11	Level Estimasi	:	1. Nasional. 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	-

IKSK.2.5 : Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	:	Persentase peningkatan jumlah peristiwa nikah
3	Konsep/Definisi	:	Persentase peningkatan jumlah peristiwa nikah adalah indikator yang mengukur perubahan jumlah pernikahan yang tercatat dalam suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya.
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase ini, semakin besar kenaikan jumlah pernikahan yang terjadi dalam suatu wilayah atau periode tertentu. Sebaliknya, jika bernilai negatif, berarti terjadi penurunan jumlah pernikahan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

5	Metode / Rumus Perhitungan	:	$x = [(a - b) / b] \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode berjalan b = Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	:	1. Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode berjalan 2. Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	1. Sosialisasi Pernikahan Resmi 2. Kemudahan Akses Layanan Nikah 3. Revitalisasi Layanan KUA 4. Bimbingan Perkawinan 5. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan"
8	Ukuran/Satuan	:	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Berdasarkan agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
11	Level Estimasi	:	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	-

IKSK.2.6. : Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	:	Persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana
3	Konsep/Definisi	:	Ketersediaan sekaligus perbaikan Sarana dan Prasarana sebagai penunjang kegiatan pelayanan yang dilakukan untuk mempermudah aktivitas sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana maka semakin mudah akses pelayanan dan kenyamanan untuk masyarakat

5	Metode / Rumus Perhitungan	:	Rumusan: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = KUA yang sesuai dengan standar sarana dan prasarana b = KUA seluruh Indonesia
6	Nama Variabel Pembangun	:	1. Jumlah KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana 2. Jumlah KUA
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	1. Pembangunan KUA melalui SBSN 2. Revitalisasi KUA
8	Ukuran/Satuan	:	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Perhitungan Prioritas : 1. Lahan Kosong milik Kemenag/Hibah sudah sertifikat Kemenag 2. Rusak Berat (Milik Kemenag) dan Tidak dapat ditanggulangi dengan anggaran Rehab 3. Rusak Ringan namun jumlah rata-rata peristiwa nikah tinggi
11	Level Estimasi	:	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	:	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	-

IKSK.2.7 : Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	:	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat
3	Konsep/Definisi	:	Sertifikasi arah kiblat merupakan proses verifikasi dan penetapan arah kiblat oleh instansi berwenang untuk memastikan kesesuaian arah shalat di masjid atau musholla. Sertifikasi ini dilakukan berdasarkan metode hisab dan observasi yang akurat.
4	Interpretasi	:	Angka ini menunjukkan proporsi masjid/musholla yang telah memperoleh sertifikat arah kiblat. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak masjid/musholla yang telah terstandarisasi arah kiblatnya secara sah dan ilmiah.

5	Metode / Rumus Perhitungan	:	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah masjid/musholla yang bersertifikat arah kiblat b = Total jumlah masjid/musholla yang terdata
6	Nama Variabel Pembangun	:	1. Jumlah masjid/musholla bersertifikat arah kiblat 2. Jumlah total masjid/musholla
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	1. Masjid/musholla bersertifikat arah kiblat
8	Ukuran/Satuan	:	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Berdasarkan jenis masjid: Masjid Negara, Masjid Nasional, Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jami'.
11	Level Estimasi	:	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	-

IKSK.2.8 : Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	:	Persentase peningkatan kitab suci agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha yang disediakan
3	Konsep/Definisi	:	Persentase peningkatan kitab suci yang disediakan adalah ukuran perubahan jumlah kitab suci yang tersedia dalam suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya. Indikator ini mencerminkan upaya peningkatan akses terhadap literatur kitab suci bagi masyarakat.
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase peningkatan ini, semakin banyak buku keagamaan yang tersedia, yang dapat mendukung peningkatan pemahaman keagamaan dan literasi masyarakat. Jika persentase rendah atau negatif, hal ini menunjukkan stagnasi atau penurunan dalam penyediaan buku keagamaan, yang dapat berdampak pada keterbatasan akses terhadap sumber bacaan keagamaan.

5	Metode / Rumus Perhitungan	:	Rumusan = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun berjalan b = Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	:	1. Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun berjalan 2. Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	1). Pengadaan dan Distribusi Kitab Suci . 2). Digitalisasi dan Akses Kitab Suci Online. 3). Fasilitas Cetak dan Penerjemahan Kitab Suci. 4). Kemitraan dengan Penerbit dan Lembaga Keagamaan. 5). Monitoring Kebutuhan dan Ketersediaan Kitab Suci
8	Ukuran/Satuan	:	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Berdasarkan kitab suci masing-masing agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
11	Level Estimasi	:	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data?	:	-

IKSK.2.9 : Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	:	Persentase peningkatan naskah dan buku keagamaan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha yang layak edar/sesuai kaidah
3	Konsep/Definisi	:	Naskah dan buku keagamaan yang dinyatakan layak edar adalah naskah/buku yang telah melalui proses penilaian oleh lembaga atau otoritas berwenang (misalnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Direktorat Urusan Agama, atau lembaga keagamaan masing-masing) dan dinyatakan sesuai dengan kaidah ajaran agama, nilai-nilai moderasi, serta peraturan perundangan.
4	Interpretasi	:	Indikator ini menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan jumlah naskah/buku keagamaan yang memenuhi standar kelayakan edar. Makin tinggi persentasenya, makin banyak literatur keagamaan yang berkualitas, sesuai kaidah, dan moderatif yang tersedia di masyarakat.

5	Metode / Rumus Perhitungan	:	Persentase peningkatan = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun berjalan b = Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	:	1. Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun berjalan 2. Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	Penilaian Kelayakan Naskah dan Buku Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	:	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Berdasarkan agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha
11	Level Estimasi	:	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	-

IKSK.2.10 : Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama dan BPJPH
2	Nama Indikator	:	Persentase rekomendasi hasil pemantauan pengawas halal yang diterbitkan
3	Konsep/Definisi	:	Rekomendasi hasil pemantauan merupakan tindak lanjut dari kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal. Rekomendasi ini diterbitkan oleh pengawas halal sebagai hasil evaluasi terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap standar halal yang berlaku.
4	Interpretasi	:	Angka ini mencerminkan proporsi rekomendasi yang berhasil diterbitkan dari seluruh hasil pemantauan yang dilakukan. Semakin tinggi persentasenya, semakin optimal pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan dalam sistem jaminan produk halal.

5	Metode / Rumus Perhitungan	:	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah rekomendasi hasil pemantauan yang diterbitkan b = Jumlah total hasil pemantauan yang dilakukan
6	Nama Variabel Pembangun	:	1. Jumlah rekomendasi hasil pemantauan yang diterbitkan 2. Jumlah total hasil pemantauan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	Pemantauan dan Evaluasi Pengawas Halal
8	Ukuran/Satuan	:	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Berdasarkan jenis usaha
11	Level Estimasi	:	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	-

IKSK.2.11 : Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	:	Persentase jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan Islam terintegrasi basis data terpadu nasional
3	Konsep/Definisi	:	Integrasi pemanfaatan penerima manfaat penyaluran dana zakat, infak, sedekah dan pemanfaatan wakaf dengan dapat penduduk miskin yang ada pada sistem data kemiskinan di daerah. Jumlah data mustahiq yang selaras dengan data kemiskinan regsosek
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi penerima manfaat dari dana sosial keagamaan, maka semakin produktif peran dana sosial keagamaan yang dikembangkan untuk pengentasan kemiskinan, dan data saling terintegrasi
5	Metode / Rumus Perhitungan	:	Rumusan = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan yang terintegrasi dengan Regsosek b = Jumlah penduduk miskin pada Regsosek

6	Nama Variabel Pembangun	:	1. Jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan yang terintegrasi dengan Regsosek 2. Jumlah penduduk miskin pada Regsosek
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	1). Pendataan dan Verifikasi Mustahik 2). Integrasi Data dengan Basis Data Terpadu Nasional. 3). Penyelarasan Kriteria Mustahik dengan Standar Nasional. 4). Digitalisasi dan Pemutakhiran Data Mustahik. 5). Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Sosial
8	Ukuran/Satuan	:	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	1). Mustahik zakat 2). Calon penerima dana sosial keagamaan
11	Level Estimasi	:	1. Nasional 2. Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	-

BIDANG PENDIDIKAN

IKSK.4.2 : Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan umum yang memperoleh peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan melalui dukungan sarana ibadah dan fasilitas pendidikan keagamaan
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan proporsi satuan pendidikan umum yang mengalami peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan karena adanya penguatan sarana ibadah dan fasilitas pendidikan keagamaan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan umum yang difasilitasi dan didukung dalam penguatan infrastruktur keagamaan guna meningkatkan mutu pembelajaran agama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a) = Jumlah satuan pendidikan umum yang memperoleh peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan melalui dukungan sarana. b) = Jumlah total satuan pendidikan umum
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan umum yang memperoleh dukungan sarana 2. Jumlah total satuan pendidikan umum
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahun
10	Klasifikasi	
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.6.11 : Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama
3	Konsep/Definisi	Persentase pertumbuhan jumlah lulusan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk guru mata pelajaran agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu) dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. PPG agama adalah program pendidikan setelah program sarjana yang mempersiapkan lulusan menjadi guru profesional pada bidang studi pendidikan agama.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa besar peningkatan jumlah lulusan program PPG agama dari tahun ke tahun. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru agama yang telah menempuh jalur profesional melalui PPG, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan agama pada semua jenjang satuan pendidikan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase peningkatan = $[(a - b) / b] \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PPG agama pada tahun berjalan b = Jumlah lulusan PPG agama pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama pada tahun berjalan 2. Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama pada tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyelenggaraan program Pendidikan Profesi Guru agama oleh perguruan tinggi penyelenggara PPG 2. Pendataan kelulusan PPG agama yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.6.12 : Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan
3	Konsep/Definisi	Persentase jumlah rekomendasi terkait pengadaan (penambahan) dan pemerataan distribusi guru pendidikan agama yang diterbitkan berdasarkan analisis rencana kebutuhan guru terhadap total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah telah menindaklanjuti hasil perencanaan kebutuhan guru agama dengan menerbitkan rekomendasi formal untuk pengadaan dan pemerataan distribusi guru agama. Persentase yang tinggi menunjukkan proses perencanaan kebutuhan guru agama berjalan baik dan direspons dengan penerbitan rekomendasi kebijakan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama yang diterbitkan berbasis rencana kebutuhan b = Total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun dan siap ditindaklanjuti
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama yang diterbitkan berbasis rencana kebutuhan. 2). Total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan rencana kebutuhan guru agama berdasarkan analisis data kebutuhan dan ketersediaan guru 2. Penerbitan rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama oleh kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.6.7 : Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase guru agama dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik
3	Konsep/Definisi	Persentase guru mata pelajaran agama dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang memperoleh nilai minimal kategori baik pada dimensi moderasi beragama dalam rapor hasil Asesmen Kompetensi. Nilai moderasi beragama ini menggambarkan sejauh mana guru agama dan tenaga kependidikan memiliki sikap keberagamaan yang moderat, toleran, anti-kekerasan, dan menghargai kebhinekaan.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat internalisasi nilai-nilai moderasi beragama pada guru agama dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil asesmen kompetensi. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru agama dan tenaga kependidikan yang memiliki pandangan keagamaan yang inklusif, toleran, dan selaras dengan prinsip moderasi beragama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah guru agama dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal kategori baik pada rapor hasil Asesmen Kompetensi b = Total guru agama dan tenaga kependidikan yang mengikuti Asesmen Kompetensi
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru agama dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal kategori baik 2. Total guru agama dan tenaga kependidikan yang mengikuti Asesmen Kompetensi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi oleh kementerian/lembaga terkait yang memuat penilaian moderasi beragama 2. Rekapitulasi hasil rapor Asesmen Kompetensi guru agama dan tenaga kependidikan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.6.2 : Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Rasio guru madrasah terhadap siswa yang memenuhi SNP
3	Konsep/Definisi	Perbandingan jumlah guru pada madrasah dengan jumlah siswa di madrasah tersebut, yang menunjukkan sejauh mana rasio ini memenuhi ketentuan rasio ideal sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan untuk jenjang pendidikan tertentu.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur ketersediaan guru di madrasah dalam melayani siswa secara optimal sesuai standar minimal yang diatur dalam SNP. Rasio yang memenuhi SNP mencerminkan terpenuhinya standar layanan pendidikan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan efektif.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rasio = 1 : (Jumlah siswa / Jumlah guru) (Hasil rasio kemudian dibandingkan dengan rasio maksimal sesuai SNP pada masing-masing jenjang)
6	Nama Variabel Pembangunan	1. Jumlah guru madrasah 2. Jumlah siswa madrasah
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	1. Pendataan jumlah guru madrasah oleh kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah 2. Pendataan jumlah siswa madrasah pada sistem administrasi pendidikan
8	Ukuran/Satuan	Rasio
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan madrasah: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.6.3 : Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal

3	Konsep/Definisi	Persentase tenaga kependidikan selain guru, seperti kepala madrasah/sekolah, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga kebersihan, yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan dan kompetensi kerja sesuai ketentuan standar nasional atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan standar minimal kualifikasi pendidikan dan kompetensi bagi tenaga kependidikan lainnya di satuan pendidikan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin baik kualitas SDM pendukung pendidikan dalam menjalankan tugas layanan administrasi, manajemen, dan teknis penunjang proses belajar mengajar.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dan sertifikasi kompetensi. b) = Total jumlah tenaga kependidikan lainnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dan sertifikasi kompetensi 2. Jumlah tenaga kependidikan lainnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Verifikasi data kualifikasi pendidikan dan kompetensi tenaga kependidikan melalui sistem informasi pendidikan 2. Pendataan dan penilaian kesesuaian dengan standar minimal yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga terkait 3. Pemberian bantuan pendidikan 4. Peningkatan pelatihan dan pendidikan administrasi dan teknis sesuai jabatan fungsional
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.6.5 : Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil
3	Konsep/Definisi	Persentase guru pada satuan pendidikan yang memperoleh nilai minimal predikat terampil pada rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG). AKG adalah asesmen yang dilakukan untuk mengukur kompetensi pedagogik dan profesional guru sesuai standar kompetensi yang ditetapkan.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kualitas kompetensi guru dalam aspek pedagogik dan profesional telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru yang memiliki kemampuan mengajar, merencanakan pembelajaran, mengelola kelas, serta menguasai materi ajar dengan baik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah guru yang memperoleh nilai rapor hasil AKG minimal predikat terampil b = Total jumlah guru yang mengikuti AKG
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru yang memperoleh nilai rapor hasil AKG minimal predikat terampil 2. Total jumlah guru yang mengikuti AKG
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Guru (AKG) oleh kementerian/lembaga terkait 2. Rekapitulasi dan publikasi hasil rapor AKG yang mencantumkan predikat kompetensi guru
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederaja
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.6.6 : Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil
3	Konsep/Definisi	Persentase Kepala Madrasah yang mendapatkan nilai minimal pada kategori terampil dalam rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK). AKK adalah asesmen yang dilakukan untuk mengukur kompetensi manajerial, supervisi akademik, kewirausahaan, dan kompetensi lainnya yang wajib dimiliki oleh kepala madrasah.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana kualitas kompetensi Kepala Madrasah telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak Kepala Madrasah yang memiliki kompetensi memadai dalam memimpin, mengelola satuan pendidikan, melakukan supervisi, serta mendorong inovasi di madrasah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil b = Total Kepala Madrasah yang mengikuti AKK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil 2. Total Kepala Madrasah yang mengikuti AKK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) oleh kementerian/lembaga terkait 2. Rekapitulasi hasil rapor AKK yang memuat predikat kompetensi Kepala Madrasah
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang madrasah: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.6.8 : Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan Kristen (AKP) minimal predikat terampil

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) minimal predikat terampil
3	Konsep/Definisi	Persentase pengawas madrasah yang memperoleh nilai minimal pada kategori terampil dalam rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP). AKP adalah asesmen yang dilakukan untuk mengukur kompetensi pengawas dalam melaksanakan supervisi akademik dan manajerial, pembinaan guru dan kepala madrasah, serta pemantauan pelaksanaan standar nasional pendidikan di madrasah.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kompetensi pengawas madrasah telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak pengawas madrasah yang memiliki kemampuan memadai dalam melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan mutu madrasah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah pengawas madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKP minimal predikat terampil b = Total pengawas madrasah yang mengikuti AKP
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah pengawas madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKP minimal predikat terampil 2. Total pengawas madrasah yang mengikuti AKP
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) oleh kementerian/lembaga terkait 2. Pengolahan dan rekapitulasi hasil rapor AKP pengawas madrasah
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang madrasah binaan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.6.9 : Persentase guru yang meningkat jenjang karir

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase guru yang meningkat jenjang karir
3	Konsep/Definisi	Persentase guru pada satuan pendidikan yang mengalami peningkatan jenjang karir, yaitu naik dari jabatan fungsional lama ke jabatan fungsional yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional guru. Jenjang karir guru umumnya meliputi: Guru Pertama, Guru Muda, Guru Madya, dan Guru Utama.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur perkembangan karir guru sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap peningkatan kompetensi, kinerja, dan pemenuhan angka kredit. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru yang terdorong untuk terus mengembangkan diri dan memenuhi persyaratan kenaikan pangkat/jabatan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah guru yang naik jenjang karir dalam periode tertentu b = Total guru pada periode yang sama
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru yang meningkat jenjang karir 2. Total jumlah guru
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penilaian dan penetapan angka kredit guru 2. Proses kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.6.10 : Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir
3	Konsep/Definisi	Persentase pengawas madrasah yang mengalami peningkatan jenjang karir, yaitu naik dari jabatan fungsional pengawas madrasah pada jenjang tertentu ke jenjang yang lebih tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional pengawas.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur perkembangan karir pengawas madrasah sebagai bentuk penghargaan terhadap peningkatan kompetensi, kinerja, dan pemenuhan angka kredit. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak pengawas madrasah yang terdorong untuk meningkatkan kualitas diri dan memenuhi persyaratan kenaikan jabatan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah pengawas satuan pendidikan yang meningkat jenjang karir dalam periode tertentu b = Total pengawas satuan pendidikan pada periode yang sama
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah pengawas satuan pendidikan yang meningkat jenjang karir 2. Total pengawas satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penilaian dan penetapan angka kredit pengawas pada satuan pendidikan 2. Proses kenaikan pangkat/jabatan fungsional pengawas madrasah oleh kementerian/lembaga terkait
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Pengawas pada Satuan Pendidikan Umum dengan kekhasan agama dan Satuan Pendidikan Keagamaan 2. Pengawas pada Satuan Pendidikan Umum
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.1 : Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a). literasi membaca. b). numerasi

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a literasi membaca b numerasi
3	Konsep/Definisi	Rata-rata skor capaian peserta didik pada asesmen kompetensi tingkat nasional (AKM) dalam aspek literasi membaca dan numerasi, yaitu kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan teks tertulis serta kemampuan berpikir menggunakan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari.
4	Interpretasi	Nilai rata-rata ini mencerminkan tingkat penguasaan kompetensi minimum siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Semakin tinggi skor rata-rata, semakin baik penguasaan literasi membaca dan numerasi siswa. Indikator ini berguna untuk melihat efektivitas pembelajaran dan kesetaraan hasil belajar di berbagai daerah dan jenjang pendidikan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai rata-rata = $(\sum \text{skor peserta didik}) / (\text{jumlah peserta didik})$
6	Nama Variabel Pembangun	1. Skor literasi membaca peserta didik 2. Skor numerasi peserta didik 3. Jumlah peserta didik yang mengikuti AKM
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Asesmen Kompetensi Madrasah tingkat nasional (AKM)
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Satuan Pendidikan
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Rapor Pendidikan Kemendikdasmen

IKSK.5.2 : Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi satuan pendidikan yang menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan melibatkan partisipasi aktif dari komunitas pendidikan (orang tua, komite sekolah, tokoh masyarakat, dll).
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan bahwa perencanaan program pendidikan di satuan pendidikan melibatkan pemangku kepentingan secara partisipatif, yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan relevansi program dengan kebutuhan lingkungan sekitar.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang menyusun RKT berbasis partisipasi komunitas b = Total jumlah satuan pendidikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan yang menyusun RKT berbasis partisipasi komunitas 2. Jumlah total satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.3 : Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan proporsi satuan pendidikan yang menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter ke dalam proses pembelajaran secara sistematis dan terstruktur.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan yang berkomitmen membentuk peserta didik berkarakter melalui integrasi dalam kurikulum dan kegiatan pembelajaran.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran b = Jumlah total satuan pendidikan yang menjadi sasaran
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter 2. Jumlah total satuan pendidikan sasaran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, dan MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.5 : Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan peningkatan capaian nilai-nilai karakter siswa yang diperoleh melalui partisipasi aktif dalam kegiatan kepramukaan.
4	Interpretasi	Angka ini mencerminkan seberapa besar pengaruh kegiatan kepramukaan dalam membentuk dan meningkatkan karakter siswa, terutama pada aspek disiplin, gotong royong, kepemimpinan, dan tanggung jawab.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = ((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Rata-rata nilai karakter siswa setelah mengikuti kegiatan kepramukaan b = Rata-rata nilai karakter siswa sebelum mengikuti kegiatan kepramukaan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Nilai karakter siswa pra-kegiatan kepramukaan 2. Nilai karakter siswa pasca-kegiatan kepramukaan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyelenggaraan pembelajaran berbasis pendidikan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila 2. Peningkatan kegiatan ekstrakurikuler dan kepramukaan 3. Fasilitasi peningkatan dan pendampingan kegiatan kepramukaan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, dan MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.6 : Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan proporsi perangkat kurikulum yang telah melalui proses evaluasi dan pengembangan agar selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian terhadap lingkungan.
4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan komitmen dan upaya sistem pendidikan dalam merevisi dan menyempurnakan kurikulum agar mendukung pembentukan karakter siswa yang peduli sesama dan lingkungan hidup.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan dengan muatan cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan b = Jumlah total perangkat kurikulum yang ada
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan 2. Jumlah total perangkat kurikulum
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pengembangan Perangkat Kurikulum
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.7 : Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase MI/SDTK/Adhi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang terakreditasi minimal B
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi satuan pendidikan dasar berbasis keagamaan dan kepercayaan yang telah memperoleh akreditasi minimal peringkat B dari lembaga akreditasi pendidikan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan pada jenjang dasar tersebut yang telah memenuhi standar mutu pendidikan sesuai peringkat akreditasi minimal B.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah MI/SDTK/Adhi Widyalyaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal peringkat B b = Total jumlah MI/SDTK/Adhi Widyalyaya/Muda Dhammasekha
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah MI/SDTK/Adhi Widyalyaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal B 2. Total MI/SDTK/Adhi Widyalyaya/Muda Dhammasekha
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Akreditasi MI/SDTK/Adhi Widyalyaya/Muda Dhammasekha
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis pendidikan: MI/SDTK/Adhi Widyalyaya/Muda Dhammasekha
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.7 : Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase MTs/SMPTK/Madyama Widyalyaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal B
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi satuan pendidikan menengah pertama berbasis keagamaan dan kepercayaan yang telah memperoleh akreditasi minimal peringkat B dari lembaga akreditasi pendidikan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan pada jenjang menengah pertama tersebut yang telah memenuhi standar mutu pendidikan sesuai peringkat akreditasi minimal B.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah MTs/SMPTK/Madyama Widyalyaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal peringkat B b = Total jumlah MTs/SMPTK/Madyama Widyalyaya/Muda Dhammasekha
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah MTs/SMPTK/Madyama Widyalyaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal B 2. Total MTs/SMPTK/Madyama Widyalyaya/Muda Dhammasekha
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Akreditasi MTs/SMPTK/Madyama Widyalyaya/Muda Dhammasekha
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis pendidikan: MTs/SMPTK/Madyama Widyalyaya/Muda Dhammasekha
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.7 : Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha yang terakreditasi minimal B
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi Madrasah Aliyah (MA) yang telah memperoleh akreditasi minimal peringkat B dari lembaga akreditasi pendidikan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak MA yang telah memenuhi standar mutu pendidikan sesuai dengan kriteria minimal peringkat akreditasi B.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha yang terakreditasi minimal peringkat B b = Total jumlah MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha yang terakreditasi minimal peringkat B 2. Total jumlah MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Akreditasi MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.8 : Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi satuan pendidikan yang telah memenuhi kriteria sebagai satuan pendidikan unggul berdasarkan standar yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga terkait.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan pendidikan dengan kualitas unggul sesuai indikator mutu dan keunggulan tertentu (akademik, karakter, inovasi, dll).
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang terselenggara sebagai satuan pendidikan unggul b = Total jumlah satuan pendidikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan unggul 2. Total jumlah satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Unggul
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: PAUD/ sederajat, MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.9 : Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase Madrasah yang menerapkan program pendidikan bilingual
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi madrasah yang menyelenggarakan program pendidikan dengan dua bahasa pengantar, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa asing (umumnya bahasa Inggris atau bahasa Arab), dalam proses pembelajarannya.
4	Interpretasi	Persentase yang lebih tinggi menunjukkan semakin banyak madrasah yang memberikan layanan pendidikan bilingual, yang berpotensi meningkatkan kompetensi bahasa siswa dan daya saing lulusan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah madrasah yang menerapkan program pendidikan bilingual b = Total jumlah madrasah
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah madrasah dengan program pendidikan bilingual 2. Total jumlah madrasah
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Program Pendidikan Bilingual pada Madrasah
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.10 : Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi siswa pada satuan pendidikan yang berpartisipasi dalam ajang kompetisi berskala nasional atau internasional di bidang akademik, non-akademik, atau keagamaan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak siswa yang aktif dan memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional, mencerminkan kualitas pembinaan dan dukungan sekolah/madrasah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional b = Total jumlah siswa
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah siswa peserta kompetisi nasional/internasional 2. Total jumlah siswa
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Kompetensi Nasional pada Satuan Pendidikan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.11 : Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase madrasah dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi madrasah yang menerapkan tata kelola satuan pendidikan secara partisipatif (melibatkan komunitas sekolah, komite, orang tua, dan pihak lain) dan memperoleh penilaian pada kategori baik dalam aspek pengelolaan tersebut.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak madrasah yang melaksanakan prinsip good governance dalam pengelolaan pendidikan, yang berkontribusi pada peningkatan mutu layanan pendidikan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah madrasah dengan nilai pengelolaan partisipatif kategori baik b = Total jumlah madrasah yang dinilai pengelolaannya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Nilai pengelolaan madrasah 2. Kategori penilaian pengelolaan 3. Jumlah madrasah dinilai
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pengelolaan Madrasah yang Partisipatif
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.12 : Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menunjukkan proporsi materi ajar digital yang telah dikembangkan dan secara aktif dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar.
4	Interpretasi	Angka ini mencerminkan kesiapan dan adopsi teknologi digital dalam mendukung proses pembelajaran, serta sejauh mana materi ajar digital digunakan oleh pendidik dan peserta didik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah materi ajar digital yang digunakan dalam pembelajaran b = Jumlah total materi ajar digital yang tersedia
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah materi ajar digital yang tersedia 2. Jumlah materi ajar digital yang digunakan dalam pembelajaran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pembelajaran Materi Ajar Digital
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

BIDANG TATA KELOLA

IKSK.7.1 : Nilai Kinerja Anggaran

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Keuangan
2	Nama Indikator	Nilai Kinerja Anggaran
3	Konsep/Definisi	Nilai yang menunjukkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam suatu instansi pemerintah, mencakup perbandingan antara realisasi anggaran dengan rencana anggaran serta pencapaian output dan outcome yang diharapkan
4	Interpretasi	Menggambarkan seberapa baik instansi dalam mengelola dan menggunakan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta seberapa tepat waktu dan akurat pelaksanaan anggaran tersebut.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggabungkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dengan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
6	Nama Variabel Pembangun	1). Rencana Anggaran. 2). Realisasi Anggaran. 3). Output. 4). Outcome
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1). Perencanaan Anggaran. 2). Pelaksanaan Anggaran. 3). Evaluasi Kinerja Anggaran
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	NKA > 90% (Sangat Baik); NKA > 80% sampai dengan 90% (Baik); NKA > 60% sampai dengan 80% (Cukup); NKA lebih dari 50% sampai dengan 60% (Kurang); NKA sampai dengan 50% (Sangat Kurang)
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.8.1 : Persentase Aplikasi SIPKA satuan kerja sesuai standar

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Inspektorat Jenderal Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase Aplikasi SIPKA satuan kerja sesuai standar
3	Konsep/Definisi	Indikator untuk mengetahui tingkat kualitas Aplikasi SIPKA satuan kerja Kementerian Agama
4	Interpretasi	Semakin tinggi capaian yang diperoleh maka semakin baik kepatuhan peAplikasi SIPKA Kementerian Agama
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen dari KMA 94 Tahun 2021
6	Nama Variabel Pembangun	Memenuhi kriteria dan sistematika dalam KMA 94 Tahun 2021
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	Satker
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.8.2 : Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas

3	Konsep/Definisi	Indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas Kementerian Agama
4	Interpretasi	Semakin tinggi capaian yang diperoleh maka semakin baik sistem tata kelola dan layanan Kementerian Agama
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen dari KemenPAN RB
6	Nama Variabel Pembangun	1. Nilai Komponen Pengungkit (aspek pemenuhan dan aspek reform) 2. Nilai Komponen Hasil 3. Hasil Survei IPAK dan IPKP 4. Nilai SAKIP 5. Prosentase penyelesaian hasil pengawasan 6. Kepatuhan pelaporan LHKAN 7. Kualitas sarana layanan publik
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendampingan PMPZI 2. Penilaian Pendahuluan 3. Monitoring dan evaluasi PMPZI 4. Tindak lanjut hasil evaluasi ZI
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	1. Kementerian 2. Satker
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Portal RB Nasional

IKSK.9.1 : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kemenkeu
2	Nama Indikator	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
3	Konsep/Definisi	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas

		pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran
4	Interpretasi	Kenaikan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah tanda positif yang mencerminkan peningkatan dalam kualitas pelaksanaan anggaran oleh suatu kementerian/lembaga
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus perhitungan dilakukan oleh Kementerian Keuangan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran; 2. Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran; 3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	a. sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ; b. baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$; c. cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau d. kurang, apabila nilai IKPA < 70 .
11	Level Estimasi	1. Kementerian 2. Wilayah 3. Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data?(Disebutkan nama publikasinya)	Website Kemenkeu

IKSK.9.2 : Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
3	Konsep/Definisi	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan adalah ukuran yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas internal maupun eksternal. Indikator ini mencerminkan efektivitas pengelolaan pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi serta kebijakan yang berlaku.

4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase penyelesaian tindak lanjut, semakin baik tingkat kepatuhan dan efektivitas organisasi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti b. Jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang harus ditindaklanjuti (X1), 2. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (X2), 3. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (Y)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait tindak lanjut hasil pengawasan; 2. Pengembangan dashboard pemantauan kepatuhan; 3. Penguatan kerja sama dengan auditor internal dan eksternal
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada Kementerian 2. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada Kantor Wilayah 3. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada Satuan Kerja
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.9.3 : Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu
3	Konsep/Definisi	Persentase Satuan Kerja yang Menyusun RKBMN Tepat Waktu adalah ukuran kinerja yang menunjukkan proporsi satuan kerja yang berhasil menyusun dan menyampaikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan atau pedoman yang berlaku. Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan disiplin satuan kerja dalam perencanaan kebutuhan BMN sebagai bagian dari pengelolaan

		aset negara yang efektif dan transparan.
4	Interpretasi	semakin tinggi persentasi satuan kerja yang menyusun RKBMN semakin tinggi kesadaran dan kepatuhan organisasi terhadap perencanaan kebutuhan aset negara
5	Metode / Rumus Perhitungan	Jumlah satuan kerja yang menyusun dan menyerahkan RKBMN tepat waktu di bandingkan dengan Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun RKBMN
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun RKBMN dan Jumlah satuan kerja yang menyusun dan menyerahkan RKBMN tepat waktu
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelatihan bagi pengelola BMN di satuan kerja terkait tata cara penyusunan RKBMN; 2. pendampingan bagi satuan kerja dalam menyusun RKBMN. 3. Evaluasi berkala terhadap kendala yang dihadapi satuan kerja dan pemberian solusi,
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Persentase satuan kerja yang menyusun RKBMN pada Kementerian Agama, Eselon I Pusat, Kantor Wilayah
11	Level Estimasi	1. Kementerian Agama, 2. Eselon I, 3. Kantor Wilayah, 4 Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.9.4 : Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur tingkat implementasi sistem Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) oleh satuan kerja untuk memastikan laporan keuangan disusun secara andal, akurat, dan sesuai standar akuntansi pemerintah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa semakin banyak satuan kerja yang telah menerapkan PIPK secara memadai untuk mendukung akuntabilitas dan keandalan laporan keuangan.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah satuan kerja yang menerapkan PIPK b. Jumlah total satuan kerja
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan PIPK sesuai pedoman 2. Jumlah seluruh satuan kerja yang menjadi objek evaluasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Pengendalian Intern / Akuntabilitas Keuangan / Tata Kelola Pemerintahan
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.9.5 : Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu
3	Konsep/Definisi	Persentase Satuan Kerja yang Menyusun RKBMN Tepat Waktu adalah ukuran kinerja yang menunjukkan proporsi satuan kerja yang berhasil menyusun dan menyampaikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan atau pedoman yang berlaku. Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan disiplin satuan kerja dalam perencanaan kebutuhan BMN sebagai bagian dari pengelolaan aset negara yang efektif dan transparan.
4	Interpretasi	semakin tinggi persentasi satuan kerja yang menyusun RKBMN semakin tinggi kesadaran dan kepatuhan organisasi terhadap perencanaan kebutuhan aset negara

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah satuan kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu b. Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun RKBMN
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satker yang menyusun RKBMN tepat waktu 2. Jumlah seluruh satker yang diwajibkan menyusun RKBMN
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelatihan bagi pengelola BMN di satuan kerja terkait tata cara penyusunan RKBMN; 2. pendampingan bagi satuan kerja dalam menyusun RKBMN. 3. Evaluasi berkala terhadap kendala yang dihadapi satuan kerja dan pemberian solusi,
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Pengelolaan Barang Milik Negara / Tata Kelola Aset / Perencanaan Pemerintah
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.10.1 : Indeks Profesionalisme ASN

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	BKN
2	Nama Indikator	Indeks Profesionalisme ASN
3	Konsep/Definisi	Indeks profesionalisme ASN Kementerian Agama merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN (profesionalitas), memiliki integritas, tanggung jawab, inovasi dan keteladanan, serta berperilaku moderat (komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi) dalam melakukan tugas jabatannya.
4	Interpretasi	Semakin Tinggi Capaian Indeks Profesionalisme ASN pada Kementerian Agama maka Semakin Meningkatkan Presentasi SMART dan Moderat Religiuos ASN Kementerian Agama
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen yang disusun BKN

6	Nama Variabel Pembangun	Variabel Profesionalisme ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN (profesionalitas), memiliki integritas, tanggung jawab, inovasi dan keteladanan, serta berperilaku moderat (komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi) dalam melakukan tugas jabatannya.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Lingkup Variabel Profesionalisme ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN (profesionalitas), memiliki integritas, tanggung jawab, inovasi dan keteladanan, serta berperilaku moderat (komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi) dalam melakukan tugas jabatannya.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.10.2 : Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	KemenPAN RB dan BKN
2	Nama Indikator	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan
3	Konsep/Definisi	Setiap satuan kerja wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja
4	Interpretasi	Semakin Tinggi Satuan Kerja yang melakukan penyusunan maka semakin meningkat Pemenuhan Kebutuhan ASNnya
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen yang disusun oleh BKN dan Kemenpanrb
6	Nama Variabel Pembangun	Penyusunan Kebutuhan ASN berdasarkan Jumlah dan Jenis Jabatan

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Penyusunan Kebutuhan ASN berdasarkan Jumlah dan Jenis Jabatan di masing-masing satuan kerja
11	Level Estimasi	Nasional dan Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.10.3 : Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama melibatkan Stakeholder KemenPAN RB
2	Nama Indikator	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif
3	Konsep/Definisi	Predikat Pegawai Teladan merupakan bentuk penghargaan bagi pegawai Kementerian Agama yang diberikan setiap tahun. Pegawai teladan merupakan role model bagi pegawai ASN lainnya. Dinilai berdasarkan sikap, perilaku, kinerja dan inovasi
4	Interpretasi	Semakin banyak partisipan yang disertakan maka semakin banyak role model dan reinforcement yang diperoleh
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen yang disusun oleh Kemenag
6	Nama Variabel Pembangun	Dinilai berdasarkan sikap, perilaku, kinerja dan inovasi. Dan dibagi menjadi 4 kategori pegawai teladan (JPT Pratama, Jabatan Administrator/JF Madya, Jabatan Pengawas/JF Muda, Jabatan Pelaksana/JF Pertama/JF Keterampilan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan

10	Klasifikasi	Dinilai berdasarkan sikap, perilaku, kinerja dan inovasi. Dan dibagi menjadi 4 kategori pegawai teladan (JPT Pratama, Jabatan Administrator/JF Madya, Jabatan Pengawas/JF Muda, Jabatan Pelaksana/JF Pertama/JF Keterampilan
11	Level Estimasi	Nasional dan Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.11.1 : Persentase kasus hukum yang terselesaikan

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase kasus hukum yang terselesaikan
3	Konsep/Definisi	Indikator ini menunjukkan efektivitas sistem penanganan dan advokasi dalam menangani dan menyelesaikan kasus hukum, baik di tingkat peradilan pidana, perdata, administrasi, maupun kasus hukum lainnya.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik efektivitas sistem hukum dalam menyelesaikan perkara
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) * 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kasus hukum yang terselesaikan b. Jumlah kasus hukum
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah kasus hukum yang terselesaikan 2. Jumlah Kasus hukum
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan naskah peraturan 2. Pelatihan/pembinaan/Sosialisasi
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Triwulan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis kasus hukum: 1). Kasus Sengketa tanah. 2). Kasus hukum ASN

11	Level Estimasi	1. Kementerian 2. Unit Eselon I 3. PTKN 4. Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Portal Satker

IKSK.11.2 : Persentase rekomendasi izin orang asing

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase rekomendasi izin orang asing
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur persentase jumlah rekomendasi izin yang diberikan kepada orang asing yang akan melakukan kegiatan keagamaan atau pendidikan atau orang Indonesia yang akan melakukan kegiatan keagamaan dan pendidikan ke luar negeri dalam suatu periode tertentu
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin cepat dan efektif proses pengambilan keputusan terkait izin orang asing.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a). Jumlah rekomendasi izin orang asing yang diterbitkan. B). Jumlah rekomendasi izin orang asing
6	Nama Variabel Pembangun	1). Rekomendasi Izin Tinggal Terbatas (ITAS). 2). Rekomendasi Visa Tinggal Terbatas (VITAS). 3). Rekomendasi Izin Tinggal Tetap (ITAP). 4). Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). 5). Rekomendasi Pengesahan RPTKA Non DKP-TKA. 6). Rekomendasi Izin Tinggal Dinas. 7). Izin Penelitian. 8). Izin Studi. 9). Izin Penelitian. 10). Izin Studi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan Regulasi 2. Penyusunan SOP 3. Penerbitan rekomendasi 4. Monev
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Triwulan

10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis izin: 1). Rekomendasi Izin Tinggal Terbatas (ITAS). 2). Rekomendasi Visa Tinggal Terbatas (VITAS). 3). Rekomendasi Izin Tinggal Tetap (ITAP). 4). Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). 5). Rekomendasi Pengesahan RPTKA Non DKP-TKA. 6). Rekomendasi Izin Tinggal Dinas. 7). Izin Penelitian. 8). Izin Studi. 9). Izin Penelitian.. 10). Izin Studi
11	Level Estimasi	1. Kementerian 2. Unit Eselon I 3. Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Portal Satker

IKSK. 12.1 : Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah diakses
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur tingkat arsip yang telah dialihmedia (digitalisasi) dan dapat diakses dengan mudah melalui sistem elektronik, sebagai bagian dari transformasi tata kelola kearsipan modern.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa instansi semakin optimal dalam melakukan digitalisasi arsip serta memastikan aksesibilitasnya bagi pengguna internal maupun publik sesuai kewenangan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah arsip yang telah didigitalisasi dan dapat diakses dengan mudah b. Jumlah total arsip yang seharusnya didigitalisasi
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah arsip digital yang tersedia dan terakses 2. Jumlah keseluruhan arsip yang wajib didigitalisasi 3. Sistem penyimpanan dan akses digital yang digunakan (misalnya e-arsip, SRIKANDI)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Kearsipan / Transformasi Digital / Tata Kelola Informasi Pemerintah
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK. 12.2 : Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap
3	Konsep/Definisi	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan sesuai roadmap adalah Indikator yang menunjukkan sejauh mana pengembangan infrastruktur perkantoran, baik fisik maupun digital, telah direalisasikan sesuai dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan dalam roadmap pengembangan instansi atau organisasi. Indikator ini mencerminkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan atau renovasi fasilitas perkantoran dengan target yang telah direncanakan dalam periode tertentu.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik keselarasan antara pembangunan sarana-prasarana dengan roadmap yang ditetapkan
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kegiatan pengembangan sarana dan prasarana yang sesuai dengan roadmap b. Jumlah total kegiatan pengembangan sarana dan prasarana
6	Nama Variabel Pembangun	1. Sarana dan prasarana 2. Pengelolaan Fasilitas Perkantoran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Laporan pembangunan, 2). roadmap pengembangan, data aset perkantoran. 3). sistem manajemen infrastruktur
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Triwulan dan Tahunan

10	Klasifikasi	1). $\geq 80\%$ → Sebagian besar sarana dan prasarana telah dikembangkan sesuai roadmap dan berjalan optimal. 2). 60% - 79% → Pembangunan cukup sesuai roadmap, tetapi ada beberapa target yang belum terealisasi. 3). 40% - 59% → Pembangunan berjalan namun masih banyak yang tertunda atau tidak sesuai roadmap. 4). 20% - 39% → Sebagian kecil sarana dan prasarana telah dikembangkan sesuai roadmap, tetapi masih jauh dari target. 5). $< 20\%$ → Pengembangan sarana dan prasarana perkantoran masih sangat minim atau tidak sesuai roadmap.
11	Level Estimasi	1). Kementerian 2). Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Portal Satker

IKSK.13.1 : Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	KemenPAN RB
2	Nama Indikator	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID
3	Konsep/Definisi	Ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah atau badan publik telah mengimplementasikan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi secara efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator ini mencerminkan kesiapan, kualitas, dan efektivitas penyelenggaraan layanan informasi publik oleh PPID dalam memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terbuka dan dapat diakses dengan mudah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi tingkat kematangan, semakin efektif pula PPID dalam memberikan layanan informasi publik yang transparan dan akuntabel.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan instrumen dari Komisi Informasi
6	Nama Variabel Pembangun	1). Kebijakan dan Regulasi . 2). Struktur Organisasi dan SDM PPID . 3).Ketersediaan dan Kualitas Informasi Publik. 4). Layanan Informasi Publik. 5). Pengelolaan dan Inovasi Teknologi Informasi. 6).Monitoring dan Evaluasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan peraturan tentang pelaksanaan PPID pada Satuan Kerja 2. Pembinaan/Pelatihan 3. Monitoring dan Evaluasi
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan

10	Klasifikasi	1. Sangat Maju → PPID sudah sepenuhnya digital, transparan, responsif, dan memenuhi standar keterbukaan informasi. 2. Maju → PPID telah berjalan dengan baik tetapi masih memerlukan sedikit penyempurnaan dalam aspek tertentu. 3. Berkembang → PPID telah tersedia tetapi belum sepenuhnya efektif dalam penyelenggaraan layanan informasi. 4. Dasar → PPID baru terbentuk dan masih dalam tahap pengembangan sistem serta kapasitas SDM. 5. Belum Berkembang → PPID belum berfungsi secara optimal dan masih memerlukan banyak perbaikan.
11	Level Estimasi	1). Kementerian. 2). Unit Eselon I. 3). Kanwil Kementerian Agama Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.13.2 : Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi
3	Konsep/Definisi	Indikator yang mengukur pertumbuhan jumlah konten berbasis keagamaan dan pendidikan yang diterbitkan dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Konten ini dapat berupa artikel, video, podcast, modul pembelajaran, atau materi digital lainnya yang tersedia di berbagai platform, seperti website resmi, media sosial, dan aplikasi pendidikan
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase peningkatan, semakin aktif produksi dan distribusi konten keagamaan dan pendidikan
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi pada tahun berjalan b. Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Konten Keagamaan dan Pendidikan 2. Media Informasi Publik

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan konten keagamaan dan pendidikan 2. Pengadaan sistem informasi 3. Melakukan monitoring dan Evaluasi 4. Pelatihan dan sosialisasi
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Konten Digital 2. Konten Cetak
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.14.1 : Indeks Pembangunan Statistik

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	BPS
2	Nama Indikator	Indeks Pembangunan Statistik
3	Konsep/Definisi	Ukuran yang menggambarkan tingkat kemajuan pembangunan statistik Kementerian/instansi berdasarkan ketersediaan, kualitas, dan pemanfaatan data statistik. IPS digunakan untuk menilai sejauh mana suatu Kementerian/lembaga telah mengembangkan sistem statistik yang andal, akurat, dan relevan guna mendukung pengambilan kebijakan berbasis data
4	Interpretasi	Semakin berkualitas Kementerian/Lembaga mampu menyediakan sistem statistik data yang akurat, berkualitas, relevan, dan tepat waktu maka semakin berkualitas untuk mendukung pengambilan kebijakan dan pembangunan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	
6	Nama Variabel Pembangun	1). Prinsip SDI. 2). Kualitas Data. 3). Proses Bisnis Statistik. 4). Kelembagaan; dan 5). Sistem Statistik
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyelenggaraan satu data Kementerian Agama 2. Penyusunan data Statistik 3. Penguatan jabatan fungsional statistisi 4. Pengadaan sistem informasi satu data Kementerian Agama

8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Menggunakan ukuran skala tingkat kematangan 1 sampai 5 dengan satuan poin tingkat kematangan
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Pada Portal BPS

IKSK.15.1 : Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur sejauh mana realisasi anggaran bidang pendidikan digunakan secara efektif sesuai dengan output atau hasil yang direncanakan, baik dari sisi volume, kualitas, maupun ketepatan sasaran program.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa anggaran pendidikan tidak hanya terserap, tetapi juga menghasilkan output yang sesuai target, mencerminkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Nilai anggaran yang digunakan sesuai dengan output yang tercapai b. Total anggaran bidang pendidikan yang direalisasikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Realisasi anggaran pendidikan 2. Capaian output kegiatan (misalnya jumlah siswa terbantu, sarana pendidikan yang dibangun, pelatihan yang diselenggarakan) 3. Rencana kerja dan target output yang ditetapkan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.15.2 : Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur pertumbuhan kinerja Kementerian Agama dari tahun ke tahun berdasarkan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan adanya peningkatan efektivitas, efisiensi, dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Agama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = ((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Nilai kinerja Kementerian Agama pada tahun berjalan b. Nilai kinerja Kementerian Agama pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Capaian indikator kinerja utama (IKU) tahun berjalan 2. Capaian IKU tahun sebelumnya 3. Skor evaluasi kinerja kementerian dari instansi pembina (misal KemenPAN-RB atau Bappenas)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	-
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan

10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Perencanaan dan Evaluasi Kinerja / Reformasi Birokrasi / Manajemen Kinerja Pemerintah
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.15.3 : Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi kebijakan prioritas di bidang pendidikan yang telah dikomunikasikan secara aktif kepada publik melalui berbagai media, baik konvensional maupun digital, sebagai bagian dari transparansi dan edukasi publik.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa instansi semakin responsif dan terbuka dalam menyampaikan informasi kebijakan pendidikan kepada masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kebijakan prioritas bidang pendidikan yang telah disampaikan melalui media b. Jumlah total kebijakan prioritas bidang pendidikan yang ditetapkan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Daftar kebijakan prioritas pendidikan 2. Jumlah kebijakan yang dipublikasikan di media (TV, radio, media cetak, media sosial, website resmi, dll) 3. Kanal/media penyampaian informasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Komunikasi Publik / Pendidikan / Transparansi Kebijakan Pemerintah

11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
IKSK.15.4 : Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur pertumbuhan dari sisi aksesibilitas dan kualitas penyampaian informasi terkait program atau kebijakan prioritas bidang pendidikan kepada publik melalui berbagai media resmi, untuk memastikan informasi sampai secara tepat, luas, dan mudah dipahami.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan peningkatan keterjangkauan dan mutu publikasi informasi pendidikan, yang mencerminkan transparansi, akuntabilitas, serta keberhasilan strategi komunikasi publik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = ((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Nilai capaian akses dan kualitas informasi tahun berjalan b. Nilai capaian akses dan kualitas informasi tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah kanal/media yang digunakan untuk publikasi 2. Jumlah jangkauan atau interaksi publik terhadap informasi 3. Tingkat keterbacaan dan pemahaman konten 4. Frekuensi dan konsistensi publikasi kebijakan pendidikan 5. Penilaian kualitas konten oleh pengguna atau pemantauan internal
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Komunikasi Publik / Pendidikan / Transparansi Informasi Pemerintah

11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.15.5 : Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur tingkat kecukupan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang tersedia untuk mendukung layanan digital dan operasional sistem informasi di lingkungan instansi pemerintah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa kebutuhan infrastruktur TIK (seperti jaringan, server, perangkat keras, dan pusat data) telah terpenuhi secara optimal guna mendukung kelancaran layanan digital.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kebutuhan infrastruktur TIK yang telah terpenuhi b. Jumlah total kebutuhan infrastruktur TIK yang direncanakan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah perangkat keras (hardware) yang tersedia 2. Jumlah kebutuhan jaringan dan konektivitas yang terpenuhi 3. Jumlah layanan server/cloud yang tersedia 4. Total kebutuhan infrastruktur yang diidentifikasi dalam perencanaan TIK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Teknologi Informasi dan Komunikasi / Infrastruktur Digital / Dukungan Layanan Pemerintah Digital
11	Level Estimasi	Nasional

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.15.6 : Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi data prioritas yang telah tersedia dan sesuai dengan kebutuhan pengukuran indikator pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) instansi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa instansi telah menyediakan data yang relevan dan selaras dengan perencanaan nasional dan sektoral, sehingga mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah data prioritas yang tersedia dan selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra b. Jumlah total data yang dibutuhkan untuk mengukur indikator RPJMN dan Renstra
6	Nama Variabel Pembangun	1. Daftar indikator RPJMN dan Renstra yang membutuhkan data 2. Jumlah data yang telah tersedia dalam format dan frekuensi yang sesuai 3. Kesesuaian metadata dan definisi operasional data
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Perencanaan Pembangunan / Satu Data Indonesia / Tata Kelola Data Pemerintah
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
IKSK.15.7 : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kemenkeu
2	Nama Indikator	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur kualitas pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja berdasarkan aspek kepatuhan, efektivitas penyerapan anggaran, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi penggunaan dana, sebagaimana dinilai oleh Kementerian Keuangan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai kinerja, menunjukkan bahwa satuan kerja semakin baik dalam merencanakan dan merealisasikan anggarannya secara tertib, efisien, dan sesuai peraturan yang berlaku.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai dari Kementerian Keuangan
6	Nama Variabel Pembangun	
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-